



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



**DIREKTORAT IKAN AIR PAYAU
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerja sama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Ikan Air Payau, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan I tahun 2026 ini dapat terlaksana dengan baik. LKj Direktorat Ikan Air Payau tahun 2026 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Direktorat Ikan Air Payau dalam periode tahun 2026.

Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur dan memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja bagi Direktorat Ikan Air Payau, serta menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan

Jakarta, 18 April 2026
Direktur Ikan Air Payau



Ditandatangani
Secara Elektronik

Fernando J. Simanjuntak, S.St.Pi., M.Pi.
NIP. 19780523 200212 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Ikan Air Payau Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja Direktorat Ikan Air Payau merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Perikanan Budi Daya Tahun 2026-2029 serta Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Ikan Air Payau tahun 2026 yang memuat indikator kinerja, target yang akan dicapai, realisasi kinerja, kendala/permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan indikator kinerja, dan rencana aksi sebagai bentuk rekomendasi yang akan dilaksanakan pada periode yang akan datang.

Direktorat Ikan Air Payau telah menetapkan peta strategis tahun 2026 dengan 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 (enam) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Sasaran kegiatan satker Direktorat Ikan Air Payau adalah sebagai berikut:

1. SK-1 : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau. Kegiatan ini memiliki 14 (empat belas) IKU, yaitu:
 - a) Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke Masyarakat (Ekor).
 - b) Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang diproduksi UPT (Unit) Ikan Konsumsi Ikan Air Payau yang Diproduksi oleh UPT (Kg).
 - c) Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT (Kg).
 - d) Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji oleh UPT (Sampel).
 - e) Sampel ikan air payau yang Diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan oleh UPT (Sampel).
 - f) Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau yang disusun (Rekomendasi Kebijakan).
 - g) Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel).
 - h) Sampel Surveilance Resistensi Antimikroba Ikan Air Payau (AMR) yang Diuji (Sampel).
 - i) Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel).
 - j) Infrastruktur Budi Daya Udang yang dibangun (Unit).

- k) Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau (Unit).
 - l) Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun (Unit).
 - m) Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan yang dibangun (Unit).
 - n) Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang dibangun (Unit).
2. SK-2: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau. Kegiatan ini memiliki 6 (enam) IKM, yaitu:
- a) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 86 (Persen).
 - b) Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 84,2 (Nilai)
 - c) Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 81,5 (Indeks).
 - d) Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 81 (Nilai).
 - e) Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 100 (Persen)
 - f) Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau 100 (Persen).

Berdasarkan 20 (dua puluh) indikator kinerja sebanyak 12 (dua belas) indikator kinerja telah dilakukan penghitungan capaian realisasi kegiatan dengan target yang telah ditentukan pada tahun 2026, adapun indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke masyarakat secara triwulanan dengan target Triwulan I yaitu 16.499.763 ekor dari target tahun 2026 sebanyak 110.788.280, dengan realisasi yang tercapai adalah 19.788.280 ekor, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan I.
2. Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Udang yang diproduksi UPT Pelaksana pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan I yaitu 3.362.000 ekor dari target tahun 2026 sebanyak 88.818.868 dengan realisasi yang tercapai adalah 4.528.717 ekor, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan I bahkan lebih dari target.

3. Pakan Ikan Air Payau yang Diproduksi untuk Operasional UPT pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan I yaitu 1.564 dari target tahun 2026 sebanyak 105.416, dengan realisasi yang tercapai adalah 170 belum mencapai target pada triwulan I.
4. Sampel Pakan dan Obat Ikan Payau yang diuji oleh UPT (sampel), pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan I yaitu 45 dari target tahun 2026 sebanyak 188, dengan realisasi yang tercapai adalah 123, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan bahkan melebihi target.
5. Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan, pengukuran indikator kinerja ini adalah Triwulan I , yaitu 2.301 target tahun 2026 sebanyak 9.235, dengan realisasi yang tercapai adalah 4.991, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan, bahkan melebihi target.
6. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Tahunan yaitu 3 Rekomendasi dengan realisasi yang tercapai adalah 1 Rekomendasi untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan
7. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji secara triwulanan dengan target Triwulan I yaitu 54 sampel dari target tahun 2026 sebanyak 255 dengan realisasi yang tercapai adalah 70 sampel , sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan I
8. Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau pengukuran indikator kinerja ini adalah Triwulan I yaitu 83 target tahun 2026 sebanyak 536, dengan realisasi yang tercapai adalah 152, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan bahkan melebihi target
9. Sampel monitoring Residu Ikan Air Payau yang diuji (sampel) secara triwulanan dengan target Triwulan I yaitu 65 sampel dari target tahun 2026 sebanyak 480 dengan realisasi yang tercapai adalah 52 sampel , sehingga capaian untuk indikator ini sudah belum mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan I
10. Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB), pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan

target tahun 2026 sebanyak 380, dengan realisasi yang tercapai adalah 8, sehingga capaian untuk indikator ini belum mencapai target .

11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan I 100 dari target tahun 2026 sebanyak 86 persen, dengan realisasi yang tercapai adalah 100 persen, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan pada Triwulan I
12. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan I yaitu 100 persen dari target tahun 2026 sebanyak 100 persen, dengan realisasi yang tercapai adalah 100 persen, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR	XI
BAB I. PENDAHULUAN	12
1.1. LATAR BELAKANG.....	12
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	14
1.3. TUJUAN DAN FUNGSI.....	14
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA	15
1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDI DAYA	17
1.5.1. <i>Potensi</i>	17
1.5.2. <i>Permasalahan</i>	19
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA	20
BAB II Perencanaan Dan Penetapan Kinerja	22
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029	22
2.2. SASARAN STRATEGIS	23
2.3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025	25
2.4. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	29
Bab Iii. Akuntabilitas Kinerja	30
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	33
3.2.1. <i>Sasaran Kegiatan (Sk-1) : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau</i>	33
Iku 1. Bantuan Calon Induk Unggul Dan Benih Ikan Air Payau/Udang Yang Disalurkan Ke Masyarakat (Ekor)	33
Iku 2. Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Udang Yang Di Produksi UPT (Ekor)	37
Iku 3. Pakan Ikan Konsumsi Ikan Air Payau Yang Di Produksi Oleh UPT (Ekor).....	37
Iku 4. Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau Yang diuji oleh UPT Osampel)	38
Iku 5. Sampel Ikan Air Payau yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium.....	43
Iku 6. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau (rekomendasi kebijakan)	Error! Bookmark not defined.
Iku 7. Sampel Monitoring Penyakit Penyakit Ikan Air Payau Yang Diuji (sampel)	Error! Bookmark not defined.
Iku 8. Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Payau (AMR) yang diuji (sampel)	64

Iku 9. Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang diuji (sampel).....	Error! Bookmark not defined.
Iku 10. Infrastruktur Budi Daya Udang Yang Ditingkatkan (Unit)	55
Iku 11. Unit Budidaya Ikan Air PAYau yang di bina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budidaya (CBIB dan CPIB)(unit usaha).....	Error! Bookmark not defined.
Iku 12. Budidaya Udang Terintegrasi-ISF yang di bangun (unit).....	75
Iku 13. Klaster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan Yang di bangun (unit).....	80
Iku 14. Revitalisasi Tambak Budidaya Ikan Air Payau yang di bangun (unit)..	81
3.2.2 Sasaran Kegiatan (Sk-2) : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik	
<i>Lingkup Dit. Ikan Air Payau</i>	Error! Bookmark not defined.
Iku 15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau.....	Error! Bookmark not defined.
Iku 16. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau.....	Error! Bookmark not defined.
Iku 17. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau.....	89.
Iku 18. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau	
Iku 19. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau Satker Direktorat Ikan Air Payau	Error! Bookmark not defined.
Iku 20. Persentase Penyelesaian Identifikasi Sop Satker Direktorat Ikan Air Payau..	86
Bab Iv. Penutup	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Ikan Air Payau	17
Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Payau Selama Periode Triwulan I Tahun 2026	30
Tabel 3. Bantuan Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. Capaian IKU Bantuan Calon Induk Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. Rekapitulasi Bantuan Benih Ikan Air Payau/udang yang Disalurkan ke Masyarakat	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6. Rekapitulasi Bantuan Calon Unggul/Benih/Udang atau ikan konsumsi yang di produksi UPT	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7. Capaian Bantuan Calon Unggul/ Benih/Udang atau ikan konsumsi yang di produksi UPT	Error! Bookmark not defined.
Tabel 8. Target dan Realisasi Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang di produksi untu Operasional UPT	Error! Bookmark not defined.
Tabel 9. Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diproduksi untuk operasional UPT	Error! Bookmark not defined.
Tabel 10. Target dan Realisasi Sampel Realisasi Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang diuji	40
Tabel 11. Capaian Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang diuji.....	41
Tabel 12. Target Sampel per Ruang Lingkup Pengujian Tahun 2026.....	42
Tabel 13. Target Sampel Ikan Air Payau yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (sampel) tahun 2026	42
Tabel 14. Target dan Realisasi Sampel Ikan Air Payau yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (sampel) tahun 2026.....	43
Tabel 15. Capaian Sampel Ikan Air Payau yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (sampel) tahun 2026.....	43
Tabel 16. Capaian Sampel Ikan Air Payau yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (sampel) berdasarkan ruang lingkup pengujian Triwulan I tahun 2026	44
Tabel 17. Capaian Sampel Ikan Air Payau yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (sampel) tahun 2026.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 18. Capaian Iku Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Ikan Air Payau	Error! Bookmark not defined.
Tabel 19. Target dan Realisasi Sampel Monitoring Penyakit Ikan Triwulan I tahun 2026.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 21. Sasaran Bakteri dan Jenis Komoditas dalam Pengujian AMR.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau (sampel) Triwulan I tahun 2026	50

Tabel 23. Capaian Iku Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau	50
Tabel 24. Target Indikator Kinerja sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang diuji (sampel) Tri wulan I tahun 2026.....	52
Tabel 25. Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau ...	52
Tabel 26. Klaster dan Saluran Tambak Masyarakat... Error! Bookmark not defined.	
Tabel 27. Capaian Iku Infrastruktur Budidaya Udang yang ditingkatkan (unit).....	56
Tabel 28. Capaian Unit Usaha Budidaya Ikan Air Payau yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB)	58
Tabel 29. Unit Usaha Pembesaran dengan komoditas ikan air payau	58
Tabel 30. Capaian Iku Budidaya Udang Terintegrasi -ISF yang di bangun	Error! Bookmark not defined.
Tabel 31. Capaian Iku Revitalisasi Tambak Udang Budidaya Ikan Air Payau yang di bangun	72
Tabel 32. Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Lingkup DJPB Triwulan I Tahun 2026.....	73
Tabel 33. Capaian Iku Tabel 32. Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Lingkup DJPB Triwulan I Tahun 2026.....	73
Tabel 34.	
Tabel 37. Jenis Penyakit Ikan yang Diuji Pada Kegiatan Monitoring Penyakit Ikan Air Payau Tahun 2025.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 38. . Sasaran Bakteri dan Jenis Komoditas dalam Pengujian AMR.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja “Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Payau (AMR) yang Diuji (Sampel)” Tahun 2025 ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel 40. Capaian Indikator Kinerja “Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Payau (AMR) yang Diuji (Sampel)” Tahun 2025 per masing-masing komoditas di 7 (tujuh) UPT DJPB Tahun 2025.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 41. Capaian IKU Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau	Error! Bookmark not defined.
Tabel 42. Progress Kegiatan IISAP Tahun 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 43. Capaian IKU Infrastruktur Budidaya Udang Yang ditingkatkan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 44. Capaian IKU Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Ikan Air	77
Tabel 45. Capaian IKU Klaster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan	63
Tabel 46. Nilai Akuntabilitas Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 47. Capaian IKU Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau	77
Tabel 48. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau	80
Tabel 49. Capaian Tiak Lanjut LHP BPK atas Lapran Keuangan KKP Tahun 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 50. .Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Payau	Error! Bookmark not defined.

Tabel 51. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau	Error! Bookmark not defined.
Tabel 52 . Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Direktorat Ikan Air Payau Triwulan IV Tahun 2025.....	82
Tabel 53. Rekap Persuratan pada Direktorat Ikan Air Payau Triwulan IV Tahun 2025	84
Tabel 54. Layanan Kegiatan Rapat pada Direktorat Ikan Air Payau TW IV 2025 ...	85
Tabel 55. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau	86
Tabel 56. . Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau	Error! Bookmark not defined.
Tabel 57. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau	Error! Bookmark not defined.
Tabel 58. Capaian Nilai Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air	Error! Bookmark not defined.
Tabel 59. Capaian IKU Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Payau	16
Gambar 2. Keragaan jabatan di Direktorat Ikan Air Payau	17
Gambar 3. Luas Perikanan Budi Daya Eksisting Tahun 2020	18
Gambar 4. Perjanjian kinerja tahun 2025 direktorat ikan air payau	27
Gambar 5. Hasil pengukuran kinerja sampai Triwulan I tahun 2026.....	29
Gambar 6. Matrik Perhitungan Indeks profesionalitas ASN.....	79

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang sangat besar. Peran penting kelautan dan perikanan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029. RPJMN merupakan penjabaran visi, misi dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang disusun berdasarkan RPJP Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024.

Rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memuat arah kebijakan, sasaran strategis, program dan kegiatan serta dukungan terhadap program prioritas nasional yang selaras dengan 8 (delapan) misi Asta Cita yang terdiri atas : (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan

birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2026 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan; (3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Dengan ditetapkannya arah dan kebijakan serta kegiatan pembangunan perikanan budi daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 2 (dua) perspektif dengan masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 17 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan I tahun 2026 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program atau kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Ikan Air Payau. Tujuan penyusunan LKj Direktorat Ikan Air Payau Triwulan I tahun 2026 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Ikan Air Payau selama tahun periode Triwulan IV tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budi daya ke depan sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

1.3. Tujuan dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Ikan Air Payau mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan budi daya pada komoditas ikan air payau. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Ikan Air Payau menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

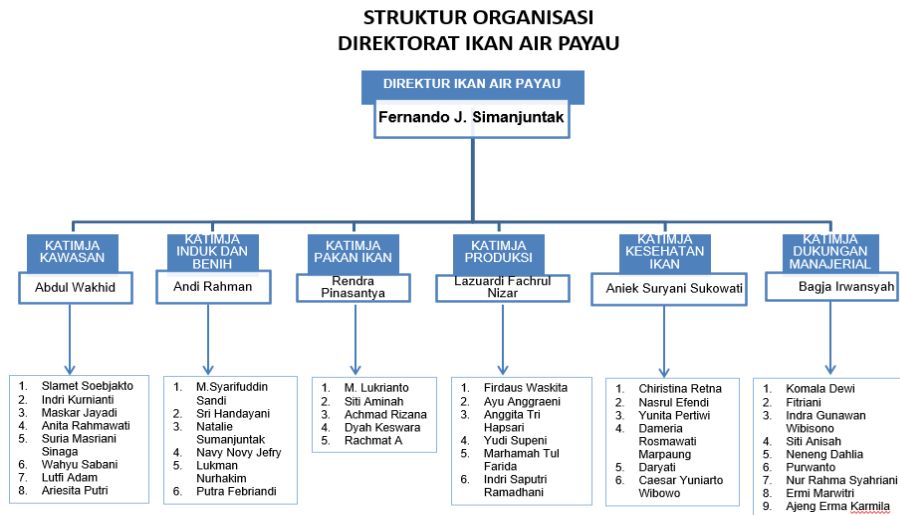
- (i) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (ii) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan

budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;

- (iii) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (iv) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (v) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Payau

1.4. Sumber Daya Manusia

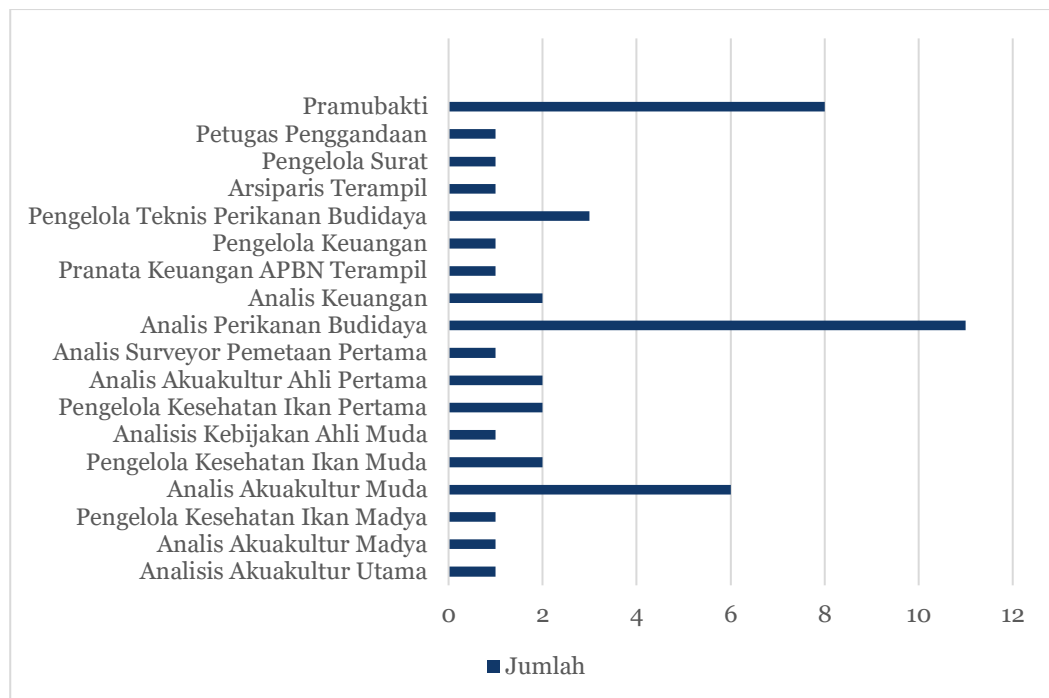
Sesuai dengan peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2025 terjadi perubahan mekanisme kerja baru di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, salah satunya adalah dengan melakukan perubahan organisasi Direktorat Produksi dan Usaha Budi daya menjadi Direktorat Ikan Air Payau. Sehingga susunan struktur organisasi Direktorat Ikan Air Payau di tahun 2026 terdiri atas Direktur Ikan Air Payau dan 6 (enam) Tim kerja. Susunan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah:



Update per 19 April 2025

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Payau

Jumlah pegawai Direktorat Ikan Air Payau sampai dengan Desember tahun 2026 berjumlah 47 orang yang terdiri dari pegawai PNS sejumlah 35 orang, PPPK 4 dan PPPK Penuh Waktu yang diangkat di TW I berjumlah 7 orang dan PPPK Paruh berjumlah 1 orang. Data pegawai jika dilihat berdasarkan jenis jabatan di Direktorat Ikan Air Payau masih terbagi menjadi dua yaitu jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Keragaan pejabat fungsional umum dan tertentu Direktorat Ikan Air Payau dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Keragaan jabatan di Direktorat Ikan Air Payau

Sedangkan Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi SDM Direktorat Ikan Air Payau adalah sebagai berikut: (i) S2 sejumlah 13 orang (27,66%); (ii) S1 sejumlah 25 orang (53,11%); (iii) D3 sejumlah 2 orang (4,25 %); dan (iv) SLTA/D1/D2 sejumlah 6 orang (12,76%).

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Ikan Air Payau

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)	%
1.	Magister (S2)	13	27,66
2.	Sarjana (S1/D4)	25	53,19
3.	Diploma (D3)	2	4,25
4.	SLTA/ DI	6	12,76
5.	/D2 SMP	1	2,12
Jumlah		47	100

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

1.5.1. Potensi

Berdasarkan jenis tipologi ekosistem maka luas potensi perikanan budi daya dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu perikanan budi daya laut, perikanan budi daya air payau, dan perikanan budi daya air tawar. Luas total potensi lahan perikanan budi daya di Indonesia mencapai 17,92 juta hektar yang terdiri dari 12,12 juta hektar potensi budi daya laut; 2,96 juta hektar lahan perikanan budi daya air payau; dan 2,84 juta hektar potensi budi daya air tawar.

Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 10,16 persen untuk budi daya air tawar, 22,92 persen pada budi daya air payau dan 0,84 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

Pemanfaatan lahan perikanan budi daya masih sangat kecil dengan rata rata sebesar 11,31 % dengan rincian berikut: (i) 102.254 hektar (0,84%) untuk perikanan budi daya air laut; (ii) 679.448 hektar (22,92%) untuk perikanan budi daya air payau; (iii) 287.521 hektar (10,16%) untuk perikanan budi daya air tawar (Satudata KKP 2022).

No.	Jenis Budidaya <i>Type of Aquaculture</i>	Potensi <i>Potency</i> ¹⁾	Pemanfaatan <i>Usage</i> ²⁾	Peluang Pengembangan <i>Developing Opportunity</i>	Persentase Pemanfaatan Lahan Budidaya <i>Percentage of Usage Aquaculture Area</i>
1	Laut - <i>Marine culture</i>	12.123.383	102.254	12.021.129	0,84
2	Payau - <i>Brackishwater culture</i>	2.964.331	679.448	2.284.883	22,92
3	Tawar - <i>Freshwater culture</i>	2.830.540	287.521	2.543.019	10,16

Keterangan - *Note* :

¹⁾ Data berdasarkan buku saku statistik perikanan budidaya tahun 2015;

²⁾ Data berdasarkan Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan 2020

Gambar 3. Luas Perikanan Budi Daya Eksisting Tahun 2020
(Sumber: Jurnal Kelautan dan Perikanan dalam angka tahun 2022, ISSN 2829-7660. Volume 1 Tahun 2022)

Ditinjau dari aspek ekonomi, dan sosial perikanan budi daya merupakan salah satu subsektor yang mempunyai potensi dan peran strategis sebagai alternatif untuk peningkatan perkonomian nasional, kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan nasional. Potensi produksi perikanan budi daya di Indonesia diestimasi mencapai 100 juta ton/tahun dengan nilai produksi mencapai 251 miliar US Dolar (Dahuri 2018). Pengembangan perikanan budi daya diestimasi akan menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 15 juta orang pada tahun 2030, apabila kebijakan peningkatan produksi yang berorientasi ekspor dan domestik diimplementasikan secara tepat dan

berkelanjutan di Indonesia. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sektor perikanan budi daya mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Food Agriculture Organization* (FAO), menyebutkan bahwa perikanan budi daya mempunyai relevansi terhadap pencapaian SDGs terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional (*goal 1*), motor penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan pembudi daya dan penciptaan lapangan kerja (*goal 4*), menjamin ketersediaan suplai ikan melalui peningkatan produksi ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*goal 12*), dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan (*goal 14*).

1.5.2. Permasalahan

Perikanan budi daya merupakan salah satu sektor alternatif yang diharapkan menjadi sumber devisa negara dan tidak hanya memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, penyediaan gizi, dan ketahanan pangan nasional. Perikanan budi daya menjadi pilihan logis yang sangat mungkin dikembangkan di sektor kelautan dan perikanan setelah terjadinya stagnasi produksi perikanan tangkap dalam beberapa tahun terakhir (FAO 2007). Potensi perikanan budi daya yang dimiliki Indonesia sangat besar karena tidak hanya didasarkan pada aspek dua dimensi dari ruang namun secara lebih luas dapat dilihat dari tiga dimensi ruang termasuk kedalaman air. Namun pembangunan sektor perikanan budi daya di Indonesia belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan selama ini.

Permasalahan dan tantangan dalam mengoptimalkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan sangat kompleks dimana dalam hal ini dibagi menjadi permasalahan umum, permasalahan internal, dan permasalahan eksternal.

Permasalahan umum yang dihadapi Direktorat Ikan Air Payau dalam peningkatan produksi perikanan budi daya adalah 1) ketersediaan benih di sentra budi daya yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, 2) disparitas antara lokasi sentra produksi yang potensial dikembangkan (seperti daerah terpencil, wilayah timur, dan wilayah perbatasan) dengan sentra sarana dan prasarana seperti pakan ikan, peralatan dan mesin penunjang budi daya, 3) musibah banjir dan bencana alam di sentra budi daya yang menyebabkan kegagalan panen dan rusaknya prasarana budi daya, 4) munculnya penyakit baru dan serangan penyakit pada komoditas utama budi

daya sehingga meningkatkan biaya produksi atau kegagalan panen, 5) kurangnya kemampuan beradaptasi pelaku usaha terhadap perubahan dalam usaha budi dayanya (perubahan iklim, perkembangan teknologi, peningkatan persyaratan pasar dan persaingan usaha)

Permasalahan internal yang dihadapi oleh Direktorat Ikan Air Payau dalam pembangunan perikanan budi daya berkelanjutan adalah 1) keterbatasan anggaran dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diberikan, 2) sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, 3) keterbatasan kesempatan untuk melakukan sinergitas dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan usaha budi daya.

Sedangkan permasalahan eksternal dalam pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan yaitu 1) kurangnya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain seperti asosiasi dan pemerintah daerah, 2) kompleksnya perizinan berusaha bagi pembudi daya di Indonesia, 3) lemahnya stabilitas usaha budi daya bagi skala mikro dan kecil yang menyebabkan kurangnya kepercayaan lembaga pembiayaan (tidak *bankable*), 4) meningkatnya persyaratan produk perikanan budi daya di pasar nasional dan internasional, 5) keterlibatan berbagai pihak dalam penguatan kelembagaan usaha budi daya belum optimal.

Tantangan dalam pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan di masa sekarang yaitu: (i) penurunan daya beli konsumen sehingga usaha budi daya harus efisien dan menghasilkan ikan dengan harga terjangkau, (ii) isu kerusakan lingkungan akibat kegiatan budi daya sehingga pelaksanaan kegiatan budi daya harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan; (iii) perkembangan teknologi dan perubahan demografi penduduk sehingga perlu penyesuaian dalam kegiatan usaha budi daya dan pemasaran hasilnya. (iv) persaingan ekspor akibat peningkatan produksi budi daya di beberapa negara lain berkembang lebih pesat dengan harga yang bersaing; (v) meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap kegiatan budi daya.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj

Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan I tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Ikan Air Payau selama kurun waktu Triwulan III tahun 2026.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Ikan Air Payau serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Ikan Air Payau, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2025 – 2029, rencana kerja dan anggaran tahun 2026, penetapan kinerja Direktorat Ikan Air Payau serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Ikan Air Payau.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Ikan Air Payau serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2026 – 2029

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 telah diterbitkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045.

RKP Tahun 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan dan/atau Kemiskinan Ekstrem. Delapan (8) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 terdiri atas: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta

peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan; (3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Terkait dengan program pembangunan perikanan budi daya, KKP memiliki beberapa rencana kegiatan antara lain produksi benih dan induk unggul, produksi pakan ikan, pembinaan sertifikasi subsektor pembudidayaan ikan, monitoring residu, penyakit ikan, dan pemantauan resistensi antimikroba, pengembangan budidaya komoditas unggulan berbasis klaster, pembangunan kampung perikanan budidaya, bantuan benih dan calon induk ikan, pengelolaan irigasi tambak partisipatif (PITAP). Klaster kawasan revitalisasi tambak udang dan bandeng, dan Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP)

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Ikan Air Payau sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan. Dalam penyusunan peta strategi terdapat empat perspektif, yaitu *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective* yang dijabarkan dalam 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau:
 - a. Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke Masyarakat (Ekor).
 - b. Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang diproduksi UPT (Unit) Ikan Konsumsi Ikan Air Payau yang Diproduksi oleh UPT (Kg).
 - c. Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT (Kg).
 - d. Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji oleh UPT (Sampel).

- e. Sampel ikan air payau yang Diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan oleh UPT (Sampel).
 - f. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau yang disusun (Rekomendasi Kebijakan).
 - g. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel).
 - h. Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Payau (AMR) yang Diuji (Sampel).
 - i. Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel).
 - j. Infrastruktur Budi Daya Udang yang dibangun (Unit).
 - k. Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau (Unit).
 - l. Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun (Unit).
 - m. Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan yang dibangun (Unit).
 - n. Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang dibangun (Unit).
 - o. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang di yang Diuji (Sampel);
 - p. Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau (Sampel);
 - q. Infrastruktur Budi Daya Udang yang ditingkatkan (Unit)
 - r. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau (Rekomendasi Kebijakan)
 - s. Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan yang dikembangkan (Unit).
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau:
- a. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau (Nilai)
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 86 (Persen).
 - c. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 84,2 (Nilai)

- d. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 81,5 (Indeks).
- e. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 81 (Nilai).
- f. Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 100 (Persen)
- g. Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau 100 (Persen).

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja Dit. Ikan Air Payau tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT IKAN AIR PAYAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fernando Jongguran Simanjuntak**
Jabatan : Direktur Ikan Air
Payau Selanjutnya disebut
Pihak Pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Payau



Ditandatangani
Secara Elektronik

Fernando Jongguran Simanjuntak

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT IKAN AIR PAYAU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	1.	Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke Masyarakat (Ekor)	110.590.898
		2.	Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang diproduksi UPT (Unit)	88.818.868
		3.	Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT (Kg)	105.416
		4.	Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji oleh UPT (Sampel)	188
		5.	Sampel ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan oleh UPT (Sampel)	9.235
		6.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau yang disusun (Rekomendasi Kebijakan)	3
		7.	Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)	255
		8.	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Payau (AMR) yang Diuji (Sampel)	536
		9.	Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)	480
		10.	Infrastruktur Budi Daya Udang yang dibangun (Unit)	7
		11.	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau (Unit)	380
		12.	Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun (Unit)	1
		13.	Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan yang dibangun (Unit)	1
		14.	Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang dibangun (Unit)	4
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau	15.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen)	86
		16.	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau (Nilai)	84,2
		17.	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau (Indeks)	81,5
		18.	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Payau (Nilai)	81
		19.	Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen)	100

		20	Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen)	100
--	--	----	--	-----

DATA ANGGARAN:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	301.933.567.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Payau	183.313.000
Total Anggaran Direktorat Ikan Air Payau Tahun 2026		302.116.880.000

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Payau

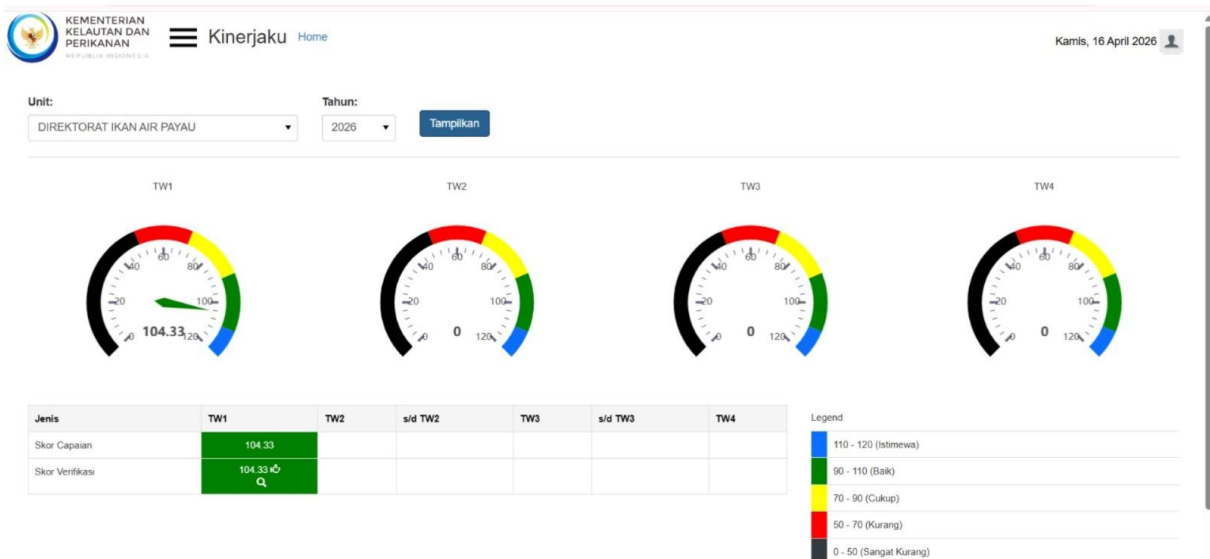


Ditandatangani
Secara Elektronik

Fernando Jongguran Simanjuntak

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implemmentasi Aplikasi BSC <http://kinerjaku.kkp.go.id> yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi. Berikut hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan I tahun 2026 berdasarkan hasil penilaian pada aplikasi kinerjaku.



Gambar 5. Hasil pengukuran kinerja sampai Triwulan I tahun 2026

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budi daya pada tahun 2026 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Ikan Air Payau menitikberatkan pada 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 20 (Sembilan belas) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi DJPB dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id> diperoleh Nilai Pencapaian sebesar 104,33 % (*Seratus empat koma tiga-tiga persen*). Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Ikan Air Payau pada periode Triwulan I tahun 2026 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Payau Selama Periode Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUNAN (2026)	TARGET TW I	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	1. Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke Masyarakat (Ekor)	110.590.898	16.499.763	19.788.280	17,89
	2. Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang diproduksi UPT (Unit)	88.818.868	3.362.000	4.528.717	134,70
	3. Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT (Kg)	105.416	1.564	170	0,16
	4. Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji oleh UPT (Sampel)	188	45	123	65,42

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUNAN (2026)	TARGET TW I	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
	5. Sampel ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan oleh UPT (Sampel)	9.235	2.301	4.991	217
	6. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau yang disusun (Rekomendasi Kebijakan)	3	1	1	33,33
	7. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)	255	54	125	231
	8. Sampel Surveilan Resistensi Antimikroba Ikan Air Payau (AMR) yang Diuji (Sampel)	536	83	152	28,36
	9. Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)	480	65	52	10,83
	10. Infrastruktur Budi Daya Udang yang dibangun (Unit)	7	-	-	-
	11. Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau (Unit)	380	-	8	2,1
	12. Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun (Unit)	1	-	-	-
	13. Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan yang dibangun (Unit)	1	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUNAN (2026)	TARGET TW I	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
		14	Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang dibangun (Unit)	4	-	-	-
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau	15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen)	86	100	100	116,27
		16	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau (Nilai)	84,2	-	-	-
		17	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau (Indeks)	81,5	-	-	-
		18	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Payau (Nilai)	81	-	-	-
		19	Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen)	100	100	100	100
		20	Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen)	100	-	-	-

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK-1): Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau

IKU 1. Bantuan Calon Induk Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke masyarakat (Ekor)

Kualitas induk mempengaruhi kualitas benih yang dihasilkan dan berdampak pada keberhasilan kegiatan budidaya secara keseluruhan. Induk yang baik adalah induk yang dihasilkan dari proses seleksi induk yang jelas sehingga secara ketertelusuran dapat dipertanggung jawabkan asal usul dari induk tersebut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan induk unggul dan benih. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi induk menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi tersebut.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi calon induk, benih ikan dan udang unggul ikan air payau yang dihasilkan oleh UPT DJPB. Adapun peruntukkan dari hasil produksi calon induk ikan air payau ini dapat disalurkan kepada unit pembenihan di masyarakat. Unit pembenihan yang dapat menerima bantuan ini adalah unit pembenihan perseorangan, kelompok atau unit pembenihan ikan milik daerah yang mampu melakukan pemeliharaan induk dan pembenihan secara menyeluruh untuk memproduksi benih. Ketersediaan sarana dan SDM diharapkan dapat dipenuhi oleh unit pembenihan yang akan mendapatkan calon induk ikan air payau ini.

Target Indikator Kinerja Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang Disalurkan ke Masyarakat Tahun 2026 ditetapkan sebanyak 110.590.898 ekor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.070.899.000, yang disalurkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) yaitu BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BPBAP Ujung Batee, BPBAP Takalar dan BPIU2K Karangasem. Capaian realisasi sebanyak 19.788.280 ekor atau 17,89%, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.358.412.945,- atau 38,85% dari target tahun 2026 sesuai dengan tabel 1.

Tabel 3. Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang Disalurkan ke Masyarakat Tahun 2026

Output Kegiatan	Target	Pagu	Target (ekor)	Capaian Realisasi		Jumlah		UPT Pelaksana
				Tw I		ekor	anggaran	
			Tw I	ekor	anggaran			
Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke masyarakat	110.590.898	6.070.899.000	16.499.763	19.788.280	2.358.412.945	19.788.280	2.358.412.945	
Jumlah Benih Ikan Udang yang Disalurkan ke Masyarakat	102.952.284	3.886.418.000	15.468.719	18.799.080	1.549.623.203	18.799.080	1.549.623.203	P01, P02, P03, P04, PL01
Jumlah Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat	7.619.248	1.371.875.000	1.028.044	985.000	351.483.212	985.000	351.483.212	P01, P02, P03, P04
Jumlah Calon Induk Unggul Udang yang Disalurkan ke Masyarakat	19.162	797.041.000	3.000	4.200	457.306.530	4.200	457.306.530	P03, P04, PL01
Jumlah Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat	204	15.565.000	-	-	-	-	-	P04

Keterangan:

P : Payau
 PL : Payau Laut
 TP : Tawar Payau
 P01 : BBPBAP Jepara
 P02 : BBPBAP Situbondo
 P03 : BBPBAP Ujung Batee
 P04 : BBPBAP Takalar
 PL01 : BPIUUK Karangasem
 TP01 : BLUPPB Karawang

Berdasarkan tabel 1 capaian realisasi triwulan I bantuan calon induk unggul dan benih ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat sebanyak 19.788.280 ekor atau 119,39% dari target triwulan I sebanyak 16.499.763 ekor realisasi anggaran sebesar Rp. 2.358.412.945 dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah benih ikan udang yang disalurkan sebanyak 18.799.080 ekor atau 121,53% dari target triwulan I sebanyak 15.468.719 ekor, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.549.623.203,-
- Jumlah benih ikan air payau yang disalurkan sebanyak 985.000 ekor atau 95,81% dari target triwulan I sebanyak 1.028.044 ekor, realisasi anggaran sebesar Rp. 351.483.212,-
- Jumlah calon induk unggul udang yang disalurkan sebanyak 4.200 ekor atau 140% dari target triwulan I sebanyak 3.000 ekor, realisasi anggaran sebesar Rp. 457.306.530,-
- Jumlah calon induk unggul ikan air payau belum ada realisasi masih dalam proses persiapan media pemeliharaan.

Tabel 4. Capaian IKU Jumlah Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/ Udang yang disalurkan ke Masyarakat

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/ Udang yang disalurkan ke Masyarakat (ekor)						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2026	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
16.499.763	19.788.280	119,39%	6.130.000	322,81	110.788.898	17,89

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian sampai dengan periode 30 Maret 2026 sebanyak 19.788.280 ekor atau dari target Tahun 2026 sebesar 16.499.763 jika dipresentasikan realisasi sebesar 119,39% dari pada target yang ditentukan. Jika di bandingkan dengan Triwulan I 2025 maka Realisasi Triwulan I 2026 lebih tinggi

Penerima manfaat Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang Disalurkan ke Masyarakat sebanyak 53 (lima puluh tiga) kelompok UPR/HSRT yang tersebar di 2 (dua) Provinsi yaitu: Sulawesi Selatan dan Aceh, dan 8 (delapan) Kab/Kota yaitu: Takalar, Makasar, Pangkep, Gowa, Pinrang, Sinjai, Jeneponto, Pidie Jaya dan Aceh Aceh tersaji pada tabel 5.

Tabel 5.Rekapitulasi Data Bantuan Benih Ikan Air Payau/Undang yang Disalurkan ke Masyarakat Triwulan I Tahun 2026

Komoditas	Ukuran (cm)	Jumlah (Realisasi)	Satuan	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Kab/Kota	Provinsi	Nomor BAST	Tanggal BAST	Link Dokumen BAST	Satker Pelaksana	SK Penerima	Tanggal Distribusi
Bandeng	3 cm	250.000	Ekor	Mawar	Abd Majid	Takalar	Sulawesi Selatan	B.309/BPBAPT.PB.140/II/2026	22 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCEs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	22 Januari 2026
Bandeng	4 cm	150.000	Ekor	Panabuccu	Labahang Gessa	Takalar	Sulawesi Selatan	B.310/BPBAPT.PB.140/II/2026	22 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCEs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	22 Januari 2026
Windu	PL 10	800.000	Ekor	Kampung Vaname dan Nila	Machmud tunggal	Pangkep	Sulawesi Selatan	B.331/BPBAPT.PB.140/II/2026	25 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCEs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	25 Januari 2026
Windu	PL 10	600.000	Ekor	Sitalassi	Ibrahim M	Gowa	Sulawesi Selatan	B.332/BPBAPT.PB.140/II/2026	25 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCEs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	25 Januari 2026
Windu	PL 10	850.000	Ekor	Lapatongkang	Amri	Pinrang	Sulawesi Selatan	B.333/BPBAPT.PB.140/II/2026	25 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCEs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	25 Januari 2026
Windu	PL 10	650.000	Ekor	Samparaja	Askar	Pinrang	Sulawesi Selatan	B.334/BPBAPT.PB.140/II/2026	25 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCEs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	25 Januari 2026
Windu	PL 10	500.000	Ekor	Masarolebbi	Jufri	Pinrang	Sulawesi Selatan	B.356/BPBAPT.PB.140/II/2026	27 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCEs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	27 Januari 2026
Windu	PL 10	300.000	Ekor	Berkah Taipa	Rahman Adam	Takalar	Sulawesi Selatan	B.357/BPBAPT.PB.140/II/2026	27 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCEs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	27 Januari 2026
Windu	PL 10	500.000	Ekor	Campagaya Abadi	Takauddin	Takalar	Sulawesi Selatan	B.358/BPBAPT.PB.140/II/2026	27 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCEs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	27 Januari 2026
Windu	PL 10	1.200.000	Ekor	Lagoari 1	H. Ahmad Said	Sinjai	Sulawesi Selatan	B.414/BPBAPT.PB.140/II/2026	31 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCEs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	31 Januari 2026
Windu	PL 10	700.000	Ekor	Pasorongon 2	Ibrahim M	Pinrang	Sulawesi Selatan	B.432/BPBAPT.PB.140/II/2026	31 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCEs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	31 Januari 2026
Windu	PL 10	1.200.000	Ekor	Bunging Tanre II	Firman	sinjai	Sulawesi Selatan	B.524/BPBAPT.PB.140/II/2026	07 Februari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1BdTPXJEv-bb3Sn9BsmU90j-KKvUQ?usp=drive_link	BPBAP Takalar	B.459/BPBAPT.PB.140/II/2026	07 Februari 2026
Windu	PL 10	1.200.000	Ekor	Pasorongon	Mustafa	Pinrang	Sulawesi Selatan	B.525/BPBAPT.PB.140/II/2026	09 Februari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1BdTPXJEv-bb3Sn9BsmU90j-KKvUQ?usp=drive_link	BPBAP Takalar	B.459/BPBAPT.PB.140/II/2026	09 Februari 2026
Windu	PL 12	500.000	Ekor	Sipakainga	M.Nur. Dg. Rumpa	Pangkep	Sulawesi Selatan	B.530/BPBAPT.PB.140/II/2026	10 Februari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1BdTPXJEv-bb3Sn9BsmU90j-KKvUQ?usp=drive_link	BPBAP Takalar	B.459/BPBAPT.PB.140/II/2026	10 Februari 2026
Windu	PL 12	600.000	Ekor	Bangkala Mandiri	Zainal	Jeneponto	Sulawesi Selatan	B.531/BPBAPT.PB.140/II/2026	10 Februari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1BdTPXJEv-bb3Sn9BsmU90j-KKvUQ?usp=drive_link	BPBAP Takalar	B.459/BPBAPT.PB.140/II/2026	10 Februari 2026
Rajungan	1.5	100.000	Ekor	Nikarannuang	Herman Dg Tiro	Takalar	Sulawesi Selatan	B.608/BPBAPT.PB.140/II/2026	14 Februari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1BdTPXJEv-bb3Sn9BsmU90j-KKvUQ?usp=drive_link	BPBAP Takalar	B.459/BPBAPT.PB.140/II/2026	14 Februari 2026
Bandeng	3 cm	100.000	Ekor	Sejahterlah mandiri	Rahman	Gowa	Sulawesi Selatan	B.842 /BPAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1lbyn5ScWLCcNVgve4HUbnCEhHFz1OnDv?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026
Bandeng	3 cm	200.000	Ekor	Berkah Bormas	H. Ismail	Pangkep	Sulawesi Selatan	B.843/BPAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1lbyn5ScWLCcNVgve4HUbnCEhHFz1OnDv?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026
Nila	2 cm	100.000	Ekor	Sipakalebbi Jennae	Nabaruddin	Pangkep	Sulawesi Selatan	B.844/BPAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1lbyn5ScWLCcNVgve4HUbnCEhHFz1OnDv?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026
Nila	2 cm	15.000	Ekor	Bandeng Bira	H. Syarifuddin	Makasar	Sulawesi Selatan	B.8080/BPBAPT.PB.140/III/2026	04 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1lbyn5ScWLCcNVgve4HUbnCEhHFz1OnDv?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	04 Maret 2026
Bandeng	3 cm	100.000	Ekor	Sejahterlah mandiri	Rahman	Gowa	Sulawesi Selatan	B.842 /BPAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1lbyn5ScWLCcNVgve4HUbnCEhHFz1OnDv?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026
Bandeng	3 cm	200.000	Ekor	Berkah Bormas	H. Ismail	Pangkep	Sulawesi Selatan	B.843/BPAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1lbyn5ScWLCcNVgve4HUbnCEhHFz1OnDv?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026
Nila	2 cm	100.000	Ekor	Sipakalebbi Jennae	Nabaruddin	Pangkep	Sulawesi Selatan	B.844/BPAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1lbyn5ScWLCcNVgve4HUbnCEhHFz1OnDv?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026
Nila	2 cm	15.000	Ekor	Bandeng Bira	H. Syarifuddin	Makasar	Sulawesi Selatan	B.8080/BPBAPT.PB.140/III/2026	04 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1lbyn5ScWLCcNVgve4HUbnCEhHFz1OnDv?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	04 Maret 2026
Nila	2 cm	20.000	Ekor	Ponpes Al Markaz Al Islamy	Fadhullah Marzuki	Sinjai	Sulawesi Selatan	B.1077/BPAPT.PB.140/III/2026	17 Maret 2026		BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	17 Maret 2026
undang	PL 10	467.000	ekor	udep beusare	syamaun ismail	pidie jaya	aceh	334/BPBAP-UB/PB.131/II/2026	14 Februari 2026	https://drive.google.com/file/d/1uX3hnK-6VhsvCU8NHV7QZZHnXPaFqW/view?usp=drive_link	BPBAP UB	423/BPBAP-UB /PB.320/II/2026	14 Februari 2026
undang	PL 10	467.000	ekor	alue bagan	baidillah	pidie jaya	aceh	335/BPBAP-UB/PB.131/II/2026	14 Februari 2026	https://drive.google.com/file/d/1IWZaM0KuDV22WxtpCortH1AZL8qng6/view?usp=drive_link	BPBAP UB	423/BPBAP-UB /PB.320/II/2026	14 Februari 2026
undang	PL 10	467.000	ekor	kuala tari	jamaludin	pidie jaya	aceh	336/BPBAP-UB/PB.131/II/2026	14 Februari 2026	https://drive.google.com/file/d/1aCnK1/Sssh8heeXbtS0e0wuaA8ZOD4cd/view?usp=drive_link	BPBAP UB	423/BPBAP-UB /PB.320/II/2026	14 Februari 2026
undang	PL 10	802.940	ekor	makmu jaya	ilhamudi	aceh utara	aceh	525/BPBAP-UB/PB.131/II/2026	9 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/14FayYI-YRQQAUK1JZLGFZfJcxoTRBUQg	BPBAP UB	618/BPBAP-UB /PB.320/III/2026	9 Maret 2026
undang	PL 10	595.140	ekor	Camar Laut	M. Daod	Pidie Jaya	Aceh	545/BPBAP-UB/PB.131/II/2026	11 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/14FayYI-YRQQAUK1JZLGFZfJcxoTRBUQg	BPBAP UB	618/BPBAP-UB /PB.320/III/2026	11 Maret 2026

IKU 2. Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Udang dan atau Ikan Konsumsi yang di produksi UPT (Unit)

Kualitas induk mempengaruhi kualitas benih yang dihasilkan dan berdampak pada keberhasilan kegiatan budidaya secara keseluruhan. Induk yang baik adalah induk yang dihasilkan dari proses seleksi induk yang jelas sehingga secara ketertelusuran dapat dipertanggung jawabkan asal usul dari induk tersebut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan induk unggul. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi induk menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi tersebut.

Target Indikator Kinerja Calon Induk Unggul/Benih/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang Diproduksi UPT Tahun 2026 ditetapkan sebanyak 88.818.868 ekor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 124.836.816.000,- yang diproduksi oleh UPT lingkup DJPB yaitu BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BPBAP Ujung Batee, BPBAP Takalar, BLUPPB Karawang dan BPIU2K Karangasem. Capaian realisasi sebanyak 4.528.717 ekor atau 5,10%, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.622.073.264,- atau 3,70% dari target tahun 2026 sesuai dengan tabel 6.

Tabel 6. Calon Induk Unggul/Benih/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang Diproduksi UPT Tahun 2026

Output Kegiatan	Target	Pagu	Target (ekor)	Capaian Realisasi		Jumlah		UPT Pelaksana
			Tw I	Tw I		ekor	anggaran	
				ekor	anggaran			
Calin/Benih/Udang dan atau ikan konsumsi air payau yang Diproduksi UPT	88.818.868	124.836.816.000	3.362.000	4.528.717	4.622.073.264	4.528.717	4.622.073.264	
Jumlah Benih Ikan Air Payau yang Diproduksi	32.339.991	6.424.302.000	34.000	156.000	58.383.968	156.000	58.383.968	P01, P02, P03, P04, TP01
Jumlah Benih Ikan Udang yang Diproduksi UPT	52.450.560	1.480.351.000	3.300.000	4.342.000	67.867.933	4.342.000	67.867.933	P01, P02, P03, P04, PL01
Jumlah Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi	4.042	275.628.000	-	-	21.514.000	-	21.514.000	P01, P03, P04
Jumlah Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi UPT	141.198	6.092.811.000	3.000	3.213	2.114.680.417	3.213	2.114.680.417	P01, P03, P04, PL01
Produksi Ikan Konsumsi Ikan Air Payau	3.883.077	110.563.724.000	25.000	27.504	2.359.626.946	27.504	2.359.626.946	P01, P02, TP01

Keterangan:

P : Payau
 PL : Payau Laut
 TP : Tawar Payau
 P01 : BBPAP Jepara
 P02 : BPBAP Situbondo
 P03 : BPBAP Ujung Batee
 P04 : BPBAP Takalar
 PL01 : BPJUK Karangasem
 TP01 : BLUPPB Karawang

Berdasarkan tabel 1 capaian realisasi triwulan I jumlah calon induk unggul/benih/udang dan atau ikan konsumsi air payau yang diproduksi UPT sebanyak 4.528.717 ekor atau 134,70% dari target triwulan I sebanyak 3.362.000 ekor realisasi anggaran sebesar Rp. 4.622.073.264,- dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah benih ikan air payau yang diproduksi sebanyak 156.00 ekor atau 458,82% dari target triwulan I sebanyak 34.000 ekor, realisasi anggaran sebesar Rp. 58.383.968,-
- Jumlah benih ikan udang yang diproduksi sebanyak 4.342.000 ekor atau 131,58% dari target triwulan I sebanyak 3.300.000 ekor, realisasi anggaran sebesar Rp. 67.867.933,-
- Jumlah calon induk unggul ikan air payau belum ada realisasi masih dalam proses persiapan media pemeliharaan.
- Jumlah calon induk unggul udang diproduksi sebanyak 3.213 ekor atau 107,10% dari target triwulan I sebanyak 3.000 ekor, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.114.680.417,-
- Jumlah produksi ikan konsumsi ikan air payau sebanyak 27.503,83 kg atau 107,10% dari target triwulan I sebanyak 25.000 kg, realisasi anggaran sebesar Rp.

2.359.626.946,- .

Tabel 7. Capaian IKU Jumlah Bantuan Calon Induk Unggul/Benih/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang Diproduksi UPT Tahun 2026

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Calon Induk Unggul/Benih/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang Diproduksi UPT						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2026	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
3.362.000	4.528.717	134,70%	-	-	88.818.868	24,46

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian sampai dengan periode 30 Maret 2026 sebanyak 4.528.717 ekor atau dari target TW I Tahun 2026 sebesar 3.362.000 jika dipresentasikan realisasi sebesar 134,70% dari pada target yang ditentukan.

IKU 3. Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang di produksi untuk operasional UPT (Kg)

Implementasi program ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen mewujudkan misi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran pada poin 2 (dua) yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kesadaran masyarakat dunia akan kesehatan dan keamanan pangan yang semakin meningkat, menuntut seluruh pihak terkait dengan produksi pangan harus mengutamakan jaminan mutu (quality assurance) dan keamanan pangan (food safety) baik untuk produk ekspor maupun konsumsi domestik. Menyikapi hal tersebut, melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, antara lain mengamanatkan bahwa dalam usaha pembudidayaan ikan harus menerapkan cara berbudidaya yang baik dan benar. Untuk itu, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang baik ditetapkan kriteria dan standar yang harus

dilakukan oleh pembudidaya dalam pemeliharaan ikan, termasuk dalam penggunaan pakan ikan. .

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) khususnya yang bergerak di perikanan budidaya air payau, melakukan pemantauan produksi pakan ikan pada unit pakan mandiri yang ada di UPT dalam rangka menjamin ketersediaan pakan ikan pada masing-masing UPT sesuai dengan kegiatan budidaya dan daerah distribusinya. Untuk tahun 2026, DJPB telah menetapkan target produksi untuk unit pakan mandiri yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pada masing-masing UPT Ikan Air Payau.

Capaian indikator kinerja “Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT (Unit)” pada Tahun 2026 diperoleh dari 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yaitu : (i) BPBAP Ujung Batee, (ii) BBPBAP Jepara, (iii) BBPBL Lampung, dan (iv) BPBAP Takalar.

Sedangkan target di tahun 2026 ini untuk : UPT BPBAP Ujung Batee (3.448 kilogram), BBPBA Jepara (85.564 kilogram), BPBAP Takalar (10.193 kilogram), dan BBPBL Lampung (6.211 kilogram). Adapun realisasi sebanyak 170 kilogram atau sebesar 0,16% dari target yang telah disesuaikan sebagaimana ditampilkan pada tabel 8 berikut :

Tabel 8. Target dan Realisasi Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang di produksi untuk operasional UPT (Kg)

No	Nama UPT DJPB	Target Produksi (Kg)	Realisasi hingga Maret (Kg)	Prosentase (%)	Keterangan
1	BBPBAP Jepara	85.564	-	0%	Bahan baku proses pengadaan
2	BBPBL Lampung	6.211	-	0%	Bahan baku proses pengadaan
3	BPBAP Takalar	10.193	170	2%	Produksi menggunakan sisa bahan baku dari Tahun Anggaran sebelumnya
4	BPBAP Ujung Batee	3.448	-	0%	Kendala kerusakan mesin
Total		105.416	170	0,16%	

Realisasi capaian produksi pakan ikan pada unit produksi pakan mandiri DJPB, khususnya untuk ikan air payau sampai akhir bulan maret Tahun 2026 secara total dari 4 UPT adalah sebesar 170 kg dari target kumulatif tahunan 105.416 sebesar 0,16 %. Adapun Capaian IKU Sampel Pakan dan obat Ikan Air Payau yang diuji oleh UPT dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini

Tabel 9. Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang di produksi untuk operasional UPT (Kg)

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT(Unit)						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2026	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
105.416	170	0,16	-	-	105.41	0,16

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 untuk IK ini adalah sebesar 105.416 kg dan Realisasi yang diperoleh sebesar 170 kg dengan capaian sebesar 0,16 % . Sehubungan dengan capaian indikator kinerja di atas, secara akumulatif belum mencapai target yang optimal. Hal ini karena adanya kendala pengadaan bahan baku yang masih proses pengadaan dan mesin produksi dalam proses perbaikan.

IKU 4. Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau (sampel)

Indikator kinerja ini merupakan jumlah sampel nutrisi pakan, sampel obat, dan sampel mutu pakan ikan air payau yang diuji oleh UPT pelaksana. Pengujian nutrisi pakan ikan meliputi parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. Sedangkan pengujian mutu pakan ikan yaitu pengujian kontaminan pakan yang terdiri atas kontaminan logam berat (Pb, Cd, dan HG), antibiotik (nitrofurantoin, kloramfenikol, oksitetrasiklin), mikotoksin (aflatoksin) dan melamin

Pengujian sampel obat ikan adalah proses untuk menilai kualitas (mutu) obat ikan yang beredar yang dilakukan di laboratorium dan hasilnya dibandingkan dengan mutu obat ikan tersebut pada saat didaftarkan. Sedangkan pengujian lapangan adalah uji

yang dilakukan untuk membuktikan khasiat (eficacy) dan keamanan (safety) obat ikan pada ikan target pada kondisi sebenarnya dengan skala tertentu sesuai dengan indikasi yang tercantum pada etiket atau label.

Sampel yang diuji di laboratorium UPT DJPB sebagai capaian indikator kinerja berasal dari sampel internal (sampel hasil kegiatan monitoring baik di lingkungan balai maupun ke pembudidaya) dan eksternal (pembudidaya mengirimkan sampel ke laboratorium dan pemantauan Direktorat Prasarana dan Sarana).

Capaian indikator kinerja “Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji oleh UPT” pada Tahun 2026 diperoleh dari 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), yaitu : (i).BBPBAP Jepara, (ii) BPBAP Situbondo; dan (iii) BLUPBB Kerawang. Target sampel pakan dan obat ikan air payau yang diuji oleh UPT untuk Tahun 2026 adalah 188 Sampel dengan pembagian sebanyak 71 sampel di BBPBAP Jepara, 108 sampel di BPBAP Situbondo, dan 9 sampel di BLUPPB Karawang.

Adapun capaian indikator kinerja “Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji” sampai bulan Maret (Triwulan I) Tahun 2026 telah terealisasi sebanyak **123 sampel** atau **65,42% dari** target yang ditetapkan sebagaimana ditampilkan pada Tabel10 di bawah ini :

Tabel 10. Target dan realisasi sampel I Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji”

No	Nama UPT DJPB	Target Sampel	Realisasi Sampel	Persen Capaian (%)
1	BBPBAP Jepara	71	35	49
2	BPBAP Situbondo	108	87	81
3	BLUPPB Karawang	9	1	11
Total		188	123	65,42

Realisasi capaian Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji oleh UPT untuk ikan air payau sampai akhir bulan maret Tahun 2026 secara total dari 3 UPT adalah sebesar 123 sampel dari target kumulatif tahunan 188 sampel atau sebesar 65,42 %. Adapun Capaian IKU Sampel Pakan dan obat Ikan Air Payau yang diuji oleh UPT dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang diuji oleh UPT)

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT(Unit)						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2026	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
188	123	65,45	-	-	123	65,42

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 untuk IK ini adalah sebesar 188 dan Realisasi yang diperoleh sebesar 123 dengan capaian sebesar 65,45 % . Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Karena baru dilaksanakan pada tahun ini. Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji oleh UPT” pada periode Triwulan I Tahun 2026 telah menunjukkan capaian yang cukup optimal dari target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar pakan yang diuji telah memenuhi aspek nutrisi dan keamanan yang Diuji oleh UPT mutunya.

IKU 5. Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (sampel)

Target indikator kinerja jumlah sampel Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel) Tahun 2026 ditetapkan sebanyak 9.235 sampel. Ruang lingkup layanan sampel yang menjadi capaian dari Indikator Kinerja tersebut berasal dari pengujian: 1) Kualitas Air, 2) Mikrobiologi (tidak termasuk sampel AMR), 3) Patologi, 4) Biomolekuler dan 5) Residu.

Sumber data perolehan capaian indikator ini berasal dari 7 (tujuh) UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yaitu : BBPBAP Ujung Batee, BPKIL Serang, BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BLUPBB Karawang, BPBAP Takalar, dan BPIU2K

Karangasem. Rincian target sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel) dapat dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13 berikut ini.

Tabel 12. Target Sampel Per Ruang Lingkup Pengujian Tahun 2026

No	Ruang Lingkup Pengujian	Jumlah Sampel
1	Kualitas Air	5.933
2	Mikrobiologi (diluar AMR)	1.399
3	Patologi	434
4	Biomolekuler	1.393
5	Residu	76
	Total Sampel	9.235

Tabel 13. Target Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel) Tahun 2026

No	Nama UPT Ditjen Perikanan Budi Daya	Target (Sampel)					
		Kualitas Air	Mikrobiologi	Patologi	Biologi Molekuler	Residu	Total
1	BPBAP Ujung Batee	120	30	-	50	-	200
2	BPKIL Serang	1.700	200	120	120	50	2.190
3	BBPBAP Jepara	1.000	288	272	240	10	1.810
4	BPBAP Situbondo	950	291	22	403	8	1.674
5	BLUPBB Karawang	1.550	450	-	485	-	2.485
6	BPBAP Takalar	466	87	20	95	8	676
7	BPIU2K Karangasem	147	53	-	-	-	200
	Total	5.933	1.399	434	1.393	76	9.235

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja di 7 (tujuh) UPT DJPB pada Triwulan I diperoleh realisasi sebanyak 4.991 sampel atau 54,04% dari target tahunan. Target tahunan dan realisasi di 7 (tujuh) UPT DJPB dapat dilihat pada Tabel 14. berikut ini

Tabel 14. Target dan Realisasi “Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel)” Triwulan I Tahun 2026

No	Nama UPT DJPB	Target Sampel	Realisasi hingga Triwulan I	Prosentase (%)
1	BPBAP Ujung Batee	200	199	99,50
2	BPKIL Serang	2.190	1.508	68,86
3	BBPBAP Jepara	1.810	526	29,06
4	BPBAP Situbondo	1.674	1.119	66,85
5	BLUPBB Karawang	2.485	790	31,79
6	BPBAP Takalar	676	743	109,91
7	BPIU2K Karangasem	200	106	53,00
Total		9.235	4.991	54,04

Ruang lingkup pengujian di laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan lingkup UPT DJPB antara lain kualitas air, mikrobiologi, patologi, residu dan biologi molekuler. Namun masing-masing UPT DJPB memiliki ruang lingkup pengujian yang berbeda sesuai dengan kapasitas laboratorium yang tersedia. Capaian Triwulan I untuk masing-masing ruang lingkup dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Capaian “Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel)” Triwulan I Tahun 2026

No	Nama UPT Ditjen Perikanan Budi Daya	Realisasi (Sampel) Hingga Triwulan I					
		Kualitas Air	Mikrobiologi	Patologi	Biologi Molekuler	Residu	Total
1	BPBAP Ujung Batee	112	50	-	37	-	199
2	BPKIL Serang	844	254	335	16	59	1.508
3	BBPBAP Jepara	214	92	62	155	3	526
4	BPBAP Situbondo	416	380	34	250	39	1.119
5	BLUPBB Karawang	638	68	-	84	-	790
6	BPBAP Takalar	371	233	7	126	6	743
7	BPIU2K Karangasem	80	26	-	-	-	106
Total		2.675	1.103	438	668	107	4.991

Tabel 16. Capaian “Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel) “ berdasarkan ruang lingkup pengujian Triwulan I Tahun 2026

No	Ruang Lingkup Pengujian	Target Sampel (Tahunan)	Realisasi Triwulan I	Prosentase (%)
1	Kualitas Air	5.933	2.675	45,09
2	Mikrobiologi	1.399	1.103	78,84
3	Patologi	434	438	100,92
4	Biologi Molekuler	1.393	668	47,95
5	Residu	76	107	140,79
Total		9.235	4.991	54,04

Berdasarkan data capaian Triwulan I, maka realisasi Indikator Kinerja Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel) telah tercapai sebesar 54,04% dibandingkan dengan target tahunan. Sampel yang diuji di laboratorium UPT DJPB sebagai capaian indikator kinerja ini berasal dari sampel internal (sampel hasil kegiatan monitoring baik di lingkungan UPT maupun ke pembudidaya) dan eksternal (pembudidaya mengirimkan sampel ke laboratorium).

Realisasi sampel ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan oleh UPT paling tinggi terdapat di BPBAP Takalar dengan capaian prosentase sebesar 109,91% dengan ruang lingkup sampel kualitas air yang paling banyak diuji sejumlah 371 sampel. Sedangkan capaian terendah berada di laboratorium BBPBAP Jepara yaitu sebesar 29,06%. Selanjutnya, capaian indikator kinerja berdasarkan ruang lingkup pengujian sampel menunjukkan bahwa pemeriksaan residu menempati perolehan tertinggi yaitu 140,79% dari target tahunan yang ditetapkan, sedangkan pengujian kualitas air menempati perolehan terendah yaitu 45,09%.

Pagu penganggaran kegiatan pengujian sampel ikan air payau yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT di 7 (tujuh) UPT DJPB bidang air payau senilai Rp 3.587.622.000 dengan realisasi Rp 142.208.509 atau 4,67%. Adapun capaian IKU Sampel Ikan Air Payau yang diuji dalam rangka Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2026	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
9.235	4.991	54,04	-	-	9.235	54,04

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 untuk IK ini adalah sebesar 9.235 dan Realisasi yang diperoleh sebesar 4.991 dengan capaian sebesar 54,04 % . Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Karena baru dilaksanakan pada tahun ini.

IKU 6. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Ikan Air Payau (rekomendasi kebijakan)

Indikator Kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau merupakan kegiatan penyusunan Norma, Kriteria, Standar dan Prosedur (NSPK) bidang budi daya ikan air payau. Rekomendasi kebijakan ini sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintah dikarenakan untuk berkembangnya perikanan budi daya di Indonesia khususnya budi daya ikan air payau maka dibutuhkan suatu input sarana dan prasarana produksi yang memadai dalam rangka menunjang peningkatan produksi budi daya dalam hal ini adalah penyusunan NSPK untuk mendukung tata kelola bidang produksi dan usaha budidaya. Dalam pengertian singkatnya, norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan dalam penyelenggaraan pemerintah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau pada Triwulan I 2026 dihasilkan sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan yaitu Penyusunan Profil Budi Daya Ikan Air Payau, dan hasil penyusunan 17 (tujuh belas) Profil budidaya ikan air payau yang kami lampirkan dalam link google

drive<https://bit.ly/PosterPiguraDIAP>,

sebagai berikut:

1. Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang
2. Budidaya Udang Berbasis Kawasang (BUBK) Kebumen
3. Modeling Budidaya Kepiting Pasuruan
4. Integrated Shrimp Farming (ISF) Waingapu Sumba Timur
5. Revitalisasi Tambak Pantura
6. Data Produksi Budidaya Air Payau 2021-2024
7. Profil Komoditas Udang Vaname
8. Profil Komoditas Udang Windu
9. Profil Komoditas Bandeng
10. Profil Komoditas Kepiting
11. Profil Komoditas Nila Salin
12. Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)
13. Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
14. Peta Sebaran Penyakit Udang 2025
15. Luas Lahan Budi Daya Ikan Air Payau
16. Sarana Budidaya Air Payau
17. Data Ekspor Impor Air Payau

Adapun capaian IKU Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 18. Capain IKU Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2026	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
3	1	33,33	-	-	3	33,33

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 Untuk indicator kinerja ini adalah 5 rekomendasi kebijakan dan realisasi diperoleh sebanyak 1 rekomendasi kebijakan dengan capaian 33,33 %. Pada

indicator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan TW I tahun lalu karena belum dilaksanakan pada TW I tahun lalu.

IKU 7. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)

Kegiatan monitoring penyakit ikan dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya wabah di kawasan perikanan budidaya yang berpotensi mengancam pencapaian target produksi dan menghambat kelancaran perdagangan produk perikanan budidaya di dunia internasional. Pada tahun sebelumnya, kegiatan ini dilaksanakan di 34 Provinsi dengan dukungan anggaran Tugas Pembantuan. Namun pada Tahun 2026, kegiatan ini didelegasikan di 4 (empat) UPT DJPB, antara lain BPBAP Ujung Batee, BPBAP Takalar, BPIUUK Karangasem, dan BPKIL Serang, dengan target sampel monitoring ikan air payau yang diuji sebanyak 255 sampel. Capaian IKK tersebut, hasil pengukurannya baru diketahui akhir tahun.

Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji merupakan sampel aktif dan sampel pasif dan selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium sesuai dengan gejala penyakit yang ditemukan. Sampel yang diambil tidak hanya terkait dengan komoditas ikan saja namun juga meliputi pakan, air dan sedimen yang merupakan media pembawa penyakit ikan air payau. Jenis penyakit ikan yang dimonitoring sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Jenis Penyakit Ikan Yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan. Perkembangan capaian sampel yang telah diperoleh hingga Triwulan I sebanyak 125 atau mencapai 49,02% dari target tahunan dengan jenis patogen yang ditemukan hasil uji positif, antara lain: WSSV, AHPND, EHP dan Vibriosis. Rincian target dan realisasi sampel Triwulan I dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 19. Target dan Realisasi Sampel Monitoring Penyakit Ikan Triwulan I Tahun 2026

No	UPT DJPB	Target Sampel		Realisasi	Persentase	
		Tahunan	Triwulan I		Tahunan	Triwulan I
1	BPBAP Ujung Batee	60	12	12	20	100
2	BPBAP Takalar	60	10	17	28,33	170

No	UPT DJPB	Target Sampel		Realisasi	Persentase	
		Tahunan	Triwulan I		Tahunan	Triwulan I
3	BPIUUK Karangasem	60	12	70	116,67	583
4	BPKIL Serang	75	20	26	34,67	34,67
	Total	255	54	125	49,02	231,48

Tabel 20. Capaian IKU Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
255	125	231,48	-	-	4973	231,48

Kendala dalam pencapaian indikator kinerja “Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)” pada Triwulan I Tahun 2026, diantaranya: (i) terdapat perubahan rencana UPT yang awalnya monitoring dilakukan secara aktif namun dengan adanya pemotongan anggaran berubah menjadi monitoring aktif dan monitoring pasif dan (ii) kekeliruan pendataan sampel yang diinput di dalam Software Sistem Monitoring Penyakit Ikan (SSMPI).

Sehubungan dengan hal diatas, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi data sampel monitoring penyakit ikan dengan UPT DJPB terkait sehingga kegiatan monitoring penyakit ikan dapat dicapai secara optimal.

Anggaran yang dialokasikan dalam rangka capaian Indikator Kinerja Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji sebesar Rp 313.089.000 dengan realisasi anggaran Rp 103.935.094 atau 33,20%.

IKU 8. Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau (Sampel)

Indikator kinerja mengenai *Antimicrobial Resistance* (AMR) merupakan pelaksanaan mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengendalian Resistensi Antimikroba Pada Perikanan Budidaya. Resistensi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan.

Capaian Indikator Surveilans AMR dengan cara mengukur jumlah sampel ikan yang dilakukan pengujian resistensi antibiotik untuk mengetahui tingkat resistensi bakteri akibat penggunaan antibiotik. Antimikroba yang menjadi target pengujian AMR dari golongan antibiotik yang diperbolehkan di perikanan budidaya untuk pengobatan penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteri gram negatif, yaitu: enrofloxacin, oksitetrasiklin dan tetrasiklin. Bakteri patogen yang menjadi target pengujian AMR merupakan jenis bakteri gram negatif, yaitu: 1) *Aeromonas hydrophila*, 2) *Vibrio alginolyticus*, 3) *Vibrio parahaemolyticus* dan 4) *Escherichia coli*. Secara rinci bakteri yang dijadikan target pada pengujian AMR dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 21. Sasaran Bakteri dan Jenis Komoditas dalam Pengujian AMR

No	Bakteri	Komoditas/Sampel
1	<i>Aeromonas hydrophila</i>	Lele, Nila, Patin, Nila Salin
2	<i>Vibrio alginolyticus</i>	Kerapu, Kakap, Bawal, Kuwe
3	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	Udang
4	<i>Escherichia coli</i>	Air budidaya

Kegiatan Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau dilaksanakan di 7 (tujuh) UPT – Ditjen Perikanan Budi Daya dengan target total tahunan yang ditetapkan sebanyak 536 sampel. Berikut capaian Indikator Kinerja “Sampel

Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau (Sampel)” Triwulan I Tahun 2026.

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja “Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau (Sampel)” Triwulan I Tahun 2026

No	UPT DJPB	Target Sampel Total	Komoditas	Target Sampel	Realisasi TW I	Isolat
1	BBPBAP Jepara	78	Udang	39	9	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
			Air	39	13	<i>Escherichia coli</i>
2	BPBAP Situbondo	73	Udang	73	48	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
3	BPBAP Ujung Batee	25	Udang	25	12	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
4	BPBAP Takalar	61	Udang	61	14	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
5	BLUPBB Karawang	224	Udang	80	2	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
			Nila salin	100	22	<i>Aeromonas hydrophila</i>
			Air	44	0	<i>Escherichia coli</i>
6	BPIU2K Karangasem	25	Udang	25	16	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
7	BPKIL Serang	50	Udang	30	8	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
			Air payau	20	8	<i>Escherichia coli</i>
Total		536		536	152	

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sampel yang telah diambil oleh 7 (tujuh) UPT DJPB bidang air payau telah terealisasi sebesar 28,36% atau 152 sampel dari target tahunan 536. Adapun capaian IKU Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau.

Tabel 23. Capaian IKU Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
536	152	28,36	-	-	151	-

Dari table bahwa capaian pada TW I 2026 ini tidak bisa di bandingkan dengan TW I 2025 karena belum ada capaian pada TW I 2025 dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir semester.

Selanjutnya terkait dengan sampel yang telah diambil, maka sampel tersebut akan dilakukan identifikasi bakteri guna mendapatkan isolat bakteri target. Apabila hasil identifikasi bakteri ditemukan bakteri target, maka pengujian dilanjutkan ke pengujian AMR dengan menggunakan metode *Antimicrobial Sensitivity Test* (AST). Metode AST ini bertujuan untuk mengetahui bakteri target masuk ke dalam golongan **intermediate, sensitif atau resisten** terhadap antibiotik.

Pagu anggaran kegiatan surveilan AMR di 7 (tujuh) UPT DJPB bidang air payau sebesar Rp 354.269.000 yang hingga Triwulan I terealisasi sebesar Rp 25.685.420 atau 7,25%.

IKU 9. Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)

Indikator kinerja sampel monitoring residu ikan air payau yang diuji (sampel) merupakan jumlah sampel residu ikan air payau yang dimonitor pada unit pembesaran di 4 (empat) Provinsi dengan target 480 sampel. Pelaksana monitoring residu terdapat di BPKIL Serang, BPBAP Takalar, BPBAP Situbondo, dan BBPBAP Jepara. Pengujian sampel dilakukan di Laboratorium milik Pemerintah (UPT-Ditjen Perikanan Budi Daya) dengan substansi uji yang dimonitor sebagai berikut:

- A2 (golongan obat ikan yang dilarang), meliputi parameter: Chloramphenicol, metabolit nitrofurantoin (AOZ, AMOZ, SEM, AHD) dan Dimetridazole;
- B1a (golongan obat ikan yang diperbolehkan), meliputi parameter: Tetrasiklin, Oksitetrasiklin, Klortetrasiklin, Sulfonamida, Enrofloxacin dan Eritromisin;
- D2 (logam berat): Pb, Cd dan Hg. Berikut rincian target dan realisasi monitoring residu ikan air payau yang diuji (sampel).

Rincian capaian sampel di masing-masing UPT DJPB dapat dilihat pada Tabel 24 berikut:

Tabel 24. Target Indikator Kinerja “Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)” Triwulan I Tahun 2026

No	UPT DJPB	Komoditas	Target Tahunan	Realisasi Triwulan I	Persentase (%)
1	BBPBAP Jepara	Udang	80	4	5
2	BPBAP Situbondo	Udang	60	30	50
		Nila	8	5	62,5
		Lele	12	4	33,33
3	BPBAP Takalar	Udang	120	6	5
		Nila	20	0	0
		Lele	20	0	0
4	BPKIL Serang	Udang	40	0	0
		Nila	60	0	0
		Lele	60	3	5
Total			480	52	10,83

Capaian Indikator Kinerja “Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)” pada Triwulan I Tahun 2026 baru tercapai 10,83% dari target tahunan. Masih rendahnya capaian sampel monitoring residu disebabkan, antara lain tidak tersedianya sampel residu yang memenuhi kriteria sampel (20 hari sebelum panen) serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka upaya yang perlu dilakukan pada triwulan berikutnya yaitu segera melakukan pengambilan sampel ketika umur udang/ikan telah memenuhi kriteria sampel dan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk mendukung ketercapaian pengambilan sampel. Adapun capaian itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 25. Capaian IKU Sampel Surveilan Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Surveilan Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
52	480	10,83	-	-	250	-

Dari table bahwa capaian pada TW I 2026 ini tidak bisa di bandingkan dengan TW I 2025 karena belum ada capaian pada TW I 2025 dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir semester.

Pagu penganggaran kegiatan monitoring residu ikan air payau yang diuji di 4 (empat) UPT DJPB bidang air payau senilai Rp 778.601.000 dengan realisasi Rp 253.413.199 atau 32,55%.

IKU 10. Infrastruktur Budi Daya Udang yang ditingkatkan (Unit)

Indonesia sebagai produsen udang terbesar dunia dengan pangsa pasar global dan pasar ekspor di dunia berkesempatan untuk bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) dalam rangka meningkatkan produktivitas udang nasional.

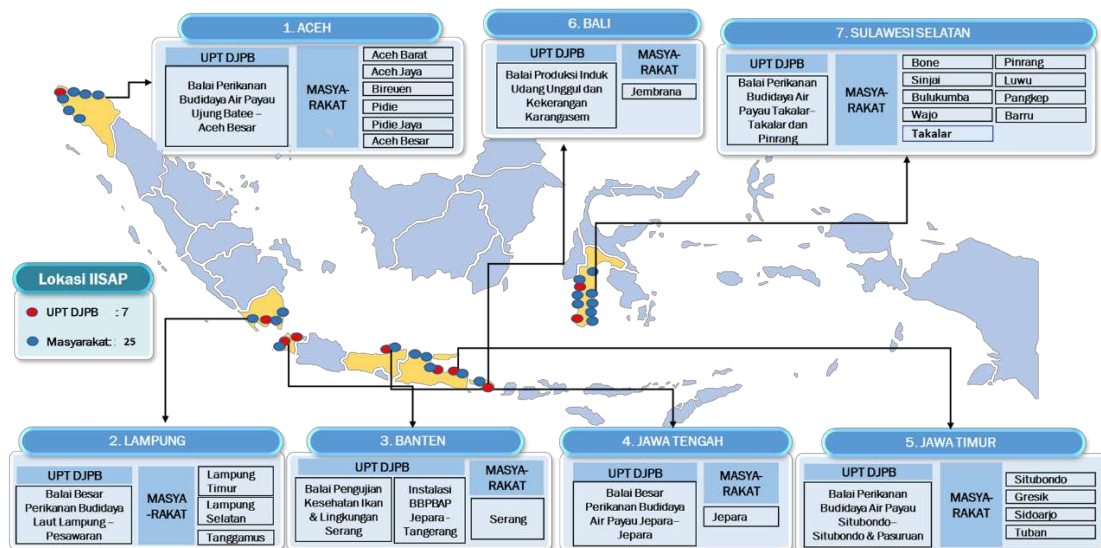
Untuk mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas budidaya udang yang terintegrasi, berkelanjutan dan ramah lingkungan maka diperlukan beberapa upaya seperti pembangunan pusat produksi induk dan benih (broodstock center), Pembangunan laboratorium kesehatan ikan, pembangunan tambak di lahan UPT Ditjen Perikanan Bud Daya KKP, Pembangunan tambak udang berbasis Kawasan dan Pembangunan tambak udang di masyarakat.

Peningkatan produksi udang dilakukan melalui Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP) dengan harapan kuantitas dan kualitas udang nasional semakin meningkat di pasar global. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan perikanan budi daya, diperlukan penyampaian capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2026.

Proyek *Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture* (IISAP) dirancang untuk menghasilkan 3 output. Output-output ini merefleksikan strategi implementasi proyek yang tidak saja memperkuat infrastruktur Unit Pelaksana Teknis DJPB sebagai ujung tombak pembangunan perikanan budidaya air payau tetapi juga menyentuh akar rumput masyarakat pembudidaya udang skala kecil sebagai pelaku usaha, dari perbaikan infrastruktur budidaya udang hingga penguatan Sumber daya manusianya.

Tujuan dan Sasaran IISAP adalah meningkatkan produktivitas, profitabilitas, dan kelestarian lingkungan dari budi daya udang. IISAP akan membantu KKP dalam memperkenalkan budidaya udang yang ramah lingkungan serta meningkatkan transparansi, ketelusuran, dan proses pelaporan menuju peningkatan produktivitas, kualitas, dan profitabilitas tambak udang skala kecil di 7 provinsi (25 kabupaten) pada Kawasan tambak seluas 5.260 hektar. IISAP juga akan menghasilkan investasi terintegrasi yang menangani proses produksi dari hulu ke hilir melalui infrastruktur, dukungan untuk meningkatkan praktik budidaya dan sistem pasca panen, dan penguatan rantai nilai.

IISAP dibiayai melalui Pinjaman dan Hibah dengan total nilai US\$ 96 juta. Nilai Pinjaman sebesar US\$ 93 Juta berasal dari *Asian Development Bank* (ADB) dan hibah US\$ 3 Juta berasal dari *Global Environment Facility* (GEF). Project ini direncanakan untuk mendanai kegiatan yang akan berlangsung selama 5 (lima) tahun mulai pada tahun 2023 hingga tahun 2027.



Gambar 1. Lokasi Proyek Peningkatan Infrastruktur Budi Daya Udang

Pada Bulan Maret progress pembangunan IISAP antara lain:

- Pembangunan Broodstock Center udang di BPIU2K Karangasem dan Multiplication Broodstock Center di BPBAP Ujung Batee dan BPBAP Takalar yang mengacu pada basic desain yang dibuat oleh Hawaii Pacific University Ocean

Institute (HPU-OI) telah selesai dan saat ini sedang tahap Lelang untuk pekerjaan konstruksi.

- Konstruksi laboratorium akan dilakukan di 7 UPT DJPB, yaitu BPBAP Ujung Batee, BBPBL Lampung, BPKIL Serang, BBPBAP Jepara, BP2IUK Karangasem, BPBAP Takalar, BPBAP Situbondo. Penyiapan DED Pembangunan Laboratorium oleh konsultan telah diselesaikan pada bulan Mei 2025 namun karena pembangunan laboratorium menjadi satu paket lelang konstruksi dengan broodstock center maka saat ini juga masih pada tahap Lelang. Target pelaksanaan konstruksi dan pengadaan peralatan laboratorium adalah bulan Maret–September 2026 dan operasional laboratorium dapat dilakukan pada bulan Oktober 2026.
- Penyusunan DED Klaster tambak masyarakat sejumlah 11 unit di 9 Kabupaten @ 5 hektar dan saluran tambak masyarakat telah selesai dilaksanakan pada tahun 2025 di 13 Kabupaten sepanjang 302,24 km, yang meliputi saluran primer, sekunder dan tersier, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel 5. Pembangunan klaster dan normalisasi saluran tambak masyarakat, saat ini pada tahap finalisasi dokumen Lelang.

Tabel 26. Klaster dan Saluran Tambak Masyarakat

Provinsi	Kabupaten	Klaster Tambak (unit)	Saluran Primer (m)	Saluran Sekunder (m)	Saluran Tersier (m)	Total (m)
Aceh	Aceh Besar	1	0	710	0	710
	Aceh Utara	0	3.267	2.780	0	6.050
	Pidie Jaya	1	0	19.720	16.440	36/170
	Bireuen	1	0	11.720	13.240	25.060
	Pidie	0	0	4.170	19.060	23.240
Lampung	Lampung Selatan	2	7.250	6.580	19.000	32.840
	Lampung Timur	1	11.597	29.390	20.540	67.780
Bali	Jembrana	0	3.430	6.810	3.540	13.780
Sulawesi Selatan	Pinrang	0	0	1.520	5.670	7.190
	Bone	2	0	11.340	12.780	24.130
	Sinjai	1	0	6.790	3.700	10.490
	Wajo	1	0	9.380	6.580	15.960
	Bulukumba	1	0	920	6.330	7.250

Jumlah	11	25.454	111.843	109.160	270.630
--------	----	--------	---------	---------	---------

Pekerjaan Pembangunan Kolam Tambak



Pekerjaan Tandon



Pekerjaan Saluran Outlet



Pekerjaan Bangunan Oxygen House



Tabel 3. Capaian IKU Infrastruktur Budi Daya Udang yang ditingkatkan (Unit)

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Infrastruktur Budi Daya Udang yang ditingkatkan (Unit)						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW IV 2026 Thdp TW IV 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
7	-	-	-	-	7	

Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan 1 tahun sebelumnya juga belum ada capaian atau target yang ditentukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir semester atau sistem perhitungan semesteran. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 11. Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya air (CBIB dan CPIB) (unit usaha)

Direktorat teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) diwajibkan untuk melakukan pembinaan teknis terhadap unit pembenihan, unit pembesaran, unit produksi pakan, unit produksi obat ikan dan unit distribusi obat ikan. Sebab, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan tugas dan fungsi dalam kelembagaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fungsi sertifikasi dialihkan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHKP).

Dalam upaya meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor perikanan budidaya nasional, penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) merupakan langkah penting untuk menjamin kualitas produk, keamanan pangan, serta praktik budidaya yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

Lingkup Pembinaan Penerapan CBIB dan CPIB yaitu pembinaan pelaku usaha pembesaran dan pembenihan sehingga siap disertifikasi penerapan CBIB dan CPIB, mencakup aspek sanitasi, pakan, benih, obat, serta lingkungan, untuk memastikan jaminan mutu, keamanan pangan, dan kesejahteraan pembudidaya.

Capaian triwulan I 2026, pelaksanaan pembinaan CBIB dan CPIB diperoleh realisasi sebanyak 8 unit dari target 380 unit dan persentase realisas adalah 2,1 %. Adapun capaian Iku Usaha yang dilakukan pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya air payau (unit) adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Unit Usaha Budi Daya Ikan Air Payau yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya air (CBIB dan CPIB) (unit usaha)

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya air (CBIB dan CPIB) (unit usaha)						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW IV 202 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
380	8	2,1	-	-	270	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 untuk IK ini adalah sebesar 380 unit dan terealisasi 8 unit dengan persentase capaian 2,1 %. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian TW I tahun lalu dikarena belum ada capaian .

Melalui kegiatan Asistensi Perizinan Dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) dari Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) terdapat unit usaha pembesaran dengan komoditas ikan air payau terdapat 8 pembudidaya, dengan rincian sebagai berikut dapat dilihat pada table 29.

Tabel 29. Nama Unit Usaha pembesaran dengan komoditas ikan air payau

No	Nama Lengkap	Alamat (Ds, Kec, Kab, Prov)	Nomor Telepon	Nama Unit Usaha	Alamat Unit Usaha	Komoditas	Luas Area	Produksi (kg/tahun)
1	Budi Setiawan	Jalan P. Kunom Nyaho No 4 Palangka Raya	82154881359	Tambak Udang Shrimp Estate Kalteng	Jalan raya Kuala Jelai Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara	Udang vannamei	40 Hektar	300.000 Kg
2	Nuhamad luthfi arpizal	Sukamara kalimantan tengah	81227011469	Muhamad lurhfi aprizal tambak udang	Sungai damar	Udang vannamei	2.5 ha kolam budidaya	100000

3	Deden wigustianto	Desa sungai tabuk,kecamatan pantai lunci,kabupaten sukamara provinsi kalimantan tengah	85386306630	PT.SUKAMARA AQUATIC FARM	Desa Sungai Tabuk Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah	Udang vannamei	5 hektar	–
4	Sigmund Qory Andreas	Sei Damar, Kec. Lunci, Kab. Sukamara, Kalteng	8112712792	Pokdakan Maju Jaya Bersama	Sei Damar, Kec. Lunci, Kab. Sukamara, Kalteng	Udang vannamei	6000 M2	39 ton
5	Yessy Lestia Tandaya	Sampit Kalimantan Tengah	8176976038	AGUA BORNEO CENTRA	Ujung Pandaran	Udang vannamei	-	-
6	Ahmad Fachruddin	Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	08525000053p	Tanjung Selaka Farm	Desa Sungai Damar	Udang vannamei	2 Ha	60 Ton
7	Siswanto	Desa pasir panjang blok A.1, kecamatan Arut Selatan kabupaten Kotawaringin Barat provinsi Kalimantan tengah	82253594830	Siswanto	Desa cabang barat,dan desa sungai damar kecamatan pantai lunci,kabupaten silukamara provinsi Kalimantan tengah	Udang vannamei	Di desa cabang barat 3,9 h di desa sungai damar 10 h	Di desa cabang barat 50000kg per tahun di sungai damar blum produksi
8	Windu Subagio	Kelurahan Mendawai kec Sukamara Kab. Sukamara	81349270118	Cv. Karya Lautan Mandiri	Desa sungai Tabuk Kec PantaiLunci kab. Sukamara	Udang vannamei	8 ha	120 ton

IKU 12. Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun (Unit)

Budi daya Udang Terintegrasi (*Integrated Shrimp Farming*) merupakan modelling kawasan tambak udang terintegrasi yang dilakukan secara ramah lingkungan dengan menerapkan *good aquaculture practices* dari hulu sampai dengan hilir dalam satu pengelolaan, dimana pada setiap proses yang dilakukan akan menerapkan prinsip *eco-efficiency* dan mengedepankan pelestarian sumberdaya alam, pengendalian dampak kerusakan lingkungan hidup, serta melibatkan masyarakat setempat sebagai aktor utama pertumbuhan ekonomi.

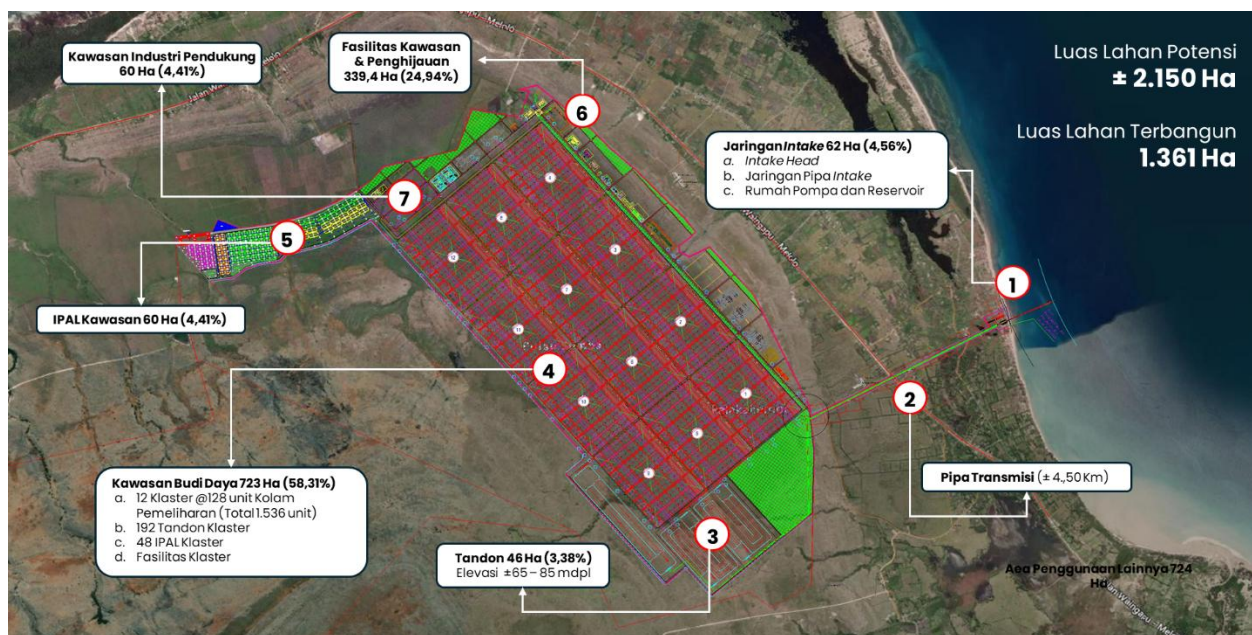
Tujuan dibangunnya Budidaya Udang Terintegrasi (*Integrated Shrimp Farming*) adalah untuk meningkatkan: 1) penerimaan devisa negara; 2) penerimaan pajak; 3) Peningkatan PNBP 4) penciptaan tenaga kerja; dan 5) kesejahteraan petambak (NTPi) dan masyarakat.

Kegiatan Budidaya Udang Terintegrasi (*Integrated Shrimp Farming*) akan dilaksanakan di Ds. Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab Sumba Timur, NTT dengan luas lahan pembangunan sebesar 2.085 Ha.

Pembangunan Budi Daya Udang Terintegrasi (*Integrated Shrimp Farming*) direncanakan akan dilaksanakan mulai dari tahun 2025 hingga 2027. Apabila diasumsikan keberlangsungan hidup sebesar 80% dengan padat tebar 225 ekor/m², dan ukuran panen 20 gram/ekor, maka pada tahun 2027 diharapkan akan dapat menghasilkan produksi sebesar 52.800 ton udang per /tahun, dengan Nilai produksi sebesar Rp. 3,96 triliun/tahun, dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 4.730 orang (hulu – hilir). Selain itu kegiatan ini diharapkan akan memberikan multiplier effect bagi masyarakat lokal, serta diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.

Pembangunan Budi Daya Udang Terintegrasi (*Integrated Shrimp Farming*) akan terbagi menjadi 3 (tiga) Zona yaitu: a) Zona Hulu (hatchery dan pabrik pakan); b) Zona Onfarm (saluran intake, tandon utama, tandon kluster, petak pemeliharaan, saluran outlet, IPAL Kluster dan vegetasi), selain itu juga akan dibangun berbagai fasilitas umum, yaitu kantor utama, laboratorium kesehatan ikan, perumahan, rumah ibadah, klinik, kantin, sarana olahraga, dan area penghijauan, c) Zona hilir (*coldstorage*, pabrik es, dan pabrik *Styrofoam*).

Investasi beberapa pihak swasta akan dilibatkan dalam pembangunan zona 1 (hatchery dan pabrik pakan) dan Zona 3 (pabrik es, pabrik *styrofoam* dan *cold storage*).
Disain Layout



Tabel 30. Capaian IKU Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun (Unit)

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun (Unit)						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi T I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
1	-		-	-	-	-

Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan 1 tahun sebelumnya juga belum ada Iku Budidaya Udang Terintegrasi -ISF yang dibangun (Unit) .Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU13. Klaster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan yang di bangun (unit).

Indikator ini merupakan kegiatan Pengembangan klaster komoditas unggulan ikan air payau berbasis Kawasan, klaster yang akan dikembangkan adalah kawasan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) di Eks. TIR Karawang. Pengembangan klaster merupakan pengembangan dari kegiatan pembangunan BINS tahap 1 yang telah dilakukan pada tahun 2023 - 2025. Pengukuran capaian dilakukan tahunan dengan target 1 unit.

Kegiatan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang pada periode Triwulan I Januari hingga Maret 2026, terdapat beberapa kegiatan BINS Karawang sebagai berikut:

1. Penyelesaian Konstruksi BINS Karawang

Penyedia Konstruksi Rancang dan Bangun BINS Karawang belum menyelesaikan pekerjaannya hingga kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2026. Berdasarkan hasil Reviu Itjen atas cut-off pekerjaan BINS Karawang, progres fisik terealisasi **94,053%**, sehingga terdapat sisa pekerjaan yang belum selesai sebesar **5,947%**.

Tindak lanjutnya adalah PPK memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi hingga 18 Februari 2026 melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), dengan pengenaan denda per hari sebesar 1/1000 dari sisa pekerjaan 5,947%.

Adapun pekerjaan yang harus diselesaikan oleh penyedia pada masa pemberian kesempatan adalah: Automatic Feeder 44 unit; Pemasangan geomembran di Blok I dan Blok J; Pekerjaan saluran tersier di Blok I dan Blok J; Pengadaan dan pemasangan pipa dan aksesoris; Pembagi air saluran sekunder; Penyangga pipa pompa tandon ke bak bagi tersier; Pengadaan dan pemasangan panel kincir + aksesoris; Panel pompa kolam; Pekerjaan akses paving blok di Rumah Genset Rumah jaga tambak dan gudang; Rumah jaga operator; Jalan produksi sirtu; Akses paving blok di bangunan pendukung; dan Pekerjaan menara pandang.

Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan fisik 100% pada tanggal 3 Februari 2026, melalui Berita Acara Serah Terima/Provisional Hand Over (PHO) Nomor 570/DJPB.3/BINS/II/2026. Setelah PHO, penyedia melaksanakan pemeliharaan konstruksi selama 365 hari kalender, yaitu 4 Februari 2026 s/d 3 Februari 2027.

2. Audit BPK terhadap Pekerjaan Konstruksi BINS Karawang

Pada Januari - Februari 2026, Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap Pekerjaan Konstruksi BINS Karawang, sebagai berikut:

- a. Audit fisik: Memeriksa kesesuaian antara RAB yang tercantum dalam kontrak, gambar as-build drawing, dan fakta hasil pekerjaan di lapangan, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- b. Audit Administrasi: Memeriksa kelengkapan dokumen, antara lain dokumen lelang/tender, dokumen KPJ, dokumen perancangan, dokumen kontrak dan adendumnya, RAB, dokumen MC-0 dan MC-100, back up quantity, back-up quality, justifikasi teknis, laporan bulanan, laporan akhir, gambar, foto dokumentasi pekerjaan, dokumen pembayaran termin, dokumen serah terima hasil pekerjaan, dan dokumen reviu itjen.

Pihak PPK, Konsultan MK, dan Penyedia telah mendampingi proses audit fisik di lokasi proyek dan melengkapi semua kelengkapan dokumen administrasi.

3. Persiapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) untuk Objek Vital Nasional (Obvitnas) BINS Karawang

BINS Karawang telah ditetapkan menjadi Objek Vital Nasional (Obvitnas) melalui Kepmen KP Nomor 92 Tahun 2025. Tujuan penetapan BINS Karawang sebagai Obvitnas adalah melindungi aset-aset strategis negara yang dikelola BLUPPB Karawang dari berbagai ancaman. Dengan demikian, BLUPPB Karawang dapat memastikan kegiatan operasional tambak berlangsung lancar, kondusif, aman.

Adapun urgensi BLUPPB Karawang menjadi Obvitnas adalah adanya ancaman keamanan wilayah akibat luasnya kawasan lahan budi daya, kerentanan infrastruktur dan bencana akibat degradasi kualitas lahan tambak, dan perlunya koordinasi lintas sektor untuk pengamanan aset strategis negara.

Sehubungan dengan tujuan dan urgensi di atas, maka pada 5 Februari 2026 DJPB mengundang Tim Auditor Obvitnas dari internal KKP untuk meninjau kondisi lapangan dan membahas persiapan penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di kawasan BINS Karawang.

Tim Auditor menjelaskan 5 elemen penilaian SMP:

- a. Komitmen dan Kebijakan (18 kriteria): Terdapat dokumen kebijakan pengamanan yang ditetapkan oleh pimpinan Obvitnas sesuai dengan perkiraan ancaman
- b. Pola Pengamanan (49 kriteria): Bentuk, sifat, sasaran, area, dan komando/pengendalian pengamanan
- c. Konfigurasi pengamanan (31 kriteria): Komponen standar pengamanan (manusia dan infrastruktur); Penetapan dan pembinaan area pengamanan; Rencana umum pengamanan; Jumlah anggota pengamanan.
- d. Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan (10 kriteria), baik anggota pengamanan internal maupun anggota pengamanan Polri
- e. Monitoring dan Evaluasi (10 kriteria): Terdapat prosedur dan mekanisme pemantauan dan pengukuran yang berkaitan dengan kinerja pengamanan; Terdapat catatan hasil pemantauan pelaksanaan SMP.

Rencana pentahapan pasca penetapan Obvitnas:

- a. Identifikasi dan pemetaan: Profil, lay out, incident response plan (IRP), penentuan zonasi pengamanan, rencana pengamanan.
- b. Workshop Penyusunan Dokumen Pendukung SMP Obvitnas
- c. Koordinasi antar instansi dalam rangka penguatan sistem pengamanan.
- d. Pengembangan infrastruktur pendukung keamanan dan pelayanan
- e. Audit Internal SMP Obvitnas
- f. Penyusunan Pedoman Kerja Teknis (PKT) dengan Polri dan Polda
- g. Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas oleh Polri, dalam bentuk BinteK, Audit, Klarifikasi, Sertifikat.

Diskusi dengan Tim Auditor Obvitnas:

- a. Setelah kunjungan lapang, diidentifikasi beberapa titik rawan keamanan:
 - Intake air laut: Potensi pencemaran di tandon utama dan saluran pasok
 - Intake air tawar: Potensi pencemaran dan keamanan karena langsung berbatasan dengan sawah dan tidak ada pagar pembatas dengan lahan masyarakat
 - Tambak: Potensi keamanan/pencurian karena kawasan terbuka, rawan pencemaran yang menurunkan kualitas air
 - Akses jalan utama: Masyarakat bebas masuk dan keluar melewati jalan tanpa adanya satpam dan portal di setiap ujung jalan.
- b. Jika DJPB ingin menerapkan SMP Obvitnas, maka diperlukan dukungan kebijakan dan penyediaan anggaran yang lumayan besar untuk membenahi sarana, prasarana, dan kompetensi SDM pengamanan.
- c. Untuk kelanjutan proses menuju Sertifikasi SMP Obvitnas, perlu dibentuk tim khusus dari unsur DJPB Pusat dan BLUPPB Karawang yang mengawal persiapan lapangan dan melengkapi dokumen administratif yang dipersyaratkan.
- d. Estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp. 650 juta, terdiri dari PNBP Polri untuk sertifikasi 300 juta; perjalanan dinas tim Polri dan tim Auditor 200 juta; Seremonial dan lain-lain 150 juta.

4. Kunjungan Wakil Menteri KP dan Tindak Lanjutnya

Pada tanggal 25 Februari 2026, Bapak Wakil Menteri KP berkunjung ke BLUPPB Karawang untuk meninjau hasil pembangunan konstruksi dan non konstruksi BINS Karawang. Pihak PPK melaporkan bahwa konstruksi fisik sudah selesai 100% dan kolam produksi sudah dioperasikan, Begitupun dengan bangunan pendukung, sarana/peralatan, benih, dan pakan sudah dioperasikan.

Setelah kunjungan lapangan, Bapak Wamen menyampaikan ada 29 catatan yang harus segera dibenahi (lampiran 1). Adapun status tindak lanjut sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, sebagai berikut:

- a. Sebanyak 25 poin saat ini sedang dalam proses penyelesaian tindak lanjut.
- b. Sebanyak 4 poin memerlukan dukungan alokasi anggaran khusus, mengingat kegiatan dimaksud tidak termasuk dalam kontrak pekerjaan BINS tahun 2025. Untuk

itu, diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp15.983.680.000, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembangunan jalan produksi Blok G dan Blok H dengan konstruksi beton sepanjang 2,16 km, sebesar Rp5.482.080.000;
- b. Pembangunan jalan sub-produksi (akses ke automatic feeder) dengan konstruksi beton sebanyak 20 (dua puluh) jalur, sepanjang 6,8 km, sebesar Rp5.188.800.000;
- c. Pembuatan kantong parkir sebanyak 12 (dua belas) titik dengan konstruksi beton, seluas total 432 m², sebesar Rp712.800.000;
- d. Pengadaan mesin grading dan panen sebesar Rp4.600.000.000

5. Exit Meeting Jamintel – Kejagung

Pada tanggal 9 Maret 2026, Tim Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung berkunjung ke BLUPPB Karawang dalam rangka Exit Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk proyek BINS Karawang.

Tujuan Exit Meeting:

- a. Penyampaian progres final pembangunan BINS Karawang
- b. Diskusi langkah-langkah pengamanan atas Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT)
- c. Rekomendasi keberlanjutan operasional BINS Karawang
- d. Seremoni penyerahan Surat Pengakhiran PPS dan Plakat
- e. Monitoring Hasil Pembangunan

Langkah-langkah pengamanan AGHT oleh Tim PPS Jamintel yang meliputi:

- a. Pengamanan Personil yang terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dan pengawasan terhadap upaya yang dinilai dapat mempengaruhi integritas, obyektivitas, dan rasa aman personil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
- b. Pengamanan materiil dan/atau aset terhadap upaya yang dinilai dapat mempengaruhi dan menghambat serta menggagalkan proses pengadaan lahan dan/atau pemanfaatan aset negara
- c. Hambatan Birokrasi yaitu kendala terkait proses perijinan yang disebabkan karena kekosongan hukum, ketidakjelasan, tumpang tindih peraturan

perundang-undangan dan/atau adanya pungutan liar dalam proses pengurusan perijinan

Rekomendasi Jamintel untuk keberlanjutan operasional BINS Karawang:

- a. Lahan tambak belum dilengkapi dengan pagar pembatas. Akibatnya kawasan seluas ini sangat mudah untuk dimasuki atau diakses oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, sehingga terdapat potensi gangguan keamanan berupa pencurian peralatan dan hasil produksi budidaya. Oleh karena itu, perlu segera diusulkan untuk pembangunan pagar pembatas di sekeliling area tambak.
- b. Untuk sumber air tawar berasal dari aliran sungai yang berpotensi tercemar dari limbah masyarakat maupun pestisida dari areal pertanian yang ada di sekitar sungai.
- c. Terkait kondisi lingkungan di areal kolam, diperlukan: - Deteksi dini adanya limbah beracun yang masuk ke dalam kolam - Optimalisasi penyaringan air yang masuk ke dalam kolam - Pengujian laboratorium sampel air yang ada di kolam tandon sebelum dialirkan ke kolam tambak
- d. Dikarenakan tujuan BINS adalah untuk penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan pembudidaya, maka perlu memberdayakan masyarakat di sekitar area tambak agar bisa ikut berpartisipasi dan ikut merasakan manfaat dari pembangunan tambak BINS Karawang tersebut
- e. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset/material berupa sarana dan prasarana BINS Karawang tersebut, serta untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan dan operasionalnya, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pihak Ditjen Perikanan Budi Daya.
- f. Dalam rangka deteksi dini dan pencegahan terhadap adanya potensi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan spesifikasi teknis pekerjaan dan keuangan, maka perlu dilakukan audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Jenderal KKP.
- g. Kepada semua stakeholder BINS Karawang agar tidak terperangkap dengan praktik-praktik transaksional dalam pelaksanaan pembangunan dan tidak boleh

terbelenggu adanya AGHT yang timbul, baik yang sudah diprediksi sebelumnya maupun yang muncul saat pelaksanaan

6. Pemeliharaan Konstruksi BINS Karawang

Setelah Provisional Hand Over (PHO) tanggal 3 Februari 2026, Penyedia berkewajiban melaksanakan pemeliharaan selama 356 hari kalender tanpa tambahan biaya dari KKP. Dalam masa pemeliharaan ini, Tim Satgas BINS menemukan beberapa titik yang mengalami kerusakan sehingga pihak penyedia harus segera memperbaiki.

Adapun jenis pemeliharaannya antara lain:

- a. Perbaiki kolam (pematang longsor, pematang saluran outlet longsor, pematang IPAL longsor, HDPE menggelembung, lepas, sobek)
- b. Perbaiki lampu padam di Blok G2
- c. Perbaiki jalan paving di Blok E dan D
- d. Pemantapan dan perapihan jalan utama
- e. Pembuatan jalan menuju helipad
- f. Penghijauan (penanaman pohon)

7. Kegiatan Operasional BINS Karawang

Operasional BINS Karawang dilaksanakan dengan menganut prinsip *good aquaculture practices*, sebagai berikut:

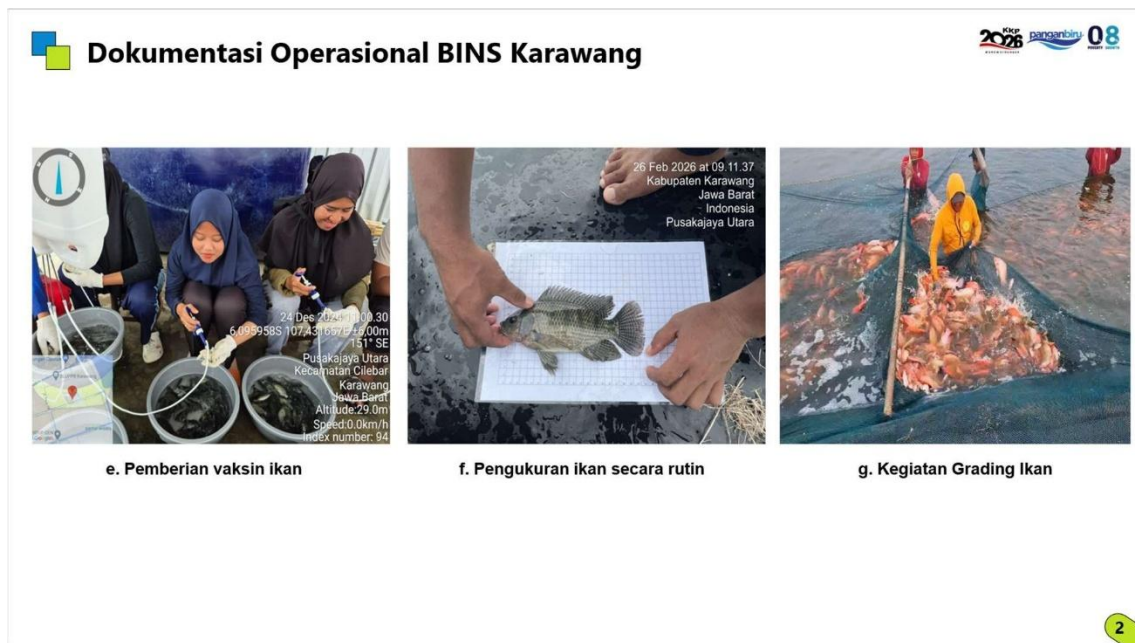
- a. Persiapan lahan (pengeringan tambak, pencucian tambak, penjemuran, disinfektan, pemasangan saringan inlet dan outlet, pemasukan air)
- b. Penebaran benih, dilakukan pada pagi dan sore hari untuk menghindari terjadinya stres pada ikan.
- c. Pemeliharaan di kolam, dengan memperhatikan ukuran tebar, padat tebar, pemberian pakan, pengendalian rasio FCR untuk efisiensi pakan, pengendalian *survival rate*, pengukuran besar ikan, dan grading ikan
- d. Manajemen kualitas air, melalui pengukuran salinitas, pH, oksigen terlarut (DO), tingkat amonia, dan kecerahan air

- e. Manajemen hama dan penyakit ikan, melalui pemasangan jaring diatas petakan tambak untuk menghalau burung, benih yang digunakan bebas virus, pemberian vaksin, dan menerapkan sistem *biosecurity*.

**Lampiran 1. Status Tindak Lanjut Kunjungan Wakil Menteri KP
ke Tambak Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang**

No.	Uraian	Proses Penyelesaian	Tambahan Anggaran
1	Pelebaran pos jaga dibersihkan	√	
2	Kanopi/cabang pohon di jalan dirapikan	√	
3	Batang pohon di area putih dirapikan	√	
4	Penanaman pohon di pinggir jalan (penghijauan)	√	
5	Pembuatan parkir di bahu jalan (tempat mobil panen)		√
6	Pembuatan penunjuk jalan	√	
7	Pembersihan lantai pompa air laut	√	
8	Pengecekan pompa air laut	√	
9	Pembersihan pipa air laut	√	
10	Pengerasan lantai di bawah pipa masuk ke tandon	√	
11	Pengaspalan jalan sebelum masuk kompleks BLUPPB Karawang	√	
12	Perapian kabel pompa	√	
13	Peninggian U-ditch setelah bak pembagi	√	
14	Pengerasan lantai di depan silo (automatic feeder)		√
15	Jalan sub-blok dirapikan	√	
16	Parkir VIP di depan menara pandang	√	
17	Tandon diisi Bandeng dari Pangkahwetan	√	
18	Perbaikan tanggul agar menggunakan cerucuk	√	
19	Mesin pemotong rumput diganti model dorong	√	
20	SOP Pemeliharaan Pompa	√	
21	Kebersihan dan kerapian pos jaga	√	
22	CCTV	√	
23	Kebersihan pintu air	√	
24	Penyusunan SOP pekerja	√	
25	Pembuatan petak percontohan	√	
26	Bangsai panen agar dibersihkan	√	
27	Perbaikan dan perapian jalan produksi Blok G dan Blok H		√
28	Pengadaan fish pump		√
29	Perbaikan Jalan utama	√	

Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Operasional BINS Karawang



IKU 14. Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang di bangun (Unit)

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, terdapat 78.550 Ha lahan tambak yang tidak produktif. Beberapa hal yang menjadi penyebab tidak produktifnya lahan tersebut antara lain: 1). budi daya masih dilakukan secara tradisional; 2). tidak adanya tandon (reservoir/penampungan air) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah hasil budi daya; dan 3). rentan terhadap serangan penyakit, sehingga produksi dan produktivitas lahan menjadi rendah yakni 0,6 Ton/Ha/Tahun.

Luas lahan budi daya air payau eksisting yang paling luas dimiliki oleh Kabupaten Indramayu dengan total luas 19.220,24 Ha dan memiliki luas lahan budi daya air payau yang sesuai RTRW paling besar sebesar 12.241,21 Ha. Pada sisi lain Kabupaten Bekasi menjadi wilayah yang memiliki persentase luas lahan budi daya yang tidak sesuai RTRW sebesar 99,19%.

Selama periode bulan Maret Tim Kerja Kawasan Budi Daya Ikan Air Payau telah melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator kinerja Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang dibangun sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tata Batas

Pada periode Maret, Secara umum, progres pelaksanaan tata batas menunjukkan capaian sebagai berikut:

- Pengukuran Titik Batas: 87,55% (8.440 dari 9.640 titik)
- Pemasangan Pal Batas: 5,40% (521 dari 9.640 titik)
- Berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan tata batas sampai dengan 10 Maret 2026, capaian kinerja menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan pada indikator pengukuran titik batas dengan tingkat capaian sebesar 87,55%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar tahapan awal kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.
- Pada indikator pemasangan pal batas, capaian masih relatif rendah yaitu sebesar 5,40%, sehingga terdapat kesenjangan antara progres pengukuran dengan tahap lanjutan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses transisi dari pengukuran ke pemasangan fisik belum berjalan optimal.

2. Pelaksanaan Amdal

Pada bulan Maret dilakukan penyusunan dokumen KAK studi Analisis Dampak Lingkungan untuk revitalisasi Tambak Pantai utara Jawa Barat.

Penyusunan KAK ini merupakan tahapan awal yang strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan revitalisasi tambak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, serta meminimalkan potensi dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan masyarakat sekitar.

Progres penyusunan dokumen KAK AMDAL menunjukkan bahwa aspek perencanaan lingkungan telah mulai diintegrasikan dalam pelaksanaan program. Hal ini menjadi indikator positif terhadap komitmen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, tahapan ini masih berada pada fase awal sehingga memerlukan percepatan, mengingat dokumen AMDAL merupakan salah satu prasyarat penting sebelum pelaksanaan konstruksi secara penuh. Keterlambatan dalam penyusunan dan persetujuan dokumen lingkungan berpotensi menghambat tahapan kegiatan berikutnya, khususnya pada pekerjaan fisik.

Selain itu, kompleksitas wilayah Pantai Utara Jawa Barat yang mencakup beberapa kabupaten seperti Bekasi, Subang, dan Indramayu menuntut adanya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah yang intensif dalam penyusunan dokumen tersebut.

Tabel 31. Capaian IKU Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang di bangun (Unit)

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang di bangun (Unit)						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi T I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
4	-	-	-	-	-	-

Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada

periode Triwulan 1 tahun sebelumnya juga tidak ada Iku Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang di bangun (Unit) .Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

3.2.2 Sasaran Kegiatan (SK-2) : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Dit. Ikan Air Payau

IKU 15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit dan telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Ikan Air Payau yang menjadi objek pengawasan. Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Ikan Air Payau dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya. Adapaun Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau dapat di lihat dibawah ini.

Tabel 32. Data Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPB Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Direktorat Ikan Air Laut	88,24%
2	Direktorat Rumput Laut	92,31%
3	Direktorat Ikan Air Tawar	100,00%
4	Direktorat Ikan Air Payau	100,00%
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	97,46%
6	BBPBAP Jepara	97,46%
7	BBPBL Lampung	100,00%
8	BBPBAT Sukabumi	100,00%

9	BPBAP Situbondo	100,00%
10	BPBAP Takalar	97,46%
11	BPBAT Sungai Gelam	100,00%
12	BPBAT Mandiingin	97,46%
13	BPBL Batam	100,00%
14	BPBL Lombok	100,00%
15	BPBL Ambon	97,46%
16	BPBAP Ujung Batee	97,46%
17	BPBAT Tatelu	97,46%
18	BLUPPB Karawang	100,00%
19	BPIUUK Karangasem	97,46%
20	BPKIL Serang	100,00%

Tabel 33. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
86	100	116,27	92,86	107,68	85	101,17

Berdasarkan Tabel 50 di atas, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 untuk indikator kinerja ini adalah 86. Realisasi yang diperoleh adalah 100 dengan capaian nilai pada Triwulan I tahun 2025 sebanyak 116,27 %. Pada indikator kinerja manajerial ini, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025 pada periode yang sama, persentasenya diperoleh lebih tinggi.

IKU 16. Nilai PM SAKIP Satker Direktoratikan Air Payau

Evaluasi SAKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Adapun capaian Iku Sakip Dit Payau dapat dilihat pada tabel 34 di bawah ini.

Tabel 34. Capaian IKU Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
84,2	-	-	-	-	84	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target nilai yang ditetapkan tahun 2026 untuk indikator kinerja ini adalah 84,2. Pada indikator kinerja manajerial

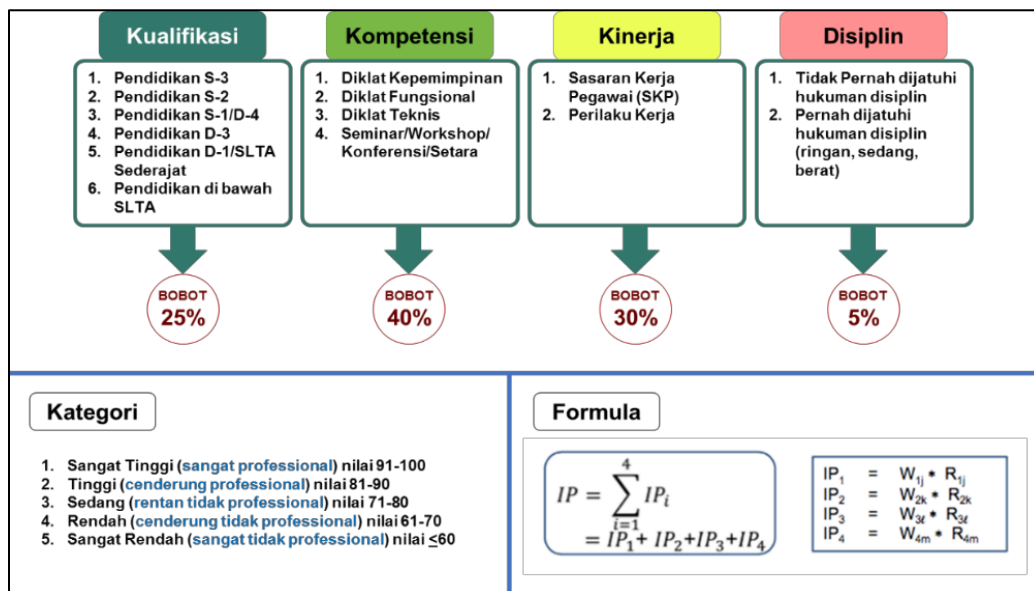
ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan 1 tahun lalu sebelumnya juga belum ada capaian dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir semester .

IKU 17. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air PAYau

Indikator kinerja ini adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/sejenis);
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.



Gambar 6. Matrik Perhitungan Indeks profesionalitas ASN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan kepada ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, diklat, seminar/workshop/magang, dan sejenisnya. Selain itu, didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik.

Pada tahun 2026 target IKU IP ASN sebesar 81,5. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kinerja IP ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau dapat dilihat pada tabel 35 di bawah ini.

Tabel 35 . Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
81,5	-	-	81	-	81	100,36

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target nilai yang ditetapkan tahun 2026 untuk indikator kinerja ini adalah 81,5. Pada indikator kinerja manajerial ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan 1 tahun lalu sebelumnya juga belum ada capaian dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir semester . Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam hal peningkatan nilai IP ASN dan memberikan informasi kepada pegawai untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai nilai yang ditentukan.

IKU 18. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut ini tabel capaian realisasi indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau kinerja pada periode Triwulan I tahun 2026:

Tabel 36 . Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Dit IA Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
81	-	-	-	-	70	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 untuk IK ini adalah sebesar 81 Pada indikator kinerja manajerial ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan 1 tahun lalu sebelumnya juga belum ada capaian dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun .

IKU 19. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau

Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan keperluan sehari-hari perkantoran. Indikator ini menjadi pendukung untuk mencapai kegiatan manajemen internal Dit. Ikan Air Payau berupa Kehadiran Pegawai, Pengelolaan SDM Aparatur, Persuratan, Kerumahtanggan dan Pengelolaan Keuangan. Kearsipan, operasional dan pemeliharaan kantor. Pada tahun 2026 target indikator kinerja ini yaitu 100

persen. Berikut adalah Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Rekap Persuratan pada Direktorat Ikan Air Payau Triwulan I Tahun 2026.

1. Kehadiran Pegawai

Jumlah pegawai Direktorat Ikan Air Payau pada Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 47 orang yang terdiri dari 35 orang ASN, 4 orang PPPK 2024, dan 7 orang PPPK 2025, 1 orang PPPK paruh waktu (pelantikan bulan Oktober 2025). Kehadiran pegawai dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang hadir dibandingkan dengan target kehadiran. Capaian kinerja kehadiran pegawai pada Direktorat Ikan Air Payau TW I tahun 2025 yaitu 113,45 % sesuai Tabel 37.

Tabel 37. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Direktorat Ikan Air Payau Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Target Kehadiran	Kehadiran			persentase Kehadiran (%)
				Kehadiran Kantor	Dinas Luar	Jumlah	
1	Direktur	1	56	18	37	55	100,1
2	Timja Kawasan Budi Daya Ikan Air Payau	9	504	394	142	536	94,02
3	Timja Induk dan Benih	8	448	293	78	371	120,75
4	Timja Pakan Ikan	6	280	241	22	263	106,46
5	Timja Produksi	6	336	246	56	302	111,25
6	Timja Kesehatan Ikan	7	392	311	7	318	123,27
7	Timja Dukungan Manajemen	9	504	341	26	367	137,32
Jumlah		47	2520	1884	368	2212	113,45

2. Pengelolaan SDM Aparatur

Pengelolaan SDM Aparatur merupakan pemenuhan dokumen kepegawaian untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tugas belajar/izin belajar, penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan pensiun sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

Capaian Kinerja Pengelolaan SDM Aparatur Direktorat Ikan Air Payau pada Triwulan I 2026 yaitu **100 %** terpenuhi

a. Kenaikan Gaji Berkala

Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Untuk Triwulan I tahun 2026 ada terdapat pegawai Direktorat Ikan Air Payau yang memenuhi persyaratan dan mendapatkan SK Kenaikan Gaji Berkala yaitu:

No	Nama	NIP	KGB
1	Drh.Christina Retna Handayani, M.Si.	196609051994032005	1 Maret 2026
2	Muhammad Lukrianto, SE.	198006102006041004	1 April 2026
3	Andi Rahman, S.Pi.	197812172007011001	1 April 2026
4	Daryati, A.Md.	197006261998032004	1 April 2026
5	Indra Gunawan Wibisono	197006261998032004	1 April 2026

b. Kenaikan Pangkat

Kenaikan Pangkat PNS adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara. Sampai dengan TW I tahun 2026, pegawai Direktorat Ikan Air Payau ada 2 orang yang diajukan sebagai berikut .:

No	Nama	Lama Gol/Pangkat	Lama Gol/Pangkat
1	Sri Handayani, S.Pi., M.Sc / 198509012010012040	Penata Tk.I/IIId	Pembina (IV/a)
2	Solehudin Abdul Gani, S.Pi / 197007272001121001	Pembina (IV/a)	Pembina Tingkat I (IV/b)

c. Penghargaan

Satyalencana Karya Satya (SLKS) adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada para PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan serta prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi

masyarakat. Satyalencana Karya Satya dibagi dalam tiga kelas, yaitu Satyalencana Karya Satya 10 Tahun, Satyalencana Karya Satya 20 Tahun, dan Satyalencana Karya Satya 30 Tahun. Pada TW I Direktorat Ikan Air Payau mengajukan 2 orang ASN yaitu

No	Nama / NIP	X Tahun
1.	Yudi Supeni,S.Pi.,M.M / 1975020620060410081	√
2.	Neneng Dahlia /198208162005022001	√

3. Persuratan

Jumlah surat masuk dan surat keluar pada Direktorat Ikan Air Payau pada Triwulan I tahun 2026 sebanyak 587 surat. Surat masuk sebanyak 497 surat yang terdiri dari Surat Dinas, Undangan dan Rekomendasi . Sedangkan surat keluar sebanyak 90 surat yang terdiri dari surat dinas, memorandum/nota dinas, undangan baik lingkup KKP maupun swasta. Semua surat masuk dan surat keluar telah tuntas terdistribusi, dengan capaian 100% terpenuhi. Rincian surat masuk dan surat keluar dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38. Rekap Persuratan pada Direktorat Ikan Air Payau Triwulan I Tahun 2026

No	Jenis/Surat Dokumen	Jumlah	Keterangan
A. Surat Masuk			
1.	Surat Masuk	372	Lingkup KKP, Dinas, Swasta
2.	Undangan Masuk	125	Lingkup KKP, Dinas, Swasta
	Jumlah A	497	
B. Surat Keluar			
1.	Surat Dinas Keluar	34	Lingkup KKP, Dinas, Swasta
2.	Memo Keluar	46	Lingkup Ditjen PB
3.	Surat Undangan	10	Lingkup KKP, Dinas, Swasta
	Jumlah B	90	
	Total A + B	587	

Dari uraian di atas, persentase capaian kinerja persuratan pada Direktorat Ikan Air Payau, Triwulan I tahun 2026 sebesar **100 %**

4. Layanan Kerumahtanggaan

Untuk mendukung terlaksananya seluruh program-program dan kegiatan

yang menunjang tugas pokok dan fungsi Direktorat Ikan Air Payau, diperlukan kegiatan koordinasi atau rapat di dalam kantor yang bertempat di ruang rapat Direktorat Ikan Air Payau Lantai 6 GMB IV. Peserta rapat berasal dari internal Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun eksternal KKP. Pada Triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan rapat sebanyak 10 kegiatan sesuai pada Tabel 39.

Tabel 39. Layanan Kegiatan Rapat pada Direktorat Ikan Air Payau TW I 2026

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	13 Januari 2026	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Residu Tahun 2026
2	23 Januari 2026	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Residu Tahun 2026
3	02 Februari 2026	Rapat Pembahasan Peta Kawasan Budidaya Ikan Air Payau propinsi Jawa Tengah
4	03 Februari 2026	Rapat Permohonan Audiensi terkait pencegahan Antibiotik dan Moitoring Residu pada Budidaya Udang
5	06 Februari 2026	Rapat Kegiatan Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan
6	10 Februari 2026	Rapat Permohonan Audiensi Dinas Perikanan Kota Bau Bau Sulawesi Selatan
7	06 Maret 2026	Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Penetapan Kawasan Perikanan Budidaya Air Payau
8	30 Maret 2026	Rapat Permohonan Audiensi P3UW Lampung

5. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Ikan Air Payau terdiri dari pertanggungjawaban Penggantian Uang Persediaan, Pembayaran LS Bendahara dan Pembayaran LS pihak ketiga. Pengelolaan Keuangan pada TW I sudah di laksanakan dengan rampung 100 %.

Perhitungan Persentase Layanan Perkantoran sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Layanan Perkantoran} &= \frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100}{5} \times 100\% \\
 &= 100
 \end{aligned}$$

Tabel 40. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
100	100	100	96,99	103,13	80	1

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %. Capaian Realisasi TW I pada indikator kegiatan Layanan Perkantoran adalah adalah 100 % Lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu (2025).

IKU 20. Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana, dan oleh siapa dilakukan. Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0, Probis Level 1, Probis Level 2, dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi dalam penyelesaian SOP, .KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Berikut

ini tabel capaian realisasi indikator kinerja Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau pada periode Triwulan I tahun 2026.

Tabel 41. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
100	-	-	-	-	65	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100. Pada indikator kinerja manajerial ini belum bisa dilaksanakan karena perhitungan dilakukan pada akhir tahun atau system perhitungan tahun .

BAB IV. PENUTUP

Direktorat Ikan Air Payau merupakan salah satu unit kerja Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautandan Perikanan Republik Indonesia, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budi daya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Ikan Air Payau berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dengan Direktur dan/atau Pelaksana Tugas Direktur Ikan Air Payau.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan I tahun 2026 telah menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperoleh selama periode Triwulan I tahun 2026. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja dalam Bab III, dari hasil analisis terhadap pencapaian kinerja Direktorat Ikan Air Payau sampai akhir periode Triwulan I tahun 2026 dari total 20 (dua puluh) indikator kinerja pendukung sasaran strategis, sejumlah 12 (dua belas) indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan bahkan melebihi target. Semoga di tahun mendatang akan semakin meningkat lagi .



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



**DIREKTORAT IKAN AIR PAYAU
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerja sama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Ikan Air Payau, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan I tahun 2026 ini dapat terlaksana dengan baik. LKj Direktorat Ikan Air Payau tahun 2026 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Direktorat Ikan Air Payau dalam periode tahun 2026.

Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur dan memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja bagi Direktorat Ikan Air Payau, serta menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan

Jakarta, 18 April 2026
Direktur Ikan Air Payau



Ditandatangani
Secara Elektronik

Fernando J. Simanjuntak, S.St.Pi., M.Pi.
NIP. 19780523 200212 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Ikan Air Payau Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja Direktorat Ikan Air Payau merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Perikanan Budi Daya Tahun 2026-2029 serta Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Ikan Air Payau tahun 2026 yang memuat indikator kinerja, target yang akan dicapai, realisasi kinerja, kendala/permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan indikator kinerja, dan rencana aksi sebagai bentuk rekomendasi yang akan dilaksanakan pada periode yang akan datang.

Direktorat Ikan Air Payau telah menetapkan peta strategis tahun 2026 dengan 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 (enam) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Sasaran kegiatan satker Direktorat Ikan Air Payau adalah sebagai berikut:

1. SK-1 : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau. Kegiatan ini memiliki 14 (empat belas) IKU, yaitu:
 - a) Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke Masyarakat (Ekor).
 - b) Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang diproduksi UPT (Unit) Ikan Konsumsi Ikan Air Payau yang Diproduksi oleh UPT (Kg).
 - c) Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT (Kg).
 - d) Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji oleh UPT (Sampel).
 - e) Sampel ikan air payau yang Diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan oleh UPT (Sampel).
 - f) Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau yang disusun (Rekomendasi Kebijakan).
 - g) Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel).
 - h) Sampel Surveilance Resistensi Antimikroba Ikan Air Payau (AMR) yang Diuji (Sampel).
 - i) Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel).
 - j) Infrastruktur Budi Daya Udang yang dibangun (Unit).

- k) Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau (Unit).
- l) Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun (Unit).
- m) Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan yang dibangun (Unit).
- n) Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang dibangun (Unit).

2. SK-2: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau. Kegiatan ini memiliki 6 (enam) IKM, yaitu:

- a) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 86 (Persen).
- b) Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 84,2 (Nilai)
- c) Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 81,5 (Indeks).
- d) Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 81 (Nilai).
- e) Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 100 (Persen)
- f) Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau 100 (Persen).

Berdasarkan 20 (dua puluh) indikator kinerja sebanyak 12 (dua belas) indikator kinerja telah dilakukan penghitungan capaian realisasi kegiatan dengan target yang telah ditentukan pada tahun 2026, adapun indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke masyarakat secara triwulanan dengan target Triwulan I yaitu 16.499.763 ekor dari target tahun 2026 sebanyak 110.788.280, dengan realisasi yang tercapai adalah 19.788.280 ekor, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan I.
2. Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Udang yang diproduksi UPT Pelaksana pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan I yaitu 3.362.000 ekor dari target tahun 2026 sebanyak 88.818.868 dengan realisasi yang tercapai adalah 4.528.717 ekor, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan I bahkan lebih dari target.

3. Pakan Ikan Air Payau yang Diproduksi untuk Operasional UPT pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan I yaitu 1.564 dari target tahun 2026 sebanyak 105.416, dengan realisasi yang tercapai adalah 170 belum mencapai target pada triwulan I.
4. Sampel Pakan dan Obat Ikan Payau yang diuji oleh UPT (sampel), pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan I yaitu 45 dari target tahun 2026 sebanyak 188, dengan realisasi yang tercapai adalah 123, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan bahkan melebihi target.
5. Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan, pengukuran indikator kinerja ini adalah Triwulan I , yaitu 2.301 target tahun 2026 sebanyak 9.235, dengan realisasi yang tercapai adalah 4.991, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan, bahkan melebihi target.
6. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Tahunan yaitu 3 Rekomendasi dengan realisasi yang tercapai adalah 1 Rekomendasi untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan
7. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji secara triwulanan dengan target Triwulan I yaitu 54 sampel dari target tahun 2026 sebanyak 255 dengan realisasi yang tercapai adalah 70 sampel , sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan I
8. Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau pengukuran indikator kinerja ini adalah Triwulan I yaitu 83 target tahun 2026 sebanyak 536, dengan realisasi yang tercapai adalah 152, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan bahkan melebihi target
9. Sampel monitoring Residu Ikan Air Payau yang diuji (sampel) secara triwulanan dengan target Triwulan I yaitu 65 sampel dari target tahun 2026 sebanyak 480 dengan realisasi yang tercapai adalah 52 sampel , sehingga capaian untuk indikator ini sudah belum mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan I
10. Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB), pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan

target tahun 2026 sebanyak 380, dengan realisasi yang tercapai adalah 8, sehingga capaian untuk indikator ini belum mencapai target .

11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan I 100 dari target tahun 2026 sebanyak 86 persen, dengan realisasi yang tercapai adalah 100 persen, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan pada Triwulan I
12. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara triwulanan dengan target Triwulan I yaitu 100 persen dari target tahun 2026 sebanyak 100 persen, dengan realisasi yang tercapai adalah 100 persen, sehingga capaian untuk indikator ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Triwulan I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR	VIII
BAB I. PENDAHULUAN	11
1.1. LATAR BELAKANG	11
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	13
1.3. TUJUAN DAN FUNGSI	13
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA	14
1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDI DAYA	17
1.5.1. <i>Potensi</i>	17
1.5.2. <i>Permasalahan</i>	18
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA	20
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	21
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2026 – 2029	21
2.2. SASARAN STRATEGIS	22
2.3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2026	24
2.4. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	29
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	31
3.2.1. <i>Sasaran Kegiatan (SK-1): Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau</i>	31
IKU 1. Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke masyarakat (Ekor)	31
IKU 2. Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Udang dan atau Ikan Konsumsi yang di produksi UPT (Unit)	36
IKU 3. Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang di produksi untuk operasional UPT (Kg)	38
IKU 4. Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau (sampel)	40
IKU 5. Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (sampel)	42
IKU 6. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Ikan Air Payau (rekomendasi kebijakan)	45
IKU 7. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)	47
IKU 8. Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau (Sampel)	49
IKU 9. Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)	51
IKU 10. Infrastruktur Budi Daya Udang yang ditingkatkan (Unit)	53

Nama Indikator : Infrastruktur Budi Daya Udang yang ditingkatkan (Unit)	56
IKU 11. Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya air (CBIB dan CPIB) (unit usaha)	56
IKU 12. Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun (Unit).....	59
IKU 13. Klaster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan yang di bangun (unit).....	61
IKU 14. Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang di bangun (Unit).....	70
3.2.2 Sasaran Kegiatan (SK-2) : <i>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Dit. Ikan Air Payau</i>	72
IKU 15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau.....	72
IKU 16. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau	73
IKU 17. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau	74
IKU 18. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau	77
IKU 19. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau	78
IKU 20. Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau	83
BAB IV. PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Ikan Air Payau	16
Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Payau Selama Periode Triwulan I Tahun 2026.....	29
Tabel 3. Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang Disalurkan ke Masyarakat Tahun 2026	33
Tabel 4. Capaian IKU Jumlah Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke Masyarakat.....	34
Tabel 5. Rekapitulasi Data Bantuan Benih Ikan Air Payau/Udang yang Disalurkan ke Masyarakat Triwulan I Tahun 2026	35
Tabel 6. Calon Induk Unggul/Benih/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang Diproduksi UPT Tahun 2026	36
Tabel 7. Capaian IKU Jumlah Bantuan Calon Induk Unggul/Benih/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang Diproduksi UPT Tahun 2026	37
Tabel 8 Target dan Realisasi Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang di produksi untuk operasional UPT (Kg).....	39
Tabel 9 Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang di produksi untuk operasional UPT (Kg)	39
Tabel 10. Target dan realisasi sampel I Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji	41
Tabel 11. Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang diuji oleh UPT	41
Tabel 12. Target Sampel Per Ruang Lingkup Pengujian Tahun 2026	42
Tabel 13. Target Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel) Tahun 2026	42
Tabel 14. Target dan Realisasi “Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel)” Triwulan I Tahun 2026	43
Tabel 15. Capaian “Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel) “ Triwulan I Tahun 2026.....	43
Tabel 16. Capaian “Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel) “ berdasarkan ruang lingkup pengujian Triwulan I Tahun 2026.....	44
Tabel 17. Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT	45
Tabel 18. Capaian IKU Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	46
Tabel 19. Target dan Realisasi Sampel Monitoring Penyakit Ikan Triwulan I Tahun 2026	48
Tabel 20. Capaian IKU Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji	48
Tabel 21. Sasaran Bakteri dan Jenis Komoditas dalam Pengujian AMR.....	49
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja “Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau (Sampel)” Triwulan I Tahun 2026	50
Tabel 23. Capaian IKU Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR)	50
Tabel 24. Target Indikator Kinerja “Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)” Triwulan I Tahun 2026	52
Tabel 25. Capaian IKU Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau	52
Tabel 26. Klaster dan Saluran Tambak Masyarakat.....	55
Tabel 27. Capaian IKU Infrastruktur Budi Daya Udang yang ditingkatkan (Unit)	56

Tabel 28. Unit Usaha Budi Daya Ikan Air Payau yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya air (CBIB dan CPIB) (unit usaha)	57
Tabel 29. Nama Unit Usaha pembesaran dengan komoditas ikan air payau	58
Tabel 30. Capaian IKU Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun (Unit)...	60
Tabel 31. Capaian IKU Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang di bangun (Unit)	71
Tabel 32. Data Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil	72
Tabel 33. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau ..	73
Tabel 34. Capaian IKU Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau	74
Tabel 35. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau	76
Tabel 36. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Dit IA Payau ..	78
Tabel 37. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Direktorat Ikan Air Payau Triwulan I Tahun 2026	79
Tabel 38. Rekapitulasi Persuratan pada Direktorat Ikan Air Payau Triwulan I Tahun 2026	81
Tabel 39. Layanan Kegiatan Rapat pada Direktorat Ikan Air Payau TW I 2026.....	82
Tabel 40. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau	83
Tabel 41. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Payau	15
Gambar 2. Keragaan jabatan di Direktorat Ikan Air Payau	16
Gambar 3. Luas Perikanan Budi Daya Eksisting Tahun 2020	17
Gambar 4. Hasil pengukuran kinerja sampai Triwulan I tahun 2026.....	28
Gambar 5. Lokasi Proyek Peningkatan Infrastruktur Budi Daya Udang	54
Gambar 6. rencana tata ruang untuk proyek Integrated Shrimp Farming (ISF)	60
Gambar 7. Matrik Perhitungan Indeks profesionalitas ASN.....	76

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang sangat besar. Peran penting kelautan dan perikanan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029. RPJMN merupakan penjabaran visi, misi dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang disusun berdasarkan RPJP Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024.

Rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memuat arah kebijakan, sasaran strategis, program dan kegiatan serta dukungan terhadap program prioritas nasional yang selaras dengan 8 (delapan) misi Asta Cita yang terdiri atas : (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan

birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2026 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan; (3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Dengan ditetapkannya arah dan kebijakan serta kegiatan pembangunan perikanan budi daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 2 (dua) perspektif dengan masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 17 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan I tahun 2026 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program atau kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Ikan Air Payau. Tujuan penyusunan LKj Direktorat Ikan Air Payau Triwulan I tahun 2026 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Ikan Air Payau selama tahun periode Triwulan I tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budi daya ke depan sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

1.3. Tujuan dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Ikan Air Payau mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan budi daya pada komoditas ikan air payau. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Ikan Air Payau menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

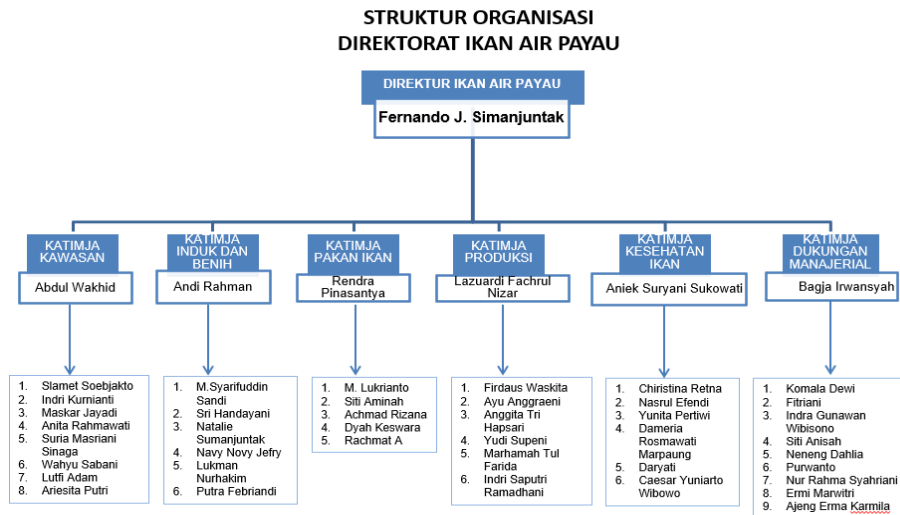
- (i) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (ii) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan

budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;

- (iii) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (iv) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (v) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Payau

1.4. Sumber Daya Manusia

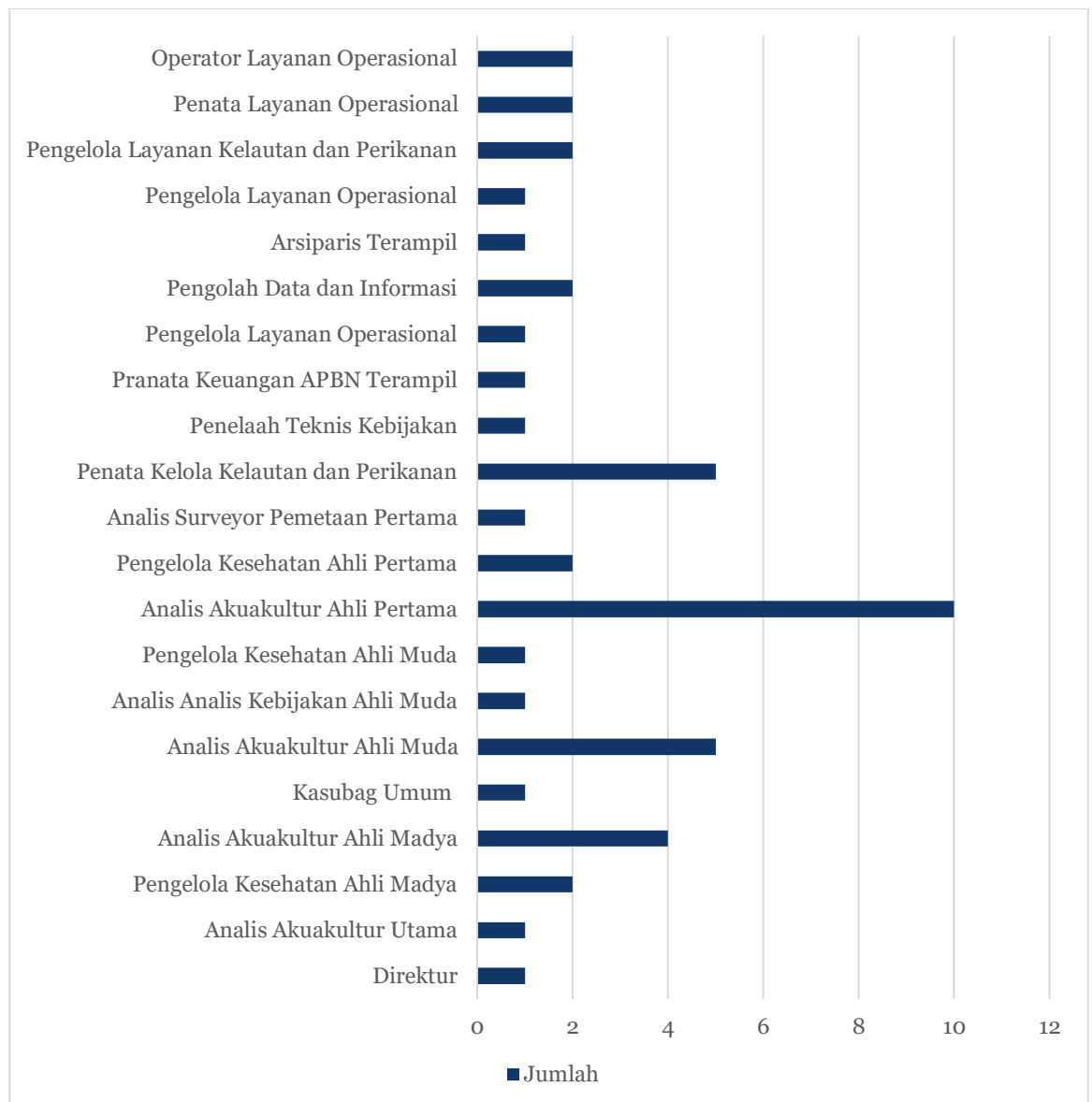
Sesuai dengan peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2025 terjadi perubahan mekanisme kerja baru di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, salah satunya adalah dengan melakukan perubahan organisasi Direktorat Produksi dan Usaha Budi daya menjadi Direktorat Ikan Air Payau. Sehingga susunan struktur organisasi Direktorat Ikan Air Payau di tahun 2026 terdiri atas Direktur Ikan Air Payau dan 6 (enam) Tim kerja. Susunan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah:



Update per 19 April 2025

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Payau

Jumlah pegawai Direktorat Ikan Air Payau sampai dengan Desember tahun 2026 berjumlah 47 orang yang terdiri dari pegawai PNS sejumlah 35 orang, PPPK 4 dan PPPK Penuh Waktu yang diangkat di TW I berjumlah 7 orang dan PPPK Paruh berjumlah 1 orang. Data pegawai jika dilihat berdasarkan jenis jabatan di Direktorat Ikan Air Payau masih terbagi menjadi dua yaitu jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Keragaan pejabat fungsional umum dan tertentu Direktorat Ikan Air Payau dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Keragaan jabatan di Direktorat Ikan Air Payau

Sedangkan Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi SDM Direktorat Ikan Air Payau adalah sebagai berikut: (i) S2 sejumlah 13 orang (27,66%); (ii) S1 sejumlah 25 orang (53,11%); (iii) D3 sejumlah 2 orang (4,25 %); dan (iv) SLTA/D1/D2 sejumlah 6 orang (12,76%).

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Ikan Air Payau

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)	%
1.	Magister (S2)	13	27,66
2.	Sarjana (S1/D4)	25	53,19

3.	Diploma (D3)	2	4,25
4	SLTA/ DI	6	12,76
5.	/D2 SMP	1	2,12
Jumlah		47	100

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

1.5.1. Potensi

Berdasarkan jenis tipologi ekosistem maka luas potensi perikanan budi daya dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu perikanan budi daya laut, perikanan budi daya air payau, dan perikanan budi daya air tawar. Luas total potensi lahan perikanan budi daya di Indonesia mencapai 17,92 juta hektar yang terdiri dari 12,12 juta hektar potensi budi daya laut; 2,96 juta hektar lahan perikanan budi daya air payau; dan 2,84 juta hektar potensi budi daya air tawar.

Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 10,16 persen untuk budi daya air tawar, 22,92 persen pada budi daya air payau dan 0,84 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

Pemanfaatan lahan perikanan budi daya masih sangat kecil dengan rata rata sebesar 11,31 % dengan rincian berikut: (i) 102.254 hektar (0,84%) untuk perikanan budi daya air laut; (ii) 679.448 hektar (22,92%) untuk perikanan budi daya air payau; (iii) 287.521 hektar (10,16%) untuk perikanan budi daya air tawar (Satudata KKP 2022).

No.	Jenis Budidaya <i>Type of Aquaculture</i>	Potensi <i>Potency</i> ¹⁾	Pemanfaatan <i>Usage</i> ²⁾	Peluang Pengembangan <i>Developing Opportunity</i>	Persentase Pemanfaatan Lahan Budidaya <i>Percentage of Usage Aquaculture Area</i>
1	Laut - <i>Marine culture</i>	12.123.383	102.254	12.021.129	0,84
2	Payau - <i>Brackishwater culture</i>	2.964.331	679.448	2.284.883	22,92
3	Tawar - <i>Freshwater culture</i>	2.830.540	287.521	2.543.019	10,16

Keterangan - *Note* :

¹⁾ Data berdasarkan buku saku statistik perikanan budidaya tahun 2015;

²⁾ Data berdasarkan Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan 2020

Gambar 3. Luas Perikanan Budi Daya Eksisting Tahun 2020

(Sumber: Jurnal Kelautan dan Perikanan dalam angka tahun 2022, ISSN 2829-7660. Volume 1 Tahun 2022)

Ditinjau dari aspek ekonomi, dan sosial perikanan budi daya merupakan salah satu subsektor yang mempunyai potensi dan peran strategis sebagai alternatif untuk peningkatan perkonomian nasional, kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan nasional. Potensi produksi perikanan budi daya di Indonesia diestimasi mencapai 100 juta ton/tahun dengan nilai produksi mencapai 251 miliar US Dolar (Dahuri 2018). Pengembangan perikanan budi daya diestimasi akan menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 15 juta orang pada tahun 2030, apabila kebijakan peningkatan produksi yang berorientasi ekspor dan domestik diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sektor perikanan budi daya mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Food Agriculture Organization* (FAO), menyebutkan bahwa perikanan budi daya mempunyai relevansi terhadap pencapaian SDGs terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional (*goal 1*), motor penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan pembudi daya dan penciptaan lapangan kerja (*goal 4*), menjamin ketersediaan suplai ikan melalui peningkatan produksi ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*goal 12*), dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan (*goal 14*).

1.5.2. Permasalahan

Perikanan budi daya merupakan salah satu sektor alternatif yang diharapkan menjadi sumber devisa negara dan tidak hanya memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, penyediaan gizi, dan ketahanan pangan nasional. Perikanan budi daya menjadi pilihan logis yang sangat mungkin dikembangkan di sektor kelautan dan perikanan setelah terjadinya stagnasi produksi perikanan tangkap dalam beberapa tahun terakhir (FAO 2007). Potensi perikanan budi daya yang dimiliki Indonesia sangat besar karena tidak hanya didasarkan pada aspek dua dimensi dari ruang namun secara lebih luas dapat dilihat dari tiga dimensi ruang termasuk kedalaman air. Namun pembangunan sektor perikanan budi daya di Indonesia belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan selama ini.

Permasalahan dan tantangan dalam mengoptimalkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan sangat kompleks dimana dalam hal ini dibagi menjadi permasalahan umum, permasalahan internal, dan permasalahan eksternal.

Permasalahan umum yang dihadapi Direktorat Ikan Air Payau dalam peningkatan produksi perikanan budi daya adalah 1) ketersediaan benih di sentra budi daya yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, 2) disparitas antara lokasi sentra produksi yang potensial dikembangkan (seperti daerah terpencil, wilayah timur, dan wilayah perbatasan) dengan sentra sarana dan prasarana seperti pakan ikan, peralatan dan mesin penunjang budi daya, 3) musibah banjir dan bencana alam di sentra budi daya yang menyebabkan kegagalan panen dan rusaknya prasarana budi daya, 4) munculnya penyakit baru dan serangan penyakit pada komoditas utama budi daya sehingga meningkatkan biaya produksi atau kegagalan panen, 5) kurangnya kemampuan beradaptasi pelaku usaha terhadap perubahan dalam usaha budi dayanya (perubahan iklim, perkembangan teknologi, peningkatan persyaratan pasar dan persaingan usaha)

Permasalahan internal yang dihadapi oleh Direktorat Ikan Air Payau dalam pembangunan perikanan budi daya berkelanjutan adalah 1) keterbatasan anggaran dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diberikan, 2) sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, 3) keterbatasan kesempatan untuk melakukan sinergitas dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan usaha budi daya.

Sedangkan permasalahan eksternal dalam pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan yaitu 1) kurangnya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain seperti asosiasi dan pemerintah daerah, 2) kompleksnya perizinan berusaha bagi pembudi daya di Indonesia, 3) lemahnya stabilitas usaha budi daya bagi skala mikro dan kecil yang menyebabkan kurangnya kepercayaan lembaga pembiayaan (tidak *bankable*), 4) meningkatnya persyaratan produk perikanan budi daya di pasar nasional dan internasional, 5) keterlibatan berbagai pihak dalam penguatan kelembagaan usaha budi daya belum optimal.

Tantangan dalam pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan di masa sekarang yaitu: (i) penurunan daya beli konsumen sehingga usaha budi daya harus efisien dan menghasilkan ikan dengan harga terjangkau, (ii) isu kerusakan lingkungan akibat kegiatan budi daya sehingga pelaksanaan kegiatan budi daya harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan; (iii) perkembangan teknologi dan perubahan demografi penduduk sehingga perlu penyesuaian dalam kegiatan usaha budi daya dan pemasaran hasilnya. (iv) persaingan ekspor akibat peningkatan produksi budi daya di beberapa negara lain berkembang lebih pesat dengan harga

yang bersaing; (v) meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap kegiatan budi daya.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan I tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Ikan Air Payau selama kurun waktu Triwulan III tahun 2026.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Ikan Air Payau serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Ikan Air Payau, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2025 – 2029, rencana kerja dan anggaran tahun 2026, penetapan kinerja Direktorat Ikan Air Payau serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Ikan Air Payau.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Ikan Air Payau serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2026 – 2029

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 telah diterbitkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045.

RKP Tahun 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan dan/atau Kemiskinan Ekstrem. Delapan (8) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 terdiri atas: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta

peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan; (3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Terkait dengan program pembangunan perikanan budi daya, KKP memiliki beberapa rencana kegiatan antara lain produksi benih dan induk unggul, produksi pakan ikan, pembinaan sertifikasi subsektor pembudidayaan ikan, monitoring residu, penyakit ikan, dan pemantauan resistensi antimikroba, pengembangan budidaya komoditas unggulan berbasis klaster, pembangunan kampung perikanan budidaya, bantuan benih dan calon induk ikan, pengelolaan irigasi tambak partisipatif (PITAP). Klaster kawasan revitalisasi tambak udang dan bandeng, dan Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP)

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Ikan Air Payau sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan. Dalam penyusunan peta strategi terdapat empat perspektif, yaitu *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective* yang dijabarkan dalam 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau:
 - a. Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke Masyarakat (Ekor).
 - b. Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang diproduksi UPT (Unit) Ikan Konsumsi Ikan Air Payau yang Diproduksi oleh UPT (Kg).
 - c. Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT (Kg).
 - d. Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji oleh UPT (Sampel).

- e. Sampel ikan air payau yang Diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan oleh UPT (Sampel).
 - f. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau yang disusun (Rekomendasi Kebijakan).
 - g. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel).
 - h. Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Payau (AMR) yang Diuji (Sampel).
 - i. Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel).
 - j. Infrastruktur Budi Daya Udang yang dibangun (Unit).
 - k. Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau (Unit).
 - l. Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun (Unit).
 - m. Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan yang dibangun (Unit).
 - n. Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang dibangun (Unit).
 - o. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang di yang Diuji (Sampel);
 - p. Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau (Sampel);
 - q. Infrastruktur Budi Daya Udang yang ditingkatkan (Unit)
 - r. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau (Rekomendasi Kebijakan)
 - s. Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan yang dikembangkan (Unit).
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau:
- a. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau (Nilai)
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 86 (Persen).
 - c. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 84,2 (Nilai)

- d. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 81,5 (Indeks).
- e. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 81 (Nilai).
- f. Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Payau sebanyak 100 (Persen)
- g. Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau 100 (Persen).

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja Dit. Ikan Air Payau tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT IKAN AIR PAYAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fernando Jongguran Simanjuntak**
Jabatan : Direktur Ikan Air
Payau Selanjutnya disebut
Pihak Pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Payau



Ditandatangani
Secara Elektronik

Fernando Jongguran Simanjuntak

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	1.	Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke Masyarakat (Ekor)	110.590.898
		2.	Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang diproduksi UPT (Unit)	88.818.868
		3.	Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT (Kg)	105.416
		4.	Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji oleh UPT (Sampel)	188
		5.	Sampel ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan oleh UPT (Sampel)	9.235
		6.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau yang disusun (Rekomendasi Kebijakan)	3
		7.	Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)	255
		8.	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Payau (AMR) yang Diuji (Sampel)	536
		9.	Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)	480
		10.	Infrastruktur Budi Daya Udang yang dibangun (Unit)	7
		11.	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau (Unit)	380
		12.	Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun (Unit)	1
		13.	Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan yang dibangun (Unit)	1
		14.	Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang dibangun (Unit)	4
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau	15.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen)	86
		16.	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau (Nilai)	84,2
		17.	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau (Indeks)	81,5
		18.	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Payau (Nilai)	81
		19.	Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen)	100
		20.	Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen)	100

--	--

DATA ANGGARAN:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	301.933.567.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Payau	183.313.000
Total Anggaran Direktorat Ikan Air Payau Tahun 2026		302.116.880.000

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Payau

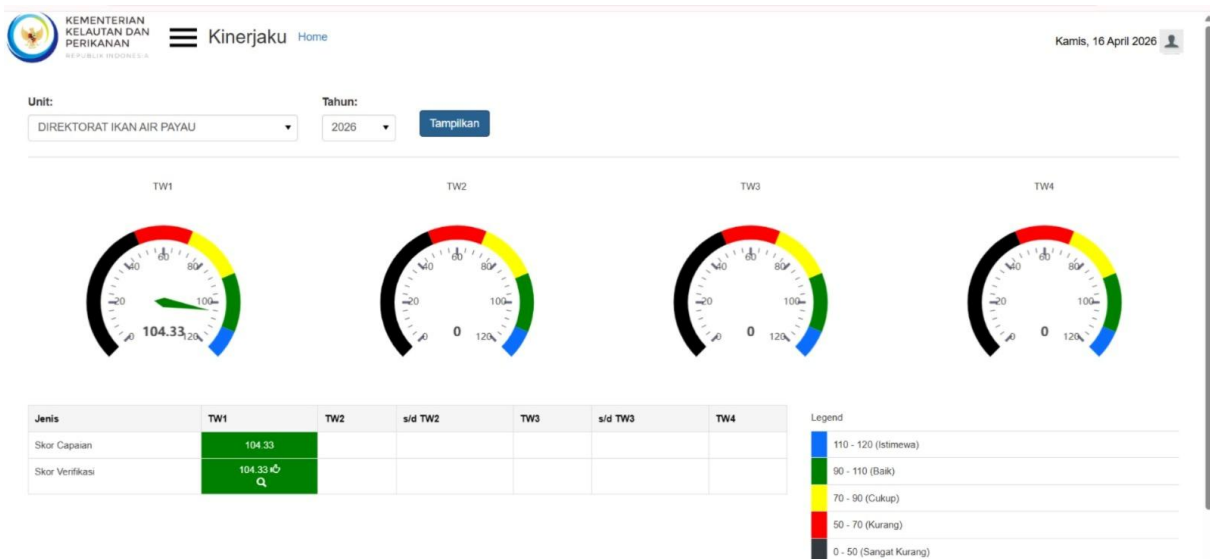


**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Fernando Jongguran Simanjuntak

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implemementasi Aplikasi BSC <http://kinerjaku.kkp.go.id> yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi. Berikut hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan I tahun 2026 berdasarkan hasil penilaian pada aplikasi kinerjaku.



Gambar 4. Hasil pengukuran kinerja sampai Triwulan I tahun 2026

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budi daya pada tahun 2026 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Ikan Air Payau menitikberatkan pada 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 20 (Sembilan belas) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi DJPB dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id> diperoleh Nilai Pencapaian sebesar 104,33 % (*Seratus empat koma tiga-tiga persen*). Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Ikan Air Payau pada periode Triwulan I tahun 2026 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Payau Selama Periode Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUNAN (2026)	TARGET TW I	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	1. Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke Masyarakat (Ekor)	110.590.898	16.499.763	19.788.280	17,89
	2. Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang diproduksi UPT (Unit)	88.818.868	3.362.000	4.528.717	134,70
	3. Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT (Kg)	105.416	1.564	170	0,16
	4. Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji oleh UPT (Sampel)	188	45	123	65,42

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUNAN (2026)	TARGET TW I	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
		5. Sampel ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan oleh UPT (Sampel)	9.235	2.301	4.991	217
		6. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau yang disusun (Rekomendasi Kebijakan)	3	1	1	33,33
		7. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)	255	54	125	231
		8. Sampel Surveilan Resistensi Antimikroba Ikan Air Payau (AMR) yang Diuji (Sampel)	536	83	152	28,36
		9. Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)	480	65	52	10,83
		10. Infrastruktur Budi Daya Udang yang dibangun (Unit)	7	-	-	-
		11. Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air payau (Unit)	380	-	8	2,1
		12. Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun (Unit)	1	-	-	-
		13. Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan yang dibangun (Unit)	1	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUNAN (2026)	TARGET TW I	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
		14	Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang dibangun (Unit)	4	-	-	-
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau	15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen)	86	100	100	116,27
		16	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau (Nilai)	84,2	-	-	-
		17	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau (Indeks)	81,5	-	-	-
		18	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Payau (Nilai)	81	-	-	-
		19	Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen)	100	100	100	100
		20	Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau (Persen)	100	-	-	-

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK-1): Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau

IKU 1. Bantuan Calon Induk Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/ Udang yang disalurkan ke masyarakat (Ekor)

Kualitas induk mempengaruhi kualitas benih yang dihasilkan dan berdampak pada

keberhasilan kegiatan budidaya secara keseluruhan. Induk yang baik adalah induk yang dihasilkan dari proses seleksi induk yang jelas sehingga secara ketertelusuran dapat dipertanggung jawabkan asal usul dari induk tersebut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan induk unggul dan benih . Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi induk menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi tersebut.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi calon induk, benih ikan dan udang unggul ikan air payau yang dihasilkan oleh UPT DJPB . Adapun peruntukkan dari hasil produksi calon induk ikan air payau ini dapat disalurkan kepada unit pembenihan di masyarakat. Unit pembenihan yang dapat menerima bantuan ini adalah unit pembenihan perseorangan, kelompok atau unit pembenihan ikan milik daerah yang mampu melakukan pemeliharaan induk dan pembenihan secara menyeluruh untuk memproduksi benih. Ketersediaan sarana dan SDM diharapkan dapat dipenuhi oleh unit pembenihan yang akan mendapatkan calon induk ikan air payau ini.

Target Indikator Kinerja Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang Disalurkan ke Masyarakat Tahun 2026 ditetapkan sebanyak 110.590.898 ekor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.070.899.000, yang disalurkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) yaitu BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BPBAP Ujung Batee, BPBAP Takalar dan BPIU2K Karangasem. Capaian realisasi sebanyak 19.788.280 ekor atau 17,89%, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.358.412.945,- atau 38,85% dari target tahun 2026 sesuai dengan tabel 1.

Tabel 3. Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang Disalurkan ke Masyarakat Tahun 2026

Output Kegiatan	Target	Pagu	Target (ekor)	Capaian Realisasi		Jumlah		UPT Pelaksana
			Tw I	Tw I		ekor	anggaran	
				ekor	anggaran			
Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke masyarakat	110.590.898	6.070.899.000	16.499.763	19.788.280	2.358.412.945	19.788.280	2.358.412.945	
Jumlah Benih Ikan Udang yang Disalurkan ke Masyarakat	102.952.284	3.886.418.000	15.468.719	18.799.080	1.549.623.203	18.799.080	1.549.623.203	P01, P02, P03, P04, PL01
Jumlah Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat	7.619.248	1.371.875.000	1.028.044	985.000	351.483.212	985.000	351.483.212	P01, P02, P03, P04
Jumlah Calon Induk Unggul Udang yang Disalurkan ke Masyarakat	19.162	797.041.000	3.000	4.200	457.306.530	4.200	457.306.530	P03, P04, PL01
Jumlah Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat	204	15.565.000	-	-	-	-	-	P04

Keterangan:

P : Payau
 PL : Payau Laut
 TP : Tawar Payau
 P01 : BBPBAP Jepara
 P02 : BBPBAP Situbondo
 P03 : BBPBAP Ujung Batee
 P04 : BBPBAP Takalar
 PL01 : BPIIUK Karangasem
 TP01 : BLUPPB Karawang

Berdasarkan tabel 1 capaian realisasi triwulan I bantuan calon induk unggul dan benih ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat sebanyak 19.788.280 ekor atau 119,39% dari target triwulan I sebanyak 16.499.763 ekor realisasi anggaran sebesar Rp. 2.358.412.945 dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah benih ikan udang yang disalurkan sebanyak 18.799.080 ekor atau 121,53% dari target triwulan I sebanyak 15.468.719 ekor, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.549.623.203,-
- Jumlah benih ikan air payau yang disalurkan sebanyak 985.000 ekor atau 95,81% dari target triwulan I sebanyak 1.028.044 ekor, realisasi anggaran sebesar Rp. 351.483.212,-
- Jumlah calon induk unggul udang yang disalurkan sebanyak 4.200 ekor atau 140% dari target triwulan I sebanyak 3.000 ekor, realisasi anggaran sebesar Rp. 457.306.530,-
- Jumlah calon induk unggul ikan air payau belum ada realisasi masih dalam proses persiapan media pemeliharaan.

Tabel 4. Capaian IKU Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke Masyarakat

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang disalurkan ke Masyarakat (ekor)						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2026	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
16.499.763	19.788.280	119,39%	6.130.000	322,81	110.788.898	17,89

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian sampai dengan periode 30 Maret 2026 sebanyak 19.788.280 ekor atau dari target Tahun 2026 sebesar 16.499.763 jika dipresentasikan realisasi sebesar 119,39% dari pada target yang ditentukan. Jika di bandingkan dengan Triwulan I 2025 maka Realisasi Triwulan I 2026 lebih tinggi

Penerima manfaat Bantuan Calon Induk Unggul dan Benih Ikan Air Payau/Udang yang Disalurkan ke Masyarakat sebanyak 53 (lima puluh tiga) kelompok UPR/HSRT yang tersebar di 2 (dua) Provinsi yaitu: Sulawesi Selatan dan Aceh, dan 8 (delapan) Kab/Kota yaitu: Takalar, Makasar, Pangkep, Gowa, Pinrang, Sinjai, Jeneponto, Pidie Jaya dan Aceh Aceh tersaji pada tabel 5.

Tabel 5. Rekapitulasi Data Bantuan Benih Ikan Air Payau/Udang yang Disalurkan ke Masyarakat Triwulan I Tahun 2026

Komoditas	Ukuran (cm)	Jumlah (Realisasi)	Satuan	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Kab/Kota	Provinsi	Nomor BAST	Tanggal BAST	Link Dokumen BAST	Satker Pelaksana	SK Penerima	Tanggal Distribusi
Bandeng	3 cm	250.000	Ekor	Mawar	Abd Majid	Takalar	Sulawesi Selatan	B.309/BPBAPT.PB.140/II/2026	22 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCECs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	22 Januari 2026
Bandeng	4 cm	150.000	Ekor	Panabuccu	Labahang Gessa	Takalar	Sulawesi Selatan	B.310/BPBAPT.PB.140/II/2026	22 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCECs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	22 Januari 2026
Windu	PL 10	800.000	Ekor	Kampung Vaname dan Nila	Machmud tunggal	Pangkep	Sulawesi Selatan	B.331/BPBAPT.PB.140/II/2026	25 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCECs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	25 Januari 2026
Windu	PL 10	600.000	Ekor	Sitalassi	Ibrahim M	Gowa	Sulawesi Selatan	B.332/BPBAPT.PB.140/II/2026	25 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCECs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	25 Januari 2026
Windu	PL 10	850.000	Ekor	Lapatongkang	Amri	Pinrang	Sulawesi Selatan	B.333/BPBAPT.PB.140/II/2026	25 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCECs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	25 Januari 2026
Windu	PL 10	650.000	Ekor	Samparaja	Askar	Pinrang	Sulawesi Selatan	B.334/BPBAPT.PB.140/II/2026	25 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCECs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	25 Januari 2026
Windu	PL 10	500.000	Ekor	Masarolebbi	Jufri	Pinrang	Sulawesi Selatan	B.356/BPBAPT.PB.140/II/2026	27 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCECs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	27 Januari 2026
Windu	PL 10	300.000	Ekor	Berkah Taipa	Rahman Adam	Takalar	Sulawesi Selatan	B.357/BPBAPT.PB.140/II/2026	27 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCECs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	27 Januari 2026
Windu	PL 10	500.000	Ekor	Campagaya Abadi	Takauddin	Takalar	Sulawesi Selatan	B.358/BPBAPT.PB.140/II/2026	27 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCECs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	27 Januari 2026
Windu	PL 10	1.200.000	Ekor	Lagoari 1	H. Ahmad Said	Sinjai	Sulawesi Selatan	B.414/BPBAPT.PB.140/II/2026	31 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCECs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	31 Januari 2026
Windu	PL 10	700.000	Ekor	Pasorongon 2	Ibrahim M	Pinrang	Sulawesi Selatan	B.432/BPBAPT.PB.140/II/2026	31 Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1MMPWUGFpkb/BjivRdelhtuQS_fQSMCECs?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.29/BPBAPT.PB.140/II/2026	31 Januari 2026
Windu	PL 10	1.200.000	Ekor	Bunging Tanre II	Firman	sinjai	Sulawesi Selatan	B.524/BPBAPT.PB.140/II/2026	07 Februari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1BdTPXUjEv-bbv3Sn9BsMU90j-kKvUQ?usp=drive_link	BPBAP Takalar	B.459/BPBAPT.PB.140/II/2026	07 Februari 2026
Windu	PL 10	1.200.000	Ekor	Pasorongon	Mustafa	Pinrang	Sulawesi Selatan	B.525/BPBAPT.PB.140/II/2026	09 Februari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1BdTPXUjEv-bbv3Sn9BsMU90j-kKvUQ?usp=drive_link	BPBAP Takalar	B.459/BPBAPT.PB.140/II/2026	09 Februari 2026
Windu	PL 12	500.000	Ekor	Sipakainga	M.Nur. Dg. Rumpa	Pangkep	Sulawesi Selatan	B.530/BPBAPT.PB.140/II/2026	10 Februari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1BdTPXUjEv-bbv3Sn9BsMU90j-kKvUQ?usp=drive_link	BPBAP Takalar	B.459/BPBAPT.PB.140/II/2026	10 Februari 2026
Windu	PL 12	600.000	Ekor	Bangkala Mandiri	Zainal	Jeneponto	Sulawesi Selatan	B.531/BPBAPT.PB.140/II/2026	10 Februari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1BdTPXUjEv-bbv3Sn9BsMU90j-kKvUQ?usp=drive_link	BPBAP Takalar	B.459/BPBAPT.PB.140/II/2026	10 Februari 2026
Rajungan	1.5	100.000	Ekor	Nikarannuang	Herman Dg Tiro	Takalar	Sulawesi Selatan	B.606/BPBAPT.PB.140/II/2026	14 Februari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1BdTPXUjEv-bbv3Sn9BsMU90j-kKvUQ?usp=drive_link	BPBAP Takalar	B.459/BPBAPT.PB.140/II/2026	14 Februari 2026
Bandeng	3 cm	100.000	Ekor	Sejahterah mandiri	Rahman	Gowa	Sulawesi Selatan	B.842 /BPAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1lbyn5ScWLCCNVgve4HUbcEnHFz1OnDv?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026
Bandeng	3 cm	200.000	Ekor	Berkah Bormas	H. Ismail	Pangkep	Sulawesi Selatan	B.843/BPAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1lbyn5ScWLCCNVgve4HUbcEnHFz1OnDv?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026
Nila	2 cm	100.000	Ekor	Sipakalebbi Jennae	Nabaruddin	Pangkep	Sulawesi Selatan	B.844/BPAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1lbyn5ScWLCCNVgve4HUbcEnHFz1OnDv?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026
Nila	2 cm	15.000	Ekor	Bandeng Bira	H. Syarifuddin	Makasar	Sulawesi Selatan	B.8080/BPBAPT.PB.140/III/2026	04 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1lbyn5ScWLCCNVgve4HUbcEnHFz1OnDv?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	04 Maret 2026
Bandeng	3 cm	100.000	Ekor	Sejahterah mandiri	Rahman	Gowa	Sulawesi Selatan	B.842 /BPAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1lbyn5ScWLCCNVgve4HUbcEnHFz1OnDv?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026
Bandeng	3 cm	200.000	Ekor	Berkah Bormas	H. Ismail	Pangkep	Sulawesi Selatan	B.843/BPAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1lbyn5ScWLCCNVgve4HUbcEnHFz1OnDv?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026
Nila	2 cm	100.000	Ekor	Sipakalebbi Jennae	Nabaruddin	Pangkep	Sulawesi Selatan	B.844/BPAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1lbyn5ScWLCCNVgve4HUbcEnHFz1OnDv?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	03 Maret 2026
Nila	2 cm	15.000	Ekor	Bandeng Bira	H. Syarifuddin	Makasar	Sulawesi Selatan	B.8080/BPBAPT.PB.140/III/2026	04 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1lbyn5ScWLCCNVgve4HUbcEnHFz1OnDv?usp=sharing	BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	04 Maret 2026
Nila	2 cm	20.000	Ekor	Ponpes Al Markaz Al Islamy	Fadhilullah Marzuki	Sinjai	Sulawesi Selatan	B.1077/BPAPT.PB.140/III/2026	17 Maret 2026		BPBAP Takalar	B.861 /BPBAPT.PB.140/III/2026	17 Maret 2026
udang	PL 10	467.000	ekor	udep beusare	syamaun ismail	pidie jaya	aceh	334/BPBAP-UB/PB.131/II/2026	14 Februari 2026	https://drive.google.com/file/d/1uX3hnK-6VhsvCU8NHV7QZZHnPaFgM/view?usp=drive_link	BPBAP UB	423/BPBAP-UB /PB.320/II/2026	14 Februari 2026
udang	PL 10	467.000	ekor	alue bagan	baidillah	pidie jaya	aceh	335/BPBAP-UB/PB.131/II/2026	14 Februari 2026	https://drive.google.com/file/d/1WZaMoKuDVZ2Wsx2CohT1AzL86q6/view?usp=drive_link	BPBAP UB	423/BPBAP-UB /PB.320/II/2026	14 Februari 2026
udang	PL 10	467.000	ekor	kuala tari	jamaludin	pidie jaya	aceh	336/BPBAP-UB/PB.131/II/2026	14 Februari 2026	https://drive.google.com/file/d/1aCnKvSssh8heeXbtSo0E6wua4hZOD4dQ/view?usp=drive_link	BPBAP UB	423/BPBAP-UB /PB.320/II/2026	14 Februari 2026
udang	PL 10	802.940	ekor	makmu jaya	ilhamudi	aceh utara	aceh	525/BPBAP-UB/PB.131/II/2026	9 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/14FayYI-YRQQAUK1JZLGFZfXcoTRBUQg	BPBAP UB	618/BPBAP-UB /PB.320/III/2026	9 Maret 2026
udang	PL 10	595.140	ekor	Camar Laut	M. Daod	Pidie Jaya	Aceh	545/BPBAP-UB/PB.131/III/2026	11 Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/14FayYI-YRQQAUK1JZLGFZfXcoTRBUQg	BPBAP UB	618/BPBAP-UB /PB.320/III/2026	11 Maret 2026

IKU 2. Calon Induk Unggul/Benih Ikan/Udang dan atau Ikan Konsumsi yang di produksi UPT (Unit)

Kualitas induk mempengaruhi kualitas benih yang dihasilkan dan berdampak pada keberhasilan kegiatan budidaya secara keseluruhan. Induk yang baik adalah induk yang dihasilkan dari proses seleksi induk yang jelas sehingga secara ketertelusuran dapat dipertanggung jawabkan asal usul dari induk tersebut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan induk unggul. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi induk menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi tersebut.

Target Indikator Kinerja Calon Induk Unggul/Benih/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang Diproduksi UPT Tahun 2026 ditetapkan sebanyak 88.818.868 ekor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 124.836.816.000,- yang diproduksi oleh UPT lingkup DJPB yaitu BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BPBAP Ujung Batee, BPBAP Takalar, BLUPPB Karawang dan BPIU2K Karangasem. Capaian realisasi sebanyak 4.528.717 ekor atau 5,10%, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.622.073.264,- atau 3,70% dari target tahun 2026 sesuai dengan tabel 6.

Tabel 6. Calon Induk Unggul/Benih/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang Diproduksi UPT Tahun 2026

Output Kegiatan	Target	Pagu	Target (ekor)	Capaian Realisasi		Jumlah		UPT Pelaksana
				Tw I				
			Tw I	ekor	anggaran	ekor	anggaran	
Calin/Benih/Udang dan atau ikan konsumsi air payau yang Diproduksi UPT	88.818.868	124.836.816.000	3.362.000	4.528.717	4.622.073.264	4.528.717	4.622.073.264	
Jumlah Benih Ikan Air Payau yang Diproduksi	32.339.991	6.424.302.000	34.000	156.000	58.383.968	156.000	58.383.968	P01, P02, P03, P04, TP01
Jumlah Benih Ikan Udang yang Diproduksi UPT	52.450.560	1.480.351.000	3.300.000	4.342.000	67.867.933	4.342.000	67.867.933	P01, P02, P03, P04, PL01
Jumlah Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Diproduksi	4.042	275.628.000	-	-	21.514.000	-	21.514.000	P01, P03, P04
Jumlah Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi UPT	141.198	6.092.811.000	3.000	3.213	2.114.680.417	3.213	2.114.680.417	P01, P03, P04, PL01
Produksi Ikan Konsumsi Ikan Air Payau	3.883.077	110.563.724.000	25.000	27.504	2.359.626.946	27.504	2.359.626.946	P01, P02, TP01

Keterangan:

P : Payau
 PL : Payau Laut
 TP : Tawar Payau
 P01 : BBPBAP Jepara
 P02 : BPBAP Situbondo
 P03 : BPBAP Ujung Batee
 P04 : BPBAP Takalar
 PL01 : BPIU2K Karangasem
 TP01 : BLUPPB Karawang

Berdasarkan tabel 1 capaian realisasi triwulan I jumlah calon induk unggul/benih/udang dan atau ikan konsumsi air payau yang diproduksi UPT sebanyak 4.528.717 ekor atau 134,70% dari target triwulan I sebanyak 3.362.000 ekor realisasi anggaran sebesar Rp. 4.622.073.264,- dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah benih ikan air payau yang diproduksi sebanyak 156.00 ekor atau 458,82% dari target triwulan I sebanyak 34.000 ekor, realisasi anggaran sebesar Rp. 58.383.968,-
- Jumlah benih ikan udang yang diproduksi sebanyak 4.342.000 ekor atau 131,58% dari target triwulan I sebanyak 3.300.000 ekor, realisasi anggaran sebesar Rp. 67.867.933,-
- Jumlah calon induk unggul ikan air payau belum ada realisasi masih dalam proses persiapan media pemeliharaan.
- Jumlah calon induk unggul udang diproduksi sebanyak 3.213 ekor atau 107,10% dari target triwulan I sebanyak 3.000 ekor, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.114.680.417,-
- Jumlah produksi ikan konsumsi ikan air payau sebanyak 27.503,83 kg atau 107,10% dari target triwulan I sebanyak 25.000 kg, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.359.626.946,- .

Tabel 7. Capaian IKU Bantuan Calon Induk Unggul/Benih/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang Diproduksi UPT Tahun 2026

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Calon Induk Unggul/Benih/Udang dan atau Ikan Konsumsi Air Payau yang Diproduksi UPT						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2026	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
3.362.000	4.528.717	134,70%	-	-	88.818.868	24,46

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian sampai dengan periode 30 Maret 2026 sebanyak 4.528.717 ekor atau dari target TW I Tahun 2026 sebesar 3.362.000 jika dipresentasikan realisasi sebesar 134,70% dari pada target yang ditentukan.

IKU 3. Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang di produksi untuk operasional UPT (Kg)

Implementasi program ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen mewujudkan misi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran pada poin 2 (dua) yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kesadaran masyarakat dunia akan kesehatan dan keamanan pangan yang semakin meningkat, menuntut seluruh pihak terkait dengan produksi pangan harus mengutamakan jaminan mutu (quality assurance) dan keamanan pangan (food safety) baik untuk produk ekspor maupun konsumsi domestik. Menyikapi hal tersebut, melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, antara lain mengamanatkan bahwa dalam usaha pembudidayaan ikan harus menerapkan cara berbudidaya yang baik dan benar. Untuk itu, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang baik ditetapkan kriteria dan standar yang harus dilakukan oleh pembudidaya dalam pemeliharaan ikan, termasuk dalam penggunaan pakan ikan. .

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) khususnya yang bergerak di perikanan budidaya air payau, melakukan pemantauan produksi pakan ikan pada unit pakan mandiri yang ada di UPT dalam rangka menjamin ketersediaan pakan ikan pada masing-masing UPT sesuai dengan kegiatan budidaya dan daerah distribusinya. Untuk tahun 2026, DJPB telah menetapkan target produksi untuk unit pakan mandiri yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pada masing-masing UPT Ikan Air Payau.

Capaian indikator kinerja “Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT (Unit)” pada Tahun 2026 diperoleh dari 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yaitu : (i) BPBAP Ujung Batee, (ii) BBPBAP Jepara, (iii) BBPBL Lampung, dan (iv) BPBAP Takalar.

Sedangkan target di tahun 2026 ini untuk : UPT BPBAP Ujung Batee (3.448 kilogram), BBPBA Jepara (85.564 kilogram), BPBAP Takalar (10.193 kilogram), dan BBPBL Lampung (6.211 kilogram). Adapun realisasi sebanyak 170 kilogram atau sebesar 0,16% dari target yang telah disesuaikan sebagaimana ditampilkan pada tabel 8 berikut :

Tabel 8 Target dan Realisasi Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang di produksi untuk operasional UPT (Kg)

No	Nama UPT DJPB	Target Produksi (Kg)	Realisasi hingga Maret (Kg)	Prosentase (%)	Keterangan
1	BBPBAP Jepara	85.564	-	0%	Bahan baku proses pengadaan
2	BBPBL Lampung	6.211	-	0%	Bahan baku proses pengadaan
3	BPBAP Takalar	10.193	170	2%	Produksi menggunakan sisa bahan baku dari Tahun Anggaran sebelumnya
4	BPBAP Ujung Batee	3.448	-	0%	Kendala kerusakan mesin
Total		105.416	170	0,16%	

Realisasi capaian produksi pakan ikan pada unit produksi pakan mandiri DJPB, khususnya untuk ikan air payau sampai akhir bulan maret Tahun 2026 secara total dari 4 UPT adalah sebesar 170 kg dari target kumulatif tahunan 105.416 sebesar 0,16 %. Adapun Capaian IKU Sampel Pakan dan obat Ikan Air Payau yang diuji oleh UPT dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini

Tabel 9 Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang di produksi untuk operasional UPT (Kg)

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT(Unit)						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2026	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
105.416	170	0,16	-	-	105.41	0,16

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 untuk IK ini adalah sebesar 105.416 kg dan Realisasi yang diperoleh sebesar 170 kg dengan capaian sebesar 0,16 % . Sehubungan dengan capaian indikator kinerja di atas, secara akumulatif belum mencapai target yang optimal. Hal ini karena adanya kendala pengadaan bahan baku yang masih proses pengadaan dan mesin produksi dalam proses perbaikan.

IKU 4. Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau (sampel)

Indikator kinerja ini merupakan jumlah sampel nutrisi pakan, sampel obat, dan sampel mutu pakan ikan air payau yang diuji oleh UPT pelaksana. Pengujian nutrisi pakan ikan meliputi parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. Sedangkan pengujian mutu pakan ikan yaitu pengujian kontaminan pakan yang terdiri atas kontaminan logam berat (Pb, Cd, dan HG), antibiotik (nitrofurantoin, kloramfenikol, oksitetrasiklin), mikotoksin (aflatoxin) dan melamin

Pengujian sampel obat ikan adalah proses untuk menilai kualitas (mutu) obat ikan yang beredar yang dilakukan di laboratorium dan hasilnya dibandingkan dengan mutu obat ikan tersebut pada saat didaftarkan. Sedangkan pengujian lapangan adalah uji yang dilakukan untuk membuktikan khasiat (eficacy) dan keamanan (safety) obat ikan pada ikan target pada kondisi sebenarnya dengan skala tertentu sesuai dengan indikasi yang tercantum pada etiket atau label.

Sampel yang diuji di laboratorium UPT DJPB sebagai capaian indikator kinerja berasal dari sampel internal (sampel hasil kegiatan monitoring baik di lingkungan Balai maupun ke pembudidaya) dan eksternal (pembudidaya mengirimkan sampel ke laboratorium dan pemantauan Direktorat Prasarana dan Sarana).

Capaian indikator kinerja “Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji oleh UPT” pada Tahun 2026 diperoleh dari 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), yaitu : (i).BBPBAP Jepara, (ii) BPBAP Situbondo; dan (iii) BLUPBB Kerawang. Target sampel pakan dan obat ikan air payau yang diuji oleh UPT untuk Tahun 2026 adalah 188 Sampel dengan pembagian sebanyak 71 sampel di BBPBAP Jepara, 108 sampel di BPBAP Situbondo, dan 9 sampel di BLUPBB Kerawang.

Adapun capaian indikator kinerja “Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji” sampai bulan Maret (Triwulan I) Tahun 2026 telah terealisasi sebanyak **123 sampel**

atau **65,42%** dari target yang ditetapkan sebagaimana ditampilkan pada Tabel10 di bawah ini :

Tabel 10. Target dan realisasi sampel I Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji

No	Nama UPT DJPB	Target Sampel	Realisasi Sampel	Persen Capaian (%)
1	BBPBAP Jepara	71	35	49
2	BPBAP Situbondo	108	87	81
3	BLUPPB Karawang	9	1	11
Total		188	123	65,42

Realisasi capaian Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji oleh UPT untuk ikan air payau sampai akhir bulan maret Tahun 2026 secara total dari 3 UPT adalah sebesar 123 sampel dari target kumulatif tahunan 188 sampel atau sebesar 65,42 %. Adapun Capaian IKU Sampel Pakan dan obat Ikan Air Payau yang diuji oleh UPT dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang diuji oleh UPT

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang diuji oleh UPT (Unit)						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2026	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
188	123	65,45	-	-	123	65,42

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 untuk IK ini adalah sebesar 188 dan Realisasi yang diperoleh sebesar 123 dengan capaian sebesar 65,45 % . Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Karena baru dilaksanakan pada tahun ini. Sampel Pakan dan Obat Ikan Air Payau yang Diuji oleh UPT” pada periode Triwulan I Tahun 2026 telah menunjukkan capaian yang cukup optimal dari target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa

sebagian besar pakan yang diuji telah memenuhi aspek nutrisi dan keamanan yang Diuji oleh UPT mutunya.

IKU 5. Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (sampel)

Target indikator kinerja jumlah sampel Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel) Tahun 2026 ditetapkan sebanyak 9.235 sampel. Ruang lingkup layanan sampel yang menjadi capaian dari Indikator Kinerja tersebut berasal dari pengujian: 1) Kualitas Air, 2) Mikrobiologi (tidak termasuk sampel AMR), 3) Patologi, 4) Biomolekuler dan 5) Residu.

Sumber data perolehan capaian indikator ini berasal dari 7 (tujuh) UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yaitu : BBPBAP Ujung Batee, BPKIL Serang, BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BLUPBB Karawang, BPBAP Takalar, dan BPIU2K Karangasem. Rincian target sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel) dapat dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13 berikut ini.

Tabel 12. Target Sampel Per Ruang Lingkup Pengujian Tahun 2026

No	Ruang Lingkup Pengujian	Jumlah Sampel
1	Kualitas Air	5.933
2	Mikrobiologi (diluar AMR)	1.399
3	Patologi	434
4	Biomolekuler	1.393
5	Residu	76
	Total Sampel	9.235

Tabel 13. Target Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel) Tahun 2026

No	Nama UPT Ditjen Perikanan Budi Daya	Target (Sampel)					
		Kualitas Air	Mikrobiologi	Patologi	Biologi Molekuler	Residu	Total
1	BPBAP Ujung Batee	120	30	-	50	-	200
2	BPKIL Serang	1.700	200	120	120	50	2.190
3	BBPBAP Jepara	1.000	288	272	240	10	1.810
4	BPBAP Situbondo	950	291	22	403	8	1.674

5	BLUPBB Karawang	1.550	450	-	485	-	2.485
6	BPBAP Takalar	466	87	20	95	8	676
7	BPIU2K Karangasem	147	53	-	-	-	200
Total		5.933	1.399	434	1.393	76	9.235

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja di 7 (tujuh) UPT DJPB pada Triwulan I diperoleh realisasi sebanyak 4.991 sampel atau 54,04% dari target tahunan. Target tahunan dan realisasi di 7 (tujuh) UPT DJPB dapat dilihat pada Tabel 14. berikut ini :

Tabel 14. Target dan Realisasi “Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel)” Triwulan I Tahun 2026

No	Nama UPT DJPB	Target Sampel	Realisasi hingga Triwulan I	Prosentase (%)
1	BPBAP Ujung Batee	200	199	99,50
2	BPKIL Serang	2.190	1.508	68,86
3	BBPBAP Jepara	1.810	526	29,06
4	BPBAP Situbondo	1.674	1.119	66,85
5	BLUPBB Karawang	2.485	790	31,79
6	BPBAP Takalar	676	743	109,91
7	BPIU2K Karangasem	200	106	53,00
Total		9.235	4.991	54,04

Ruang lingkup pengujian di laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan lingkup UPT DJPB antara lain kualitas air, mikrobiologi, patologi, residu dan biologi molekuler. Namun masing-masing UPT DJPB memiliki ruang lingkup pengujian yang berbeda sesuai dengan kapasitas laboratorium yang tersedia. Capaian Triwulan I untuk masing-masing ruang lingkup dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Capaian “Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel)” Triwulan I Tahun 2026

No	Nama UPT Ditjen Perikanan Budi Daya	Realisasi (Sampel) Hingga Triwulan I					
		Kualitas Air	Mikrobiologi	Patologi	Biologi Molekuler	Residu	Total
1	BPBAP Ujung Batee	112	50	-	37	-	199
2	BPKIL Serang	844	254	335	16	59	1.508
3	BBPBAP Jepara	214	92	62	155	3	526
4	BPBAP Situbondo	416	380	34	250	39	1.119
5	BLUPBB Karawang	638	68	-	84	-	790

6	BPBAP Takalar	371	233	7	126	6	743
7	BPIU2K Karangasem	80	26	-	-	-	106
	Total	2.675	1.103	438	668	107	4.991

Tabel 16. Capaian “Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel) “ berdasarkan ruang lingkup pengujian Triwulan I Tahun 2026

No	Ruang Lingkup Pengujian	Target Sampel (Tahunan)	Realisasi Triwulan I	Prosentase (%)
1	Kualitas Air	5.933	2.675	45,09
2	Mikrobiologi	1.399	1.103	78,84
3	Patologi	434	438	100,92
4	Biologi Molekuler	1.393	668	47,95
5	Residu	76	107	140,79
	Total	9.235	4.991	54,04

Berdasarkan data capaian Triwulan I, maka realisasi Indikator Kinerja Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT (Sampel) telah tercapai sebesar 54,04% dibandingkan dengan target tahunan. Sampel yang diuji di laboratorium UPT DJPB sebagai capaian indikator kinerja ini berasal dari sampel internal (sampel hasil kegiatan monitoring baik di lingkungan UPT maupun ke pembudidaya) dan eksternal (pembudidaya mengirimkan sampel ke laboratorium).

Realisasi sampel ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan oleh UPT paling tinggi terdapat di BPBAP Takalar dengan capaian prosentase sebesar 109,91% dengan ruang lingkup sampel kualitas air yang paling banyak diuji sejumlah 371 sampel. Sedangkan capaian terendah berada di laboratorium BBPBAP Jepara yaitu sebesar 29,06%. Selanjutnya, capaian indikator kinerja berdasarkan ruang lingkup pengujian sampel menunjukkan bahwa pemeriksaan residu menempati perolehan tertinggi yaitu 140,79% dari target tahunan yang ditetapkan, sedangkan pengujian kualitas air menempati perolehan terendah yaitu 45,09%.

Pagu penganggaran kegiatan pengujian sampel ikan air payau yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT di 7 (tujuh) UPT DJPB bidang air payau senilai Rp 3.587.622.000 dengan realisasi Rp 142.208.509 atau 4,67%. Adapun capaian IKU Sampel Ikan Air Payau yang diuji dalam rangka Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Ikan Air Payau yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan oleh UPT						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2026	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
9.235	4.991	54,04	-	-	9.235	54,04

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 untuk IK ini adalah sebesar 9.235 dan Realisasi yang diperoleh sebesar 4.991 dengan capaian sebesar 54,04 % . Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Karena baru dilaksanakan pada tahun ini.

IKU 6. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budidaya Ikan Air Payau (rekomendasi kebijakan)

Indikator Kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau merupakan kegiatan penyusunan Norma, Kriteria, Standar dan Prosedur (NSPK) bidang budi daya ikan air payau. Rekomendasi kebijakan ini sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintah dikarenakan untuk berkembangnya perikanan budi daya di Indonesia khususnya budi daya ikan air payau maka dibutuhkan suatu input sarana dan prasarana produksi yang memadai dalam rangka menunjang peningkatan produksi budi daya dalam hal ini adalah penyusunan NSPK untuk mendukung tata kelola bidang produksi dan usaha budidaya. Dalam pengertian singkatnya, norma adalah aturan atau ketentuan yang

dipakai sebagai tatanan dalam penyelenggaraan pemerintah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau pada Triwulan I 2026 sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan yaitu Penyusunan Profil Budi Daya Ikan Air Payau, dan hasil penyusunan 17 (tujuh belas) Profil budidaya ikan air payau yang kami lampirkan dalam link google drive <https://bit.ly/PosterPiguraDIAP>, sebagai berikut:

1. Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang
2. Budidaya Udang Berbasis Kawasang (BUBK) Kebumen
3. Modeling Budidaya Kepiting Pasuruan
4. Integrated Shrimp Farming (ISF) Waingapu Sumba Timur
5. Revitalisasi Tambak Pantura
6. Data Produksi Budidaya Air Payau 2021-2024
7. Profil Komoditas Udang Vaname
8. Profil Komoditas Udang Windu
9. Profil Komoditas Bandeng
10. Profil Komoditas Kepiting
11. Profil Komoditas Nila Salin
12. Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)
13. Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
14. Peta Sebaran Penyakit Udang 2025
15. Luas Lahan Budi Daya Ikan Air Payau
16. Sarana Budidaya Air Payau
17. Data Ekspor Impor Air Payau

Adapun capaian IKU Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 18. Capain IKU Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2026	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
3	1	33,33	-	-	3	33,33

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 Untuk indicator kinerja ini adalah 5 rekomendasi kebijakan dan realisasi diperoleh sebanyak 1 rekomendasi kebijakan dengan capaian 33,33 %. Pada indicator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan TW I tahun lalu karena belum dilaksanakan pada TW I tahun lalu.

IKU 7. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)

Kegiatan monitoring penyakit ikan dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya wabah di kawasan perikanan budidaya yang berpotensi mengancam pencapaian target produksi dan menghambat kelancaran perdagangan produk perikanan budidaya di dunia internasional. Pada tahun sebelumnya, kegiatan ini dilaksanakan di 34 Provinsi dengan dukungan anggaran Tugas Pembantuan. Namun pada Tahun 2026, kegiatan ini didelegasikan di 4 (empat) UPT DJPB, antara lain BPBAP Ujung Batee, BPBAP Takalar, BPIUUK Karangasem, dan BPKIL Serang, dengan target sampel monitoring ikan air payau yang diuji sebanyak 255 sampel. Capaian IKK tersebut, hasil pengukurannya baru diketahui akhir tahun.

Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji merupakan sampel aktif dan sampel pasif dan selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium sesuai dengan gejala penyakit yang ditemukan. Sampel yang diambil tidak hanya terkait dengan komoditas ikan saja namun juga meliputi pakan, air dan sedimen yang merupakan media pembawa penyakit ikan air payau. Jenis penyakit ikan yang dimonitoring sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Jenis Penyakit Ikan Yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan. Perkembangan capaian sampel yang telah diperoleh hingga Triwulan I sebanyak 125 atau mencapai 49,02% dari target tahunan dengan jenis patogen yang ditemukan hasil uji positif, antara lain: WSSV, AHPND, EHP dan Vibriosis. Rincian target dan realisasi sampel Triwulan I dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 19. Target dan Realisasi Sampel Monitoring Penyakit Ikan Triwulan I Tahun 2026

No	UPT DJPB	Target Sampel		Realisasi	Persentase	
		Tahunan	Triwulan I		Tahunan	Triwulan I
1	BPBAP Ujung Batee	60	12	12	20	100
2	BPBAP Takalar	60	10	17	28,33	170
3	BPIUUK Karangasem	60	12	70	116,67	583
4	BPKIL Serang	75	20	26	34,67	34,67
	Total	255	54	125	49,02	231,48

Tabel 20. Capaian IKU Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
255	125	231,48	-	-	4973	231,48

Kendala dalam pencapaian indikator kinerja “Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)” pada Triwulan I Tahun 2026, diantaranya: (i) terdapat perubahan rencana UPT yang awalnya monitoring dilakukan secara aktif namun dengan adanya pemotongan anggaran berubah menjadi monitoring aktif dan monitoring pasif dan (ii) kekeliruan pendataan sampel yang diinput di dalam Software Sistem Monitoring Penyakit Ikan (SSMPI).

Sehubungan dengan hal diatas, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi data sampel monitoring penyakit ikan dengan UPT DJPB terkait sehingga kegiatan monitoring penyakit ikan dapat dicapai secara optimal.

Anggaran yang dialokasikan dalam rangka capaian Indikator Kinerja Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji sebesar Rp 313.089.000 dengan realisasi anggaran Rp 103.935.094 atau 33,20%.

IKU 8. Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau (Sampel)

Indikator kinerja mengenai *Antimicrobial Resistance* (AMR) merupakan pelaksanaan mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengendalian Resistensi Antimikroba Pada Perikanan Budidaya. Resistensi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan.

Capaian Indikator Surveilans AMR dengan cara mengukur jumlah sampel ikan yang dilakukan pengujian resistensi antibiotik untuk mengetahui tingkat resistensi bakteri akibat penggunaan antibiotik. Antimikroba yang menjadi target pengujian AMR dari golongan antibiotik yang diperbolehkan di perikanan budidaya untuk pengobatan penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteri gram negatif, yaitu: enrofloxacin, oksitetrasiklin dan tetrasiklin. Bakteri patogen yang menjadi target pengujian AMR merupakan jenis bakteri gram negatif, yaitu: 1) *Aeromonas hydrophila*, 2) *Vibrio alginolyticus*, 3) *Vibrio parahaemolyticus* dan 4) *Escherichia coli*. Secara rinci bakteri yang dijadikan target pada pengujian AMR dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Sasaran Bakteri dan Jenis Komoditas dalam Pengujian AMR

No	Bakteri	Komoditas/Sampel
1	<i>Aeromonas hydrophila</i>	Lele, Nila, Patin, Nila Salin
2	<i>Vibrio alginolyticus</i>	Kerapu, Kakap, Bawal, Kuwe
3	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	Udang
4	<i>Escherichia coli</i>	Air budidaya

Kegiatan Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau dilaksanakan di 7 (tujuh) UPT – Ditjen Perikanan Budi Daya dengan target total tahunan yang ditetapkan sebanyak 536 sampel. Berikut capaian Indikator Kinerja “Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau (Sampel)” Triwulan I Tahun 2026.

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja “Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau (Sampel)” Triwulan I Tahun 2026

No	UPT DJPB	Target Sampel Total	Komoditas	Target Sampel	Realisasi TW I	Isolat
1	BBPBAP Jepara	78	Udang	39	9	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
			Air	39	13	<i>Escherichia coli</i>
2	BPBAP Situbondo	73	Udang	73	48	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
3	BPBAP Ujung Batee	25	Udang	25	12	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
4	BPBAP Takalar	61	Udang	61	14	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
5	BLUPBB Karawang	224	Udang	80	2	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
			Nila salin	100	22	<i>Aeromonas hydrophila</i>
			Air	44	0	<i>Escherichia coli</i>
6	BPIU2K Karangasem	25	Udang	25	16	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
7	BPKIL Serang	50	Udang	30	8	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
			Air payau	20	8	<i>Escherichia coli</i>
Total		536		536	152	

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sampel yang telah diambil oleh 7 (tujuh) UPT DJPB bidang air payau telah terealisasi sebesar 28,36% atau 152 sampel dari target tahunan 536. Adapun capaian IKU Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau.

Tabel 23. Capaian IKU Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR)

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				

536	152	28,36	-	-	151	-
-----	-----	-------	---	---	-----	---

Dari table bahwa capaian pada TW I 2026 ini tidak bisa di bandingkan dengan TW I 2025 karena belum ada capaian pada TW I 2025 dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir semester.

Selanjutnya terkait dengan sampel yang telah diambil, maka sampel tersebut akan dilakukan identifikasi bakteri guna mendapatkan isolat bakteri target. Apabila hasil identifikasi bakteri ditemukan bakteri target, maka pengujian dilanjutkan ke pengujian AMR dengan menggunakan metode *Antimicrobial Sensitivity Test* (AST). Metode AST ini bertujuan untuk mengetahui bakteri target masuk ke dalam golongan **intermediate**, **sensitif** atau **resisten** terhadap antibiotik.

Pagu anggaran kegiatan surveilan AMR di 7 (tujuh) UPT DJPB bidang air payau sebesar Rp 354.269.000 yang hingga Triwulan I terealisasi sebesar Rp 25.685.420 atau 7,25%.

IKU 9. Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)

Indikator kinerja sampel monitoring residu ikan air payau yang diuji (sampel) merupakan jumlah sampel residu ikan air payau yang dimonitor pada unit pembesaran di 4 (empat) Provinsi dengan target 480 sampel. Pelaksana monitoring residu terdapat di BPKIL Serang, BPBAP Takalar, BPBAP Situbondo, dan BBPBAP Jepara. Pengujian sampel dilakukan di Laboratorium milik Pemerintah (UPT-Ditjen Perikanan Budi Daya) dengan substansi uji yang dimonitor sebagai berikut:

- A2 (golongan obat ikan yang dilarang), meliputi parameter: Chloramphenicol, metabolit nitrofurantoin (AOZ, AMOZ, SEM, AHD) dan Dimetridazole;
- B1a (golongan obat ikan yang diperbolehkan), meliputi parameter: Tetrasiklin, Oksitetrasiklin, Klortetrasiklin, Sulfonamida, Enrofloksasin dan Eritromisin;
- D2 (logam berat): Pb, Cd dan Hg. Berikut rincian target dan realisasi monitoring residu ikan air payau yang diuji (sampel).

Rincian capaian sampel di masing-masing UPT DJPB dapat dilihat pada Tabel 24 berikut:

Tabel 24. Target Indikator Kinerja “Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)” Triwulan I Tahun 2026

No	UPT DJPB	Komoditas	Target Tahunan	Realisasi Triwulan I	Persentase (%)
1	BBPBAP Jepara	Udang	80	4	5
2	BPBAP Situbondo	Udang	60	30	50
		Nila	8	5	62,5
		Lele	12	4	33,33
3	BPBAP Takalar	Udang	120	6	5
		Nila	20	0	0
		Lele	20	0	0
4	BPKIL Serang	Udang	40	0	0
		Nila	60	0	0
		Lele	60	3	5
Total			480	52	10,83

Capaian Indikator Kinerja “Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel)” pada Triwulan I Tahun 2026 baru tercapai 10,83% dari target tahunan. Masih rendahnya capaian sampel monitoring residu disebabkan, antara lain tidak tersedianya sampel residu yang memenuhi kriteria sampel (20 hari sebelum panen) serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka upaya yang perlu dilakukan pada triwulan berikutnya yaitu segera melakukan pengambilan sampel ketika umur udang/ikan telah memenuhi kriteria sampel dan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk mendukung ketercapaian pengambilan sampel. Adapun capaian itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 25. Capaian IKU Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				

52	480	10,83	-	-	250	-
----	-----	-------	---	---	-----	---

Dari table bahwa capaian pada TW I 2026 ini tidak bisa di bandingkan dengan TW I 2025 karena belum ada capaian pada TW I 2025 dikarena perhitungan dilakukan pada akhir semester.

Pagu penganggaran kegiatan monitoring residu ikan air payau yang diuji di 4 (empat) UPT DJPB bidang air payau senilai Rp 778.601.000 dengan realisasi Rp 253.413.199 atau 32,55%.

IKU 10. Infrastruktur Budi Daya Udang yang ditingkatkan (Unit)

Indonesia sebagai produsen udang terbesar dunia dengan pangsa pasar global dan pasar ekspor di dunia berkesempatan untuk bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) dalam rangka meningkatkan produktivitas udang nasional.

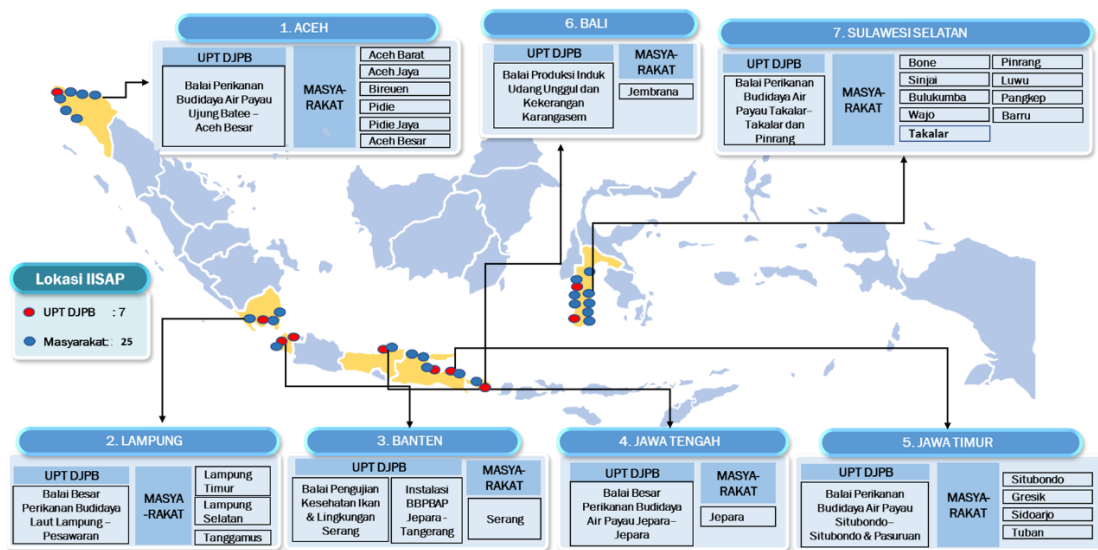
Untuk mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas budidaya udang yang terintegrasi, berkelanjutan dan ramah lingkungan maka diperlukan beberapa upaya seperti pembangunan pusat produksi induk dan benih (broodstock center), Pembangunan laboratorium kesehatan ikan, pembangunan tambak di lahan UPT Ditjen Perikanan Bud Daya KKP, Pembangunan tambak udang berbasis Kawasan dan Pembangunan tambak udang di masyarakat.

Peningkatan produksi udang dilakukan melalui Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP) dengan harapan kuantitas dan kualitas udang nasional semakin meningkat di pasar global. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan perikanan budi daya, diperlukan penyampaian capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2026.

Proyek *Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture* (IISAP) dirancang untuk menghasilkan 3 output. Output-output ini merefleksikan strategi implementasi proyek yang tidak saja memperkuat infrastruktur Unit Pelaksana Teknis DJPB sebagai ujung tombak pembangunan perikanan budidaya air payau tetapi juga menyentuh akar rumput masyarakat pembudidaya udang skala kecil sebagai pelaku usaha, dari perbaikan infrastruktur budidaya udang hingga penguatan Sumber daya manusianya.

Tujuan dan Sasaran IISAP adalah meningkatkan produktivitas, profitabilitas, dan kelestarian lingkungan dari budi daya udang. IISAP akan membantu KKP dalam memperkenalkan budidaya udang yang ramah lingkungan serta meningkatkan transparansi, ketelusuran, dan proses pelaporan menuju peningkatan produktivitas, kualitas, dan profitabilitas tambak udang skala kecil di 7 provinsi (25 kabupaten) pada Kawasan tambak seluas 5.260 hektar. IISAP juga akan menghasilkan investasi terintegrasi yang menangani proses produksi dari hulu ke hilir melalui infrastruktur, dukungan untuk meningkatkan praktik budidaya dan sistem pasca panen, dan penguatan rantai nilai.

IISAP dibiayai melalui Pinjaman dan Hibah dengan total nilai US\$ 96 juta. Nilai Pinjaman sebesar US\$ 93 Juta berasal dari *Asian Development Bank* (ADB) dan hibah US\$ 3 Juta berasal dari *Global Environment Facility* (GEF). Project ini direncanakan untuk mendanai kegiatan yang akan berlangsung selama 5 (lima) tahun mulai pada tahun 2023 hingga tahun 2027.



Gambar 5. Lokasi Proyek Peningkatan Infrastruktur Budi Daya Udang

Pada Bulan Maret progress pembangunan IISAP antara lain:

- Pembangunan Broodstock Center udang di BPIU2K Karangasem dan Multiplication Broodstock Center di BPBAP Ujung Batee dan BPBAP Takalar yang mengacu pada basic desain yang dibuat oleh Hawaii Pacific University Ocean

Institute (HPU-OI) telah selesai dan saat ini sedang tahap Lelang untuk pekerjaan konstruksi.

- Konstruksi laboratorium akan dilakukan di 7 UPT DJPB, yaitu BPBAP Ujung Batee, BBPBL Lampung, BPKIL Serang, BBPBAP Jepara, BP2IUK Karangasem, BPBAP Takalar, BPBAP Situbondo. Penyiapan DED Pembangunan Laboratorium oleh konsultan telah diselesaikan pada bulan Mei 2025 namun karena pembangunan laboratorium menjadi satu paket lelang konstruksi dengan broodstock center maka saat ini juga masih pada tahap Lelang. Target pelaksanaan konstruksi dan pengadaan peralatan laboratorium adalah bulan Maret–September 2026 dan operasional laboratorium dapat dilakukan pada bulan Oktober 2026.
- Penyusunan DED Klaster tambak masyarakat sejumlah 11 unit di 9 Kabupaten @ 5 hektar dan saluran tambak masyarakat telah selesai dilaksanakan pada tahun 2025 di 13 Kabupaten sepanjang 302,24 km, yang meliputi saluran primer, sekunder dan tersier, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel 5. Pembangunan klaster dan normalisasi saluran tambak masyarakat, saat ini pada tahap finalisasi dokumen Lelang.

Tabel 26. Klaster dan Saluran Tambak Masyarakat

Provinsi	Kabupaten	Klaster Tambak (unit)	Saluran Primer (m)	Saluran Sekunder (m)	Saluran Tersier (m)	Total (m)
Aceh	Aceh Besar	1	0	710	0	710
	Aceh Utara	0	3.267	2.780	0	6.050
	Pidie Jaya	1	0	19.720	16.440	36/170
	Bireuen	1	0	11.720	13.240	25.060
	Pidie	0	0	4.170	19.060	23.240
Lampung	Lampung Selatan	2	7.250	6.580	19.000	32.840
	Lampung Timur	1	11.597	29.390	20.540	67.780
Bali	Jembrana	0	3.430	6.810	3.540	13.780
Sulawesi Selatan	Pinrang	0	0	1.520	5.670	7.190
	Bone	2	0	11.340	12.780	24.130
	Sinjai	1	0	6.790	3.700	10.490
	Wajo	1	0	9.380	6.580	15.960

	Bulukumba	1	0	920	6.330	7.250
Jumlah		11	25.454	111.843	109.160	270.630

Tabel 27. Capaian IKU Infrastruktur Budi Daya Udang yang ditingkatkan (Unit)

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Infrastruktur Budi Daya Udang yang ditingkatkan (Unit)						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW IV 2026 Thdp TW IV 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
7	-	-	-	-	7	

Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan 1 tahun sebelumnya juga belum ada capaian atau target yang ditentukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir semester atau sistem perhitungan semesteran. Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 11. Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya air (CBIB dan CPIB) (unit usaha)

Direktorat teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) diwajibkan untuk melakukan pembinaan teknis terhadap unit pembenihan, unit pembesaran, unit produksi pakan, unit produksi obat ikan dan unit distribusi obat ikan. Sebab, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan tugas dan fungsi dalam kelembagaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fungsi sertifikasi dialihkan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHKP).

Dalam upaya meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor perikanan

budidaya nasional, penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) merupakan langkah penting untuk menjamin kualitas produk, keamanan pangan, serta praktik budidaya yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

Lingkup Pembinaan Penerapan CBIB dan CPIB yaitu pembinaan pelaku usaha pembesaran dan pembenihan sehingga siap disertifikasi penerapan CBIB dan CPIB, mencakup aspek sanitasi, pakan, benih, obat, serta lingkungan, untuk memastikan jaminan mutu, keamanan pangan, dan kesejahteraan pembudidaya.

Capaian triwulan I 2026, pelaksanaan pembinaan CBIB dan CPIB diperoleh realisasi sebanyak 8 unit dari target 380 unit dan persentase realisas adalah 2,1 %. Adapun capaian Iku Usaha yang dilakukan pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya air payau (unit) adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Unit Usaha Budi Daya Ikan Air Payau yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya air (CBIB dan CPIB) (unit usaha)

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Unit Budi Daya Ikan Air Payau yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya air (CBIB dan CPIB) (unit usaha)						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW IV 202 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
380	8	2,1	-	-	270	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 untuk IK ini adalah sebesar 380 unit dan terealisasi 8 unit dengan persentase capaian 2,1 %. Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian TW I tahun lalu dikarena belum ada capaian .

Melalui kegiatan Asistensi Perizinan Dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) dari Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) terdapat unit usaha pembesaran

dengan komoditas ikan air payau terdapat 8 pembudidaya, dengan rincian sebagai berikut dapat dilihat pada table 29.

Tabel 29. Nama Unit Usaha pembesaran dengan komoditas ikan air payau

No	Nama Lengkap	Alamat (Ds, Kec, Kab, Prov)	Nomor Telepon	Nama Unit Usaha	Alamat Unit Usaha	Komoditas	Luas Area	Produksi (kg/tahun)
1	Budi Setiawan	Jalan P. Kunom Nyaho No 4 Palangka Raya	82154881359	Tambak Udang Shrimp Estate Kalteng	Jalan raya Kuala Jelai Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara	Udang vannamei	40 Hektar	300.000 Kg
2	Nuhamad luthfi arpizal	Sukamara kalimantan tengah	81227011469	Muhamad lurhfi aprizal tambak udang	Sungai damar	Udang vannamei	2.5 ha kolam budidaya	100000
3	Deden wigustianto	Desa sungai tabuk,kecamatan pantai lunci,kabupaten sukamara provinsi kalimantan tengah	85386306630	PT.SUKAMARA AQUATIC FARM	Desa Sungai Tabuk Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah	Udang vannamei	5 hektar	—
4	Sigmund Qory Andreas	Sei Damar, Kec. Lunci, Kab. Sukamara, Kalteng	8112712792	Pokdakan Maju Jaya Bersama	Sei Damar, Kec. Lunci, Kab. Sukamara, Kalteng	Udang vannamei	6000 M2	39 ton
5	Yessy Lestia Tandaya	Sampit Kalimantan Tengah	8176976038	AGUA BORNEO CENTRA	Ujung Pandaran	Udang vannamei	-	-
6	Ahmad Fachruddin	Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	08525000053p	Tanjung Selaka Farm	Desa Sungai Damar	Udang vannamei	2 Ha	60 Ton
7	Siswanto	Desa pasir panjang blok A.1, kecamatan Arut Selatan kabupaten Kotawaringin Barat provinsi Kalimantan tengah	82253594830	Siswanto	Desa cabang barat,dan desa sungai damar kecamatan pantai lunci,kabupaten silukamara provinsi Kalimantan tengah	Udang vannamei	Di desa cabang barat 3,9 h di desa sungai damar 10 h	Di desa cabang barat 50000kg per tahun di sungai damar blum produksi
8	Windu Subagio	Kelurahan Mendawai kec Sukamara Kab. Sukamara	81349270118	Cv. Karya Lautan Mandiri	Desa sungai Tabuk Kec PantaiLunci kab. Sukamara	Udang vannamei	8 ha	120 ton

IKU 12. Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun (Unit)

Budi daya Udang Terintegrasi (*Integrated Shrimp Farming*) merupakan modelling kawasan tambak udang terintegrasi yang dilakukan secara ramah lingkungan dengan menerapkan *good aquaculture practices* dari hulu sampai dengan hilir dalam satu pengelolaan, dimana pada setiap proses yang dilakukan akan menerapkan prinsip *eco-efficiency* dan mengedepankan pelestarian sumberdaya alam, pengendalian dampak kerusakan lingkungan hidup, serta melibatkan masyarakat setempat sebagai aktor utama pertumbuhan ekonomi.

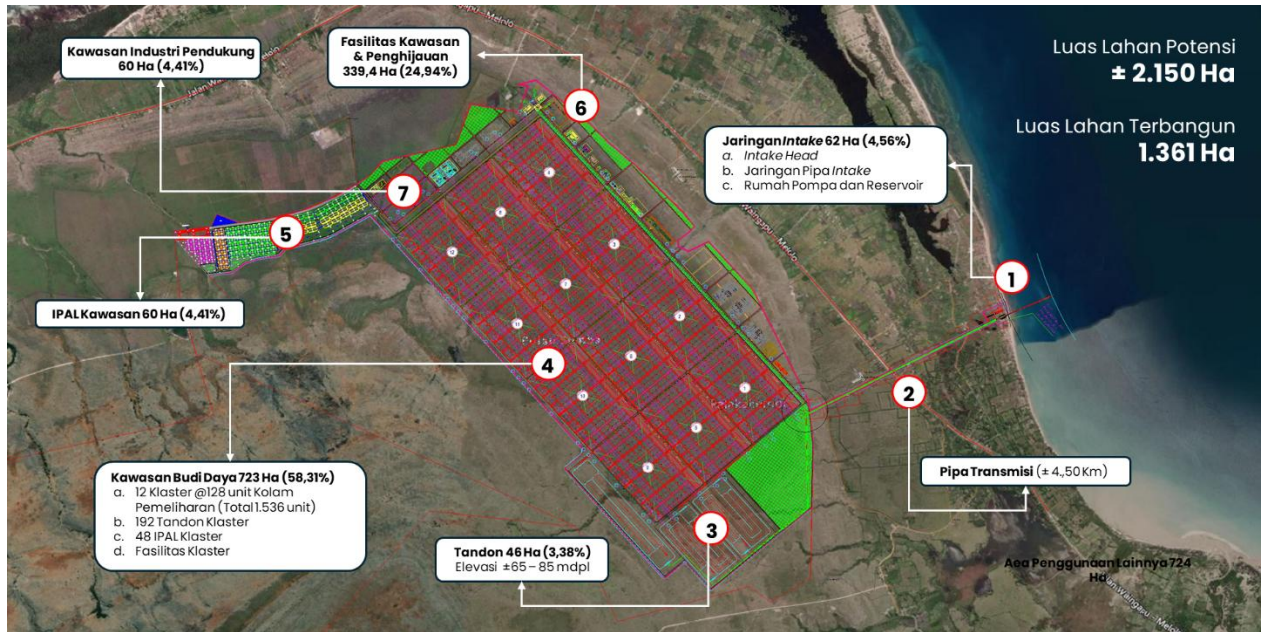
Tujuan dibangunnya Budidaya Udang Terintegrasi (*Integrated Shrimp Farming*) adalah untuk meningkatkan: 1) penerimaan devisa negara; 2) penerimaan pajak; 3) Peningkatan PNBP 4) penciptaan tenaga kerja; dan 5) kesejahteraan petambak (NTPi) dan masyarakat.

Kegiatan Budidaya Udang Terintegrasi (*Integrated Shrimp Farming*) akan dilaksanakan di Ds. Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab Sumba Timur, NTT dengan luas lahan pembangunan sebesar 2.085 Ha.

Pembangunan Budi Daya Udang Terintegrasi (*Integrated Shrimp Farming*) direncanakan akan dilaksanakan mulai dari tahun 2025 hingga 2027. Apabila diasumsikan keberlangsungan hidup sebesar 80% dengan padat tebar 225 ekor/m², dan ukuran panen 20 gram/ekor, maka pada tahun 2027 diharapkan akan dapat menghasilkan produksi sebesar 52.800 ton udang per /tahun, dengan Nilai produksi sebesar Rp. 3,96 triliyun/tahun, dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 4.730 orang (hulu – hilir). Selain itu kegiatan ini diharapkan akan memberikan multiplier effect bagi masyarakat lokal, serta diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.

Pembangunan Budi Daya Udang Terintegrasi (*Integrated Shrimp Farming*) akan terbagi menjadi 3 (tiga) Zona yaitu: a) Zona Hulu (hatchery dan pabrik pakan); b) Zona Onfarm (saluran intake, tandon utama, tandon kluster, petak pemeliharaan, saluran outlet, IPAL Kluster dan vegetasi), selain itu juga akan dibangun berbagai fasilitas umum, yaitu kantor utama, laboratorium kesehatan ikan, perumahan, rumah ibadah, klinik, kantin, sarana olahraga, dan area penghijauan, c) Zona hilir (*coldstorage*, pabrik es, dan pabrik *Styrofoam*).

Investasi beberapa pihak swasta akan dilibatkan dalam pembangunan zona 1 (hatchery dan pabrik pakan) dan Zona 3 (pabrik es, pabrik *styrofoam* dan *cold storage*).
Disain Layout



Gambar 6. rencana tata ruang untuk proyek Integrated Shrimp Farming (ISF)

Tabel 30. Capaian IKU Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun (Unit)

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Budidaya Udang Terintegrasi - ISF yang dibangun (Unit)						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi T I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
1	-		-	-	-	-

Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan 1 tahun sebelumnya juga belum ada Iku Budidaya Udang Terintegrasi -ISF yang dibangun (Unit) .Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU 13. Klaster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan yang di bangun (unit).

Indikator ini merupakan kegiatan Pengembangan klaster komoditas unggulan ikan air payau berbasis Kawasan, klaster yang akan dikembangkan adalah kawasan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) di Eks. TIR Karawang. Pengembangan klaster merupakan pengembangan dari kegiatan pembangunan BINS tahap 1 yang telah dilakukan pada tahun 2023 - 2025. Pengukuran capaian dilakukan tahunan dengan target 1 unit.

Kegiatan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang pada periode Triwulan I Januari hingga Maret 2026, terdapat beberapa kegiatan BINS Karawang sebagai berikut:

1. Penyelesaian Konstruksi BINS Karawang

Penyedia Konstruksi Rancang dan Bangun BINS Karawang belum menyelesaikan pekerjaannya hingga kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2026. Berdasarkan hasil Reviu Itjen atas cut-off pekerjaan BINS Karawang, progres fisik terealisasi **94,053%**, sehingga terdapat sisa pekerjaan yang belum selesai sebesar **5,947%**.

Tindak lanjutnya adalah PPK memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi hingga 18 Februari 2026 melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), dengan pengenaan denda per hari sebesar 1/1000 dari sisa pekerjaan 5,947%.

Adapun pekerjaan yang harus diselesaikan oleh penyedia pada masa pemberian kesempatan adalah: Automatic Feeder 44 unit; Pemasangan geomembran di Blok I dan Blok J; Pekerjaan saluran tersier di Blok I dan Blok J; Pengadaan dan pemasangan pipa dan aksesoris; Pembagi air saluran sekunder; Penyangga pipa pompa tandon ke bak bagi tersier; Pengadaan dan pemasangan panel kincir + aksesoris; Panel pompa kolam; Pekerjaan akses paving blok di Rumah Genset Rumah jaga tambak dan gudang; Rumah jaga operator; Jalan produksi sirtu; Akses paving blok di bangunan pendukung; dan Pekerjaan menara pandang.

Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan fisik 100% pada tanggal 3 Februari 2026, melalui Berita Acara Serah Terima/Provisional Hand Over (PHO) Nomor 570/DJPB.3/BINS/II/2026. Setelah PHO, penyedia melaksanakan pemeliharaan konstruksi selama 365 hari kalender, yaitu 4 Februari 2026 s/d 3 Februari 2027.

2. Audit BPK terhadap Pekerjaan Konstruksi BINS Karawang

Pada Januari - Februari 2026, Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap Pekerjaan Konstruksi BINS Karawang, sebagai berikut:

- a. Audit fisik: Memeriksa kesesuaian antara RAB yang tercantum dalam kontrak, gambar as-build drawing, dan fakta hasil pekerjaan di lapangan, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- b. Audit Administrasi: Memeriksa kelengkapan dokumen, antara lain dokumen lelang/tender, dokumen KPJ, dokumen perancangan, dokumen kontrak dan adendumnya, RAB, dokumen MC-0 dan MC-100, back up quantity, back-up quality, justifikasi teknis, laporan bulanan, laporan akhir, gambar, foto dokumentasi pekerjaan, dokumen pembayaran termin, dokumen serah terima hasil pekerjaan, dan dokumen revidir.

Pihak PPK, Konsultan MK, dan Penyedia telah mendampingi proses audit fisik di lokasi proyek dan melengkapi semua kelengkapan dokumen administrasi.

3. Persiapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) untuk Objek Vital Nasional (Obvitnas) BINS Karawang

BINS Karawang telah ditetapkan menjadi Objek Vital Nasional (Obvitnas) melalui Kepmen KP Nomor 92 Tahun 2025. Tujuan penetapan BINS Karawang sebagai Obvitnas adalah melindungi aset-aset strategis negara yang dikelola BLUPPB Karawang dari berbagai ancaman. Dengan demikian, BLUPPB Karawang dapat memastikan kegiatan operasional tambak berlangsung lancar, kondusif, aman.

Adapun urgensi BLUPPB Karawang menjadi Obvitnas adalah adanya ancaman keamanan wilayah akibat luasnya kawasan lahan budi daya, kerentanan infrastruktur dan bencana akibat degradasi kualitas lahan tambak, dan perlunya koordinasi lintas sektor untuk pengamanan aset strategis negara.

Sehubungan dengan tujuan dan urgensi di atas, maka pada 5 Februari 2026 DJPB mengundang Tim Auditor Obvitnas dari internal KKP untuk meninjau kondisi lapangan dan membahas persiapan penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di kawasan BINS Karawang.

Tim Auditor menjelaskan 5 elemen penilaian SMP:

- a. Komitmen dan Kebijakan (18 kriteria): Terdapat dokumen kebijakan pengamanan yang ditetapkan oleh pimpinan Obvitnas sesuai dengan perkiraan ancaman
- b. Pola Pengamanan (49 kriteria): Bentuk, sifat, sasaran, area, dan komando/ pengendalian pengamanan
- c. Konfigurasi pengamanan (31 kriteria): Komponen standar pengamanan (manusia dan infrastruktur); Penetapan dan pembinaan area pengamanan; Rencana umum pengamanan; Jumlah anggota pengamanan.
- d. Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan (10 kriteria), baik anggota pengamanan internal maupun anggota pengamanan Polri
- e. Monitoring dan Evaluasi (10 kriteria): Terdapat prosedur dan mekanisme pemantauan dan pengukuran yang berkaitan dengan kinerja pengamanan; Terdapat catatan hasil pemantauan pelaksanaan SMP.

Rencana pentahapan pasca penetapan Obvitnas:

- a. Identifikasi dan pemetaan: Profil, lay out, incident response plan (IRP), penentuan zonasi pengamanan, rencana pengamanan.
- b. Workshop Penyusunan Dokumen Pendukung SMP Obvitnas
- c. Koordinasi antar instansi dalam rangka penguatan sistem pengamanan.
- d. Pengembangan infrastruktur pendukung keamanan dan pelayanan
- e. Audit Internal SMP Obvitnas
- f. Penyusunan Pedoman Kerja Teknis (PKT) dengan Polri dan Polda
- g. Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas oleh Polri, dalam bentuk Bintel, Audit, Klarifikasi, Sertifikat.

Diskusi dengan Tim Auditor Obvitnas:

- a. Setelah kunjungan lapang, diidentifikasi beberapa titik rawan keamanan:
 - Intake air laut: Potensi pencemaran di tandon utama dan saluran pasok
 - Intake air tawar: Potensi pencemaran dan keamanan karena langsung berbatasan dengan sawah dan tidak ada pagar pembatas dengan lahan masyarakat
 - Tambak: Potensi keamanan/pencurian karena kawasan terbuka, rawan pencemaran yang menurunkan kualitas air

- Akses jalan utama: Masyarakat bebas masuk dan keluar melewati jalan tanpa adanya satpam dan portal di setiap ujung jalan.
- b. Jika DJPB ingin menerapkan SMP Obvitnas, maka diperlukan dukungan kebijakan dan penyediaan anggaran yang lumayan besar untuk membenahi sarana, prasarana, dan kompetensi SDM pengamanan.
- c. Untuk kelanjutan proses menuju Sertifikasi SMP Obvitnas, perlu dibentuk tim khusus dari unsur DJPB Pusat dan BLUPPB Karawang yang mengawal persiapan lapangan dan melengkapi dokumen administratif yang dipersyaratkan.
- d. Estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp. 650 juta, terdiri dari PNBPN Polri untuk sertifikasi 300 juta; perjalanan dinas tim Polri dan tim Auditor 200 juta; Seremonial dan lain-lain 150 juta.

4. Kunjungan Wakil Menteri KP dan Tindak Lanjutnya

Pada tanggal 25 Februari 2026, Bapak Wakil Menteri KP berkunjung ke BLUPPB Karawang untuk meninjau hasil pembangunan konstruksi dan non konstruksi BINS Karawang. Pihak PPK melaporkan bahwa konstruksi fisik sudah selesai 100% dan kolam produksi sudah dioperasikan, Begitupun dengan bangunan pendukung, sarana/peralatan, benih, dan pakan sudah dioperasikan.

Setelah kunjungan lapangan, Bapak Wamen menyampaikan ada 29 catatan yang harus segera dibenahi (lampiran 1). Adapun status tindak lanjut sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, sebagai berikut:

- a. Sebanyak 25 poin saat ini sedang dalam proses penyelesaian tindak lanjut.
- b. Sebanyak 4 poin memerlukan dukungan alokasi anggaran khusus, mengingat kegiatan dimaksud tidak termasuk dalam kontrak pekerjaan BINS tahun 2025. Untuk

itu, diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp15.983.680.000, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembangunan jalan produksi Blok G dan Blok H dengan konstruksi beton sepanjang 2,16 km, sebesar Rp5.482.080.000;
- b. Pembangunan jalan sub-produksi (akses ke automatic feeder) dengan konstruksi beton sebanyak 20 (dua puluh) jalur, sepanjang 6,8 km, sebesar Rp5.188.800.000;
- c. Pembuatan kantong parkir sebanyak 12 (dua belas) titik dengan konstruksi beton, seluas total 432 m², sebesar Rp712.800.000;
- d. Pengadaan mesin grading dan panen sebesar Rp4.600.000.000

5. Exit Meeting Jamintel – Kejagung

Pada tanggal 9 Maret 2026, Tim Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung berkunjung ke BLUPPB Karawang dalam rangka Exit Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk proyek BINS Karawang.

Tujuan Exit Meeting:

- a. Penyampaian progres final pembangunan BINS Karawang
- b. Diskusi langkah-langkah pengamanan atas Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT)
- c. Rekomendasi keberlanjutan operasional BINS Karawang
- d. Seremoni penyerahan Surat Pengakhiran PPS dan Plakat
- e. Monitoring Hasil Pembangunan

Langkah-langkah pengamanan AGHT oleh Tim PPS Jamintel yang meliputi:

- a. Pengamanan Personil yang terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dan pengawasan terhadap upaya yang dinilai dapat mempengaruhi integritas, obyektivitas, dan rasa aman personil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
- b. Pengamanan materiil dan/atau aset terhadap upaya yang dinilai dapat mempengaruhi dan menghambat serta menggagalkan proses pengadaan lahan dan/atau pemanfaatan aset negara
- c. Hambatan Birokrasi yaitu kendala terkait proses perijinan yang disebabkan karena kekosongan hukum, ketidakjelasan, tumpang tindih peraturan

perundang-undangan dan/atau adanya pungutan liar dalam proses pengurusan perijinan

Rekomendasi Jamintel untuk keberlanjutan operasional BINS Karawang:

- a. Lahan tambak belum dilengkapi dengan pagar pembatas. Akibatnya kawasan seluas ini sangat mudah untuk dimasuki atau diakses oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, sehingga terdapat potensi gangguan keamanan berupa pencurian peralatan dan hasil produksi budidaya. Oleh karena itu, perlu segera diusulkan untuk pembangunan pagar pembatas di sekeliling area tambak.
- b. Untuk sumber air tawar berasal dari aliran sungai yang berpotensi tercemar dari limbah masyarakat maupun pestisida dari areal pertanian yang ada di sekitar sungai.
- c. Terkait kondisi lingkungan di areal kolam, diperlukan: - Deteksi dini adanya limbah beracun yang masuk ke dalam kolam - Optimalisasi penyaringan air yang masuk ke dalam kolam - Pengujian laboratorium sampel air yang ada di kolam tandon sebelum dialirkan ke kolam tambak
- d. Dikarenakan tujuan BINS adalah untuk penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan pembudidaya, maka perlu memberdayakan masyarakat di sekitar area tambak agar bisa ikut berpartisipasi dan ikut merasakan manfaat dari pembangunan tambak BINS Karawang tersebut
- e. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset/material berupa sarana dan prasarana BINS Karawang tersebut, serta untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan dan operasionalnya, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pihak Ditjen Perikanan Budi Daya.
- f. Dalam rangka deteksi dini dan pencegahan terhadap adanya potensi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan spesifikasi teknis pekerjaan dan keuangan, maka perlu dilakukan audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Jenderal KKP.
- g. Kepada semua stakeholder BINS Karawang agar tidak terperangkap dengan praktik-praktik transaksional dalam pelaksanaan pembangunan dan tidak boleh

terbelenggu adanya AGHT yang timbul, baik yang sudah diprediksi sebelumnya maupun yang muncul saat pelaksanaan

6. Pemeliharaan Konstruksi BINS Karawang

Setelah Provisional Hand Over (PHO) tanggal 3 Februari 2026, Penyedia berkewajiban melaksanakan pemeliharaan selama 356 hari kalender tanpa tambahan biaya dari KKP. Dalam masa pemeliharaan ini, Tim Satgas BINS menemukan beberapa titik yang mengalami kerusakan sehingga pihak penyedia harus segera memperbaiki.

Adapun jenis pemeliharaannya antara lain:

- a. Perbaikan kolam (pematang longsor, pematang saluran outlet longsor, pematang IPAL longsor, HDPE menggelembung, lepas, sobek)
- b. Perbaikan lampu padam di Blok G2
- c. Perbaikan jalan paving di Blok E dan D
- d. Pemantapan dan perapihan jalan utama
- e. Pembuatan jalan menuju helipad
- f. Penghijauan (penanaman pohon)

7. Kegiatan Operasional BINS Karawang

Operasional BINS Karawang dilaksanakan dengan menganut prinsip *good aquaculture practices*, sebagai berikut:

- a. Persiapan lahan (pengeringan tambak, pencucian tambak, penjemuran, disinfektan, pemasangan saringan inlet dan outlet, pemasukan air)
- b. Penebaran benih, dilakukan pada pagi dan sore hari untuk menghindari terjadinya stres pada ikan.
- c. Pemeliharaan di kolam, dengan memperhatikan ukuran tebar, padat tebar, pemberian pakan, pengendalian rasio FCR untuk efisiensi pakan, pengendalian *survival rate*, pengukuran besar ikan, dan grading ikan
- d. Manajemen kualitas air, melalui pengukuran salinitas, pH, oksigen terlarut (DO), tingkat amonia, dan kecerahan air

- e. Manajemen hama dan penyakit ikan, melalui pemasangan jaring diatas petakan tambak untuk menghalau burung, benih yang digunakan bebas virus, pemberian vaksin, dan menerapkan sistem *biosecurity*.

**Lampiran 1. Status Tindak Lanjut Kunjungan Wakil Menteri KP
ke Tambak Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang**

No.	Uraian	Proses Penyelesaian	Tambahan Anggaran
1	Pelebaran pos jaga dibersihkan	√	
2	Kanopi/cabang pohon di jalan dirapikan	√	
3	Batang pohon di area putih dirapikan	√	
4	Penanaman pohon di pinggir jalan (penghijauan)	√	
5	Pembuatan parkir di bahu jalan (tempat mobil panen)		√
6	Pembuatan penunjuk jalan	√	
7	Pembersihan lantai pompa air laut	√	
8	Pengecekan pompa air laut	√	
9	Pembersihan pipa air laut	√	
10	Pengerasan lantai di bawah pipa masuk ke tandon	√	
11	Pengaspalan jalan sebelum masuk kompleks BLUPPB Karawang	√	
12	Perapian kabel pompa	√	
13	Peninggian U-ditch setelah bak pembagi	√	
14	Pengerasan lantai di depan silo (automatic feeder)		√
15	Jalan sub-blok dirapikan	√	
16	Parkir VIP di depan menara pandang	√	
17	Tandon diisi Bandeng dari Pangkahwetan	√	
18	Perbaikan tanggul agar menggunakan cerucuk	√	
19	Mesin pemotong rumput diganti model dorong	√	
20	SOP Pemeliharaan Pompa	√	
21	Kebersihan dan kerapian pos jaga	√	
22	CCTV	√	
23	Kebersihan pintu air	√	
24	Penyusunan SOP pekerja	√	
25	Pembuatan petak percontohan	√	
26	Bangsai panen agar dibersihkan	√	
27	Perbaikan dan perapian jalan produksi Blok G dan Blok H		√
28	Pengadaan fish pump		√
29	Perbaikan Jalan utama	√	

Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Operasional BINS Karawang


Dokumentasi Operasional BINS Karawang





a. Pemberian pakan melalui Automatic Feeder / Silo



b. Penebaran Benih Ikan Nila di Kolam Produksi



c. Penebaran Benih Ikan Nila di Kolam Produksi



d. Distribusi Pakan dari Gudang Pakan

1


Dokumentasi Operasional BINS Karawang





e. Pemberian vaksin ikan



f. Pengukuran ikan secara rutin



g. Kegiatan Grading Ikan

2

IKU 14. Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang di bangun (Unit)

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, terdapat 78.550 Ha lahan tambak yang tidak produktif. Beberapa hal yang menjadi penyebab tidak produktifnya lahan tersebut antara lain: 1). budi daya masih dilakukan secara tradisional; 2). tidak adanya tandon (reservoir/penampungan air) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah hasil budi daya; dan 3). rentan terhadap serangan penyakit, sehingga produksi dan produktivitas lahan menjadi rendah yakni 0,6 Ton/Ha/Tahun.

Luas lahan budi daya air payau eksisting yang paling luas dimiliki oleh Kabupaten Indramayu dengan total luas 19.220,24 Ha dan memiliki luas lahan budi daya air payau yang sesuai RTRW paling besar sebesar 12.241,21 Ha. Pada sisi lain Kabupaten Bekasi menjadi wilayah yang memiliki persentase luas lahan budi daya yang tidak sesuai RTRW sebesar 99,19%.

Selama periode bulan Maret Tim Kerja Kawasan Budi Daya Ikan Air Payau telah melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator kinerja Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang dibangun sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tata Batas

Pada periode Maret, Secara umum, progres pelaksanaan tata batas menunjukkan capaian sebagai berikut:

- Pengukuran Titik Batas: 87,55% (8.440 dari 9.640 titik)
- Pemasangan Pal Batas: 5,40% (521 dari 9.640 titik)
- Berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan tata batas sampai dengan 10 Maret 2026, capaian kinerja menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan pada indikator pengukuran titik batas dengan tingkat capaian sebesar 87,55%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar tahapan awal kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.
- Pada indikator pemasangan pal batas, capaian masih relatif rendah yaitu sebesar 5,40%, sehingga terdapat kesenjangan antara progres pengukuran dengan tahap lanjutan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses transisi dari pengukuran ke pemasangan fisik belum berjalan optimal.

2. Pelaksanaan Amdal

Pada bulan Maret dilakukan penyusunan dokumen KAK studi Analisis Dampak Lingkungan untuk revitalisasi Tambak Pantai utara Jawa Barat. Penyusunan KAK ini merupakan tahapan awal yang strategis dalam memastikan

bahwa pelaksanaan kegiatan revitalisasi tambak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, serta meminimalkan potensi dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan masyarakat sekitar.

Progres penyusunan dokumen KAK AMDAL menunjukkan bahwa aspek perencanaan lingkungan telah mulai diintegrasikan dalam pelaksanaan program. Hal ini menjadi indikator positif terhadap komitmen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, tahapan ini masih berada pada fase awal sehingga memerlukan percepatan, mengingat dokumen AMDAL merupakan salah satu prasyarat penting sebelum pelaksanaan konstruksi secara penuh. Keterlambatan dalam penyusunan dan persetujuan dokumen lingkungan berpotensi menghambat tahapan kegiatan berikutnya, khususnya pada pekerjaan fisik.

Selain itu, kompleksitas wilayah Pantai Utara Jawa Barat yang mencakup beberapa kabupaten seperti Bekasi, Subang, dan Indramayu menuntut adanya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah yang intensif dalam penyusunan dokumen tersebut.

Tabel 31. Capaian IKU Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang di bangun (Unit)

Nama SS : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang di bangun (Unit)						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi T I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
4	-	-	-	-	-	-

Pada indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan 1 tahun sebelumnya juga tidak ada Iku Revitalisasi Tambak Budi Daya

Ikan Air Payau yang di bangun (Unit) .Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

3.2.2 Sasaran Kegiatan (SK-2) : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Dit. Ikan Air Payau

IKU 15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit dan telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Ikan Air Payau yang menjadi objek pengawasan. Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Ikan Air Payau dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya. Adapaun Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau dapat di lihat dibawah ini.

Tabel 32. Data Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Direktorat Ikan Air Laut	88,24%
2	Direktorat Rumput Laut	92,31%
3	Direktorat Ikan Air Tawar	100,00%
4	Direktorat Ikan Air Payau	100,00%
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	97,46%
6	BBPBAP Jepara	97,46%
7	BBPBL Lampung	100,00%
8	BBPBAT Sukabumi	100,00%
9	BPBAP Situbondo	100,00%
10	BPBAP Takalar	97,46%
11	BPBAT Sungai Gelam	100,00%
12	BPBAT Mandiangin	97,46%

13	BPBL Batam	100,00%
14	BPBL Lombok	100,00%
15	BPBL Ambon	97,46%
16	BPBAP Ujung Batee	97,46%
17	BPBAT Tatelu	97,46%
18	BLUPPB Karawang	100,00%
19	BPIUUK Karangasem	97,46%
20	BPKIL Serang	100,00%

Tabel 33. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
86	100	116,27	92,86	107,68	85	101,17

Berdasarkan Tabel 50 di atas, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 untuk indikator kinerja ini adalah 86. Realisasi yang diperoleh adalah 100 dengan capaian nilai pada Triwulan I tahun 2025 sebanyak 116,27 %. Pada indikator kinerja manajerial ini, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025 pada periode yang sama, persentasenya diperoleh lebih tinggi.

IKU 16. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau

Evaluasi SAKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang

pendayagunaan aparatur negara. Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Adapun capaian Iku Sakip Dit Payau dapat dilihat pada tabel 34 di bawah ini.

Tabel 34. Capaian IKU Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
84,2	-	-	-	-	84	-

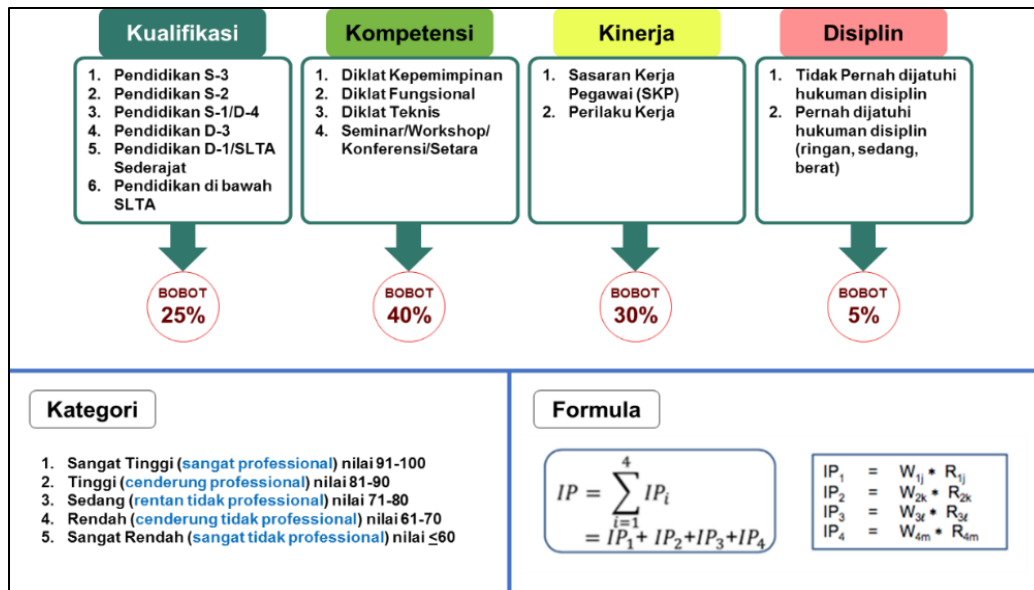
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target nilai yang ditetapkan tahun 2026 untuk indikator kinerja ini adalah 84,2. Pada indikator kinerja manajerial ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan 1 tahun lalu sebelumnya juga belum ada capaian dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir semester .

IKU 17. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau

Indikator kinerja ini adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN

diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/sejenis;
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.



Gambar 7. Matrik Perhitungan Indeks profesionalitas ASN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan kepada ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, diklat, seminar/workshop/magang, dan sejenisnya. Selain itu, didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik.

Pada tahun 2026 target IKU IP ASN sebesar 81,5. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kinerja IP ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau dapat dilihat pada tabel 35 di bawah ini.

Tabel 35. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				

81,5	-	-	81	-	81	100,36
------	---	---	----	---	----	--------

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target nilai yang ditetapkan tahun 2026 untuk indikator kinerja ini adalah 81,5. Pada indikator kinerja manajerial ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan 1 tahun lalu sebelumnya juga belum ada capaian dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir semester . Rencana aksi pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja dalam hal peningkatan nilai IP ASN dan memberikan informasi kepada pegawai untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai nilai yang ditentukan.

IKU 18. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut ini tabel capaian realisasi indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau kinerja pada periode Triwulan I tahun 2026:

Tabel 36. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Dit IA Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
81	-	-	-	-	70	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 untuk IK ini adalah sebesar 81 Pada indikator kinerja manajerial ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena pada periode Triwulan 1 tahun lalu sebelumnya juga belum ada capaian dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun .

IKU 19. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau

Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan keperluan sehari-hari perkantoran. Indikator ini menjadi pendukung untuk mencapai kegiatan manajemen internal Dit. Ikan Air Payau berupa Kehadiran Pegawai, Pengelolaan SDM Aparatur, Persuratan, Kerumahtanggan dan Pengelolaan Keuangan. Kearsipan, operasional dan pemeliharaan kantor. Pada tahun 2026 target indikator kinerja ini yaitu 100 persen. Berikut adalah Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Rekap Persuratan pada Direktorat Ikan Air Payau Triwulan I Tahun 2026.

1. Kehadiran Pegawai

Jumlah pegawai Direktorat Ikan Air Payau pada Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 47 orang yang terdiri dari 35 orang ASN, 4 orang PPPK 2024, dan 7 orang PPPK 2025, 1 orang PPPK paruh waktu (pelantikan bulan Oktober 2025). Kehadiran pegawai dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang hadir

dibandingkan dengan target kehadiran. Capaian kinerja kehadiran pegawai pada Direktorat Ikan Air Payau TW I tahun 2025 yaitu 113,45 % sesuai Tabel 37.

Tabel 37.Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Direktorat Ikan Air Payau Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Target Kehadiran	Kehadiran			persentase Kehadiran (%)
				Kehadiran Kantor	Dinas Luar	Jumlah	
1	Direktur	1	56	18	37	55	100,1
2	Timja Kawasan Budi Daya Ikan Air Payau	9	504	394	142	536	94,02
3	Timja Induk dan Benih	8	448	293	78	371	120,75
4	Timja Pakan Ikan	6	280	241	22	263	106,46
5	Timja Produksi	6	336	246	56	302	111,25
6	TimjaKesehatan Ikan	7	392	311	7	318	123,27
7	Timja Dukungan Manajemen	9	504	341	26	367	137,32
Jumlah		47	2520	1884	368	2212	113,45

2. Pengelolaan SDM Aparatur

Pengelolaan SDM Aparatur merupakan pemenuhan dokumen kepegawaian untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tugas belajar/izin belajar, penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan pensiun sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

Capaian Kinerja Pengelolaan SDM Aparatur Direktorat Ikan Air Payau pada Triwulan I 2026 yaitu **100** % terpenuhi

a. Kenaikan Gaji Berkala

Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Untuk Triwulan I tahun 2026 ada terdapat pegawai Direktorat Ikan Air Payau yang memenuhi persyaratan dan mendapatkan SK Kenaikan Gaji Berkala yaitu:

No	Nama	NIP	KGB
1	Drh.Christina Retna Handayani, M.Si.	196609051994032005	1 Maret 2026
2	Muhammad Lukrianto, SE.	198006102006041004	1 April 2026
3	Andi Rahman, S.Pi.	197812172007011001	1 April 2026
4	Daryati, A.Md.	197006261998032004	1 April 2026
5	Indra Gunawan Wibisono	197006261998032004	1 April 2026

b. Kenaikan Pangkat

Kenaikan Pangkat PNS adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara. Sampai dengan TW I tahun 2026, pegawai Direktorat Ikan Air Payau ada 2 orang yang diajukan sebagai berikut :.

No	Nama	Lama Gol/Pangkat	Lama Gol/Pangkat
1	Sri Handayani,S.Pi.,M.Sc / 198509012010012040	Penata Tk.I/IIId	Pembina (IV/a)
2	Solehudin Abdul Gani,S.Pi / 197007272001121001	Pembina (IV/a)	Pembina Tingkat I (IV/b)

c. Penghargaan

Satyalencana Karya Satya (SLKS) adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada para PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan serta prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Satyalencana Karya Satya dibagi dalam tiga kelas, yaitu Satyalencana Karya Satya 10 Tahun, Satyalencana Karya Satya 20 Tahun, dan Satyalencana Karya Satya 30 Tahun. Pada TW I Direktorat Ikan Air Payau mengajukan 2 orang ASN yaitu :

No	Nama / NIP	X Tahun
1.	Yudi Supeni,S.Pi.,M.M / 1975020620060410081	√
2.	Neneng Dahlia /198208162005022001	√

3. Persuratan

Jumlah surat masuk dan surat keluar pada Direktorat Ikan Air Payau pada Triwulan I tahun 2026 sebanyak 587 surat. Surat masuk sebanyak 497 surat yang terdiri dari Surat Dinas, Undangan dan Rekomendasi . Sedangkan surat keluar sebanyak 90 surat yang terdiri dari surat dinas, memorandum/nota dinas, undangan baik lingkup KKP maupun swasta. Semua surat masuk dan surat keluar telah tuntas terdistribusi, dengan capaian 100% terpenuhi. Rincian surat masuk dan surat keluar dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38. Rekap Persuratan pada Direktorat Ikan Air Payau Triwulan I Tahun 2026

No	Jenis/Surat Dokumen	Jumlah	Keterangan
A. Surat Masuk			
1.	Surat Masuk	372	Lingkup KKP, Dinas, Swasta
2.	Undangan Masuk	125	Lingkup KKP, Dinas, Swasta
	Jumlah A	497	
B. Surat Keluar			
1.	Surat Dinas Keluar	34	Lingkup KKP, Dinas, Swasta
2.	Memo Keluar	46	Lingkup Ditjen PB
3.	Surat Undangan	10	Lingkup KKP, Dinas, Swasta
	Jumlah B	90	
	Total A + B	587	

Dari uraian di atas, persentase capaian kinerja persuratan pada Direktorat Ikan Air Payau, Triwulan I tahun 2026 sebesar **100 %**

4. Layanan Kerumahtanggaan

Untuk mendukung terlaksananya seluruh program-program dan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi Direktorat Ikan Air Payau, diperlukan kegiatan koordinasi atau rapat di dalam kantor yang bertempat di ruang rapat Direktorat Ikan Air Payau Lantai 6 GMB IV. Peserta rapat berasal dari internal Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun eksternal KKP.

Pada Triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan rapat sebanyak 10 kegiatan sesuai pada Tabel 39.

Tabel 39. Layanan Kegiatan Rapat pada Direktorat Ikan Air Payau TW I 2026

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	13 Januari 2026	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Residu Tahun 2026
2	23 Januari 2026	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Residu Tahun 2026
3	02 Februari 2026	Rapat Pembahasan Peta Kawasan Budidaya Ikan Air Payau propinsi Jawa Tengah
4	03 Februari 2026	Rapat Permohonan Audiensi terkait pencegahan Antibiotik dan Moitoring Residu pada Budidaya Udang
5	06 Februari 2026	Rapat Kegiatan Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan
6	10 Februari 2026	Rapat Permohonan Audiensi Dinas Perikanan Kota Bau Bau Sulawesi Selatan
7	06 Maret 2026	Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Penetapan Kawasan Perikanan Budidaya Air Payau
8	30 Maret 2026	Rapat Permohonan Audiensi P3UW Lampung

5. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Ikan Air Payau terdiri dari pertanggungjawaban Penggantian Uang Persediaan, Pembayaran LS Bendahara dan Pembayaran LS pihak ketiga. Pengelolaan Keuangan pada TW I sudah di laksanakan dengan rampung 100 %.

Perhitungan Persentase Layanan Perkantoran sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Layanan Perkantoran} &= \frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100}{5} \times 100\% \\
 &= 100
 \end{aligned}$$

Tabel 40. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
100	100	100	96,99	103,13	80	1

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %. Capaian Realisasi TW I pada indikator kegiatan Layanan Perkantoran adalah adalah 100 % Lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu (2025).

IKU 20. Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana, dan oleh siapa dilakukan. Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0, Probis Level 1, Probis Level 2, dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi dalam penyelesaian SOP, .KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Berikut ini tabel capaian realisasi indikator kinerja Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau pada periode Triwulan I tahun 2026.

**Tabel 41. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker
Direktorat Ikan Air Payau**

Nama SS : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Payau						
TW I 2026			Realisasi TW I 2025	Perbandingan Realisasi TW I 2026 Thdp TW I 2025 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
100	-	-	-	-	65	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2026 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100. Pada indikator kinerja manajerial ini belum bisa dilaksanakan karena perhitungan dilakukan pada akhir tahun atau system perhitungan tahun .

BAB IV. PENUTUP

Direktorat Ikan Air Payau merupakan salah satu unit kerja Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautandan Perikanan Republik Indonesia, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budi daya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Ikan Air Payau berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dengan Direktur dan/atau Pelaksana Tugas Direktur Ikan Air Payau.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan I tahun 2026 telah menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperoleh selama periode Triwulan I tahun 2026. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja dalam Bab III, dari hasil analisis terhadap pencapaian kinerja Direktorat Ikan Air Payau sampai akhir periode Triwulan I tahun 2026 dari total 20 (dua puluh) indikator kinerja pendukung sasaran strategis, sejumlah 12 (dua belas) indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan bahkan melebihi target. Semoga di tahun mendatang akan semakin meningkat lagi .